



PEMERINTAH
KOTA PADANG

LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH
KOTA PADANG
TAHUN 2024



HUT KOTA PADANG KE- 346
DI ADAKAN PADA 17 AGUSTUS 2023

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Tahun 2024 dapat selesai sesuai waktu yang ditargetkan. Laporan Kinerja ini adalah bentuk akuntabilitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Padang yang merupakan bentuk perwujudan *Good Governance* dan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada masyarakat selaku pemberi amanah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang disusun sesuai Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Muatan utama Laporan Kinerja ini adalah (a) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang; (b) Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama; dan (c) Penjelasan atas Pencapaian Kinerja.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Padang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja cerdas semua pihak, baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, diucapkan terima kasih. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Demikian laporan ini disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Padang, Maret 2025

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Padang telah menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola yang baik, transparan dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur dan diandalkan.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang ini disusun untuk memberikan gambaran tentang capaian kinerja program maupun sasaran sebagai realisasi pencapaian target-target yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2019-2024 yang juga telah dituangkan dalam kontrak kerja berupa Perjanjiaan Kinerja Tahun 2024 untuk diwujudkan pada Tahun 2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Pemerintah Kota Padang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan RPJMD tersebut telah dirumuskan visi Pemerintah Kota Padang periode 2019-2024 yaitu :

“ Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kota Padang menetapkan 7 (tujuh) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif.
4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

6. Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana.
7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

Tujuh misi di atas dicapai dengan 20 sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja, a. Rata-rata lama sekolah (tahun) dengan persentase capaian 99,91%, dan b. Harapan lama sekolah (tahun) dengan persentase capaian 100,06%.

Sasaran Strategis 2

Sasaran 2 dengan 2 indikator kinerja, a. Angka harapan hidup dengan persentase capaian 100,33% dan b. Prevalensi stunting pada balita dengan persentase capaian 100,78%.

Sasaran Strategis 3

Sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja, Indeks pembangunan gender, persentase capaian belum dapat diukur karena datanya belum tersedia.

Sasaran Strategis 4

Sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja, Pengeluaran per kapita, persentase capaian 101,02%.

Sasaran Strategis 5

Sasaran 5 dengan 1 indikator kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan, dengan persentase capaian 101,96%.

Sasaran Strategis 6

Sasaran 6 dengan 1 indikator kinerja, Persentase perumahan dan pemukiman yang layak, dengan persentase capaian 96,14%.

Sasaran Strategis 7

Sasaran 7 dengan 1 indikator kinerja, Angka kriminalitas, dengan persentase capaian 105,01.

Sasaran Strategis 8

Sasaran 8 dengan 2 indikator kinerja, a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan persentase capaian 106,56%, dan b. Luas Kawasan kumuh yang ditangani (ha) dengan persentase capaian 100%.

Sasaran Strategis 9

Sasaran 9 dengan 1 indikator kinerja, Tingkat pengangguran terbuka dengan persentase capaian 97,24%.

Sasaran Strategis 10

Sasaran 10 dengan 2 indikator kinerja, a. Tingkat kemiskinan dengan persentase capaian 100,1%, dan b. PDRB per kapita dengan persentase capaian 107,53%.

Sasaran Strategis 11

Sasaran 11 dengan 2 indikator kinerja, a. Peningkatan nilai PMDN dengan persentase capaian 87,65%, dan b. Peningkatan nilai PMA dengan persentase capaian 527%.

Sasaran Strategis 12

Sasaran 12 dengan 1 indikator kinerja, Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, persentase capaian 98,15%.

Sasaran Strategis 13

Sasaran 13 dengan 1 indikator kinerja, Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif, dengan persentase capaian 112,47%.

Sasaran Strategis 14

Sasaran 14 dengan 1 indikator kinerja, Kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap capaian belum dapat diukur karena datanya belum tersedia 90,41%.

Sasaran Strategis 15

Sasaran 15 dengan 4 indikator kinerja, a. Jumlah wisata mancanegara dengan persentase capaian 639,83%, b. Jumlah kunjungan wisata domestik dengan persentase capaian 149,96%, c. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dengan persentase capaian 99,48%, dan d. Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik dengan persentase capaian 112%.

Sasaran Strategis 16

Sasaran 16 dengan 1 indikator kinerja, Peningkatan kelurahan tangguh bencana dengan persentase capaian 100%.

Sasaran Strategis 17

Sasaran 17 dengan 1 indikator kinerja, Persentase bencana yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100%.

Sasaran Strategis 18

Sasaran 18 dengan 1 indikator kinerja, Opini BPK atas laporan keuangan dengan persentase capaian 100%.

Sasaran Strategis 19

Sasaran 19 dengan 2 indikator kinerja, a. Nilai AKIP dengan persentase capaian 98,30%, dan b. Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) kota dengan persentase capaian 101,8%.

Sasaran Strategis 20

Sasaran 20 dengan 3 indikator kinerja, a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik dengan persentase capaian 104,45%, b. Indeks Kemudahan Perizinan Daerah dengan persentase capaian 101,4%, dan c. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan persentase capaian 110%.

Dari hasil pengukuran atas 20 sasaran strategis dengan 31 indikator kinerja, secara umum telah memenuhi target dengan capaian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 21 indikator kinerja mencapai target (67,74%).
2. Sebanyak 9 indikator kinerja belum mencapai target (29,03%).
3. Sebanyak 1 indikator kinerja belum dapat dihitung karena datanya belum tersedia (3,22%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kewenangan	2
1.3 Gambaran Umum Kota Padang	4
1.4 Aspek Strategis Organisasi	9
1.5 Isu Strategis Kota Padang Tahun 2023	12
1.6 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	21
1.7 Maksud, Tujuan dan Alur Pikir Penyusunan Laporan	22

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	25
---	----

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.A Capaian Kinerja Pemerintah Kota Padang.....	31
3.A.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.	33
3.A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir.....	41
3.A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	45

3.A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Standar Nasional (Jika Ada)	47
3.A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan Tahun 2023	49
3.A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	200
3.A.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	216
3.B Realisasi Anggaran	243

BAB IV PENUTUP

PENUTUP	248
---------------	-----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.A.5.1	Jumlah Sub Sektor Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2024	124
Grafik 3.A.5.2	Jumlah Pengunjung Youth Center Tahun 2024.....	132
Grafik 3.A.5.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Sumatera Barat Tahun 2024	134
Grafik 3.A.5.4	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Padang Tahun 2024	134
Grafik 3.A.5.5	Klasifikasi Status Kinerja LPPD	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas dan Pusat Kecamatan di Kota Padang Tahun 2024.....	5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023 dan 2024 dan laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Tahun 2023 dan 2024 Menurut Kecamatan.....	6
Tabel 2.1	Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	26
Tabel 3.1	Interval Nilai Evaluasi AKIP.....	32
Tabel 3.A.5.1	Status Puskesmas Kota Padang Tahun 2024	53
Tabel 3.A.5.2	Rumah Sakit PONEK di Kota Padang Tahun 2024.....	54
Tabel 3.A.5.3	Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	65
Tabel 3.A.5.4	Pemasangan PJU.....	67
Tabel 3.A.5.5	Kategori IKLH	79
Tabel 3.A.5.6	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kab/Kota Pada Tahun 2024	83
Tabel 3.A.5.7	Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani Tahun 2024	93
Tabel 3.A.5.8	Pilar-Pilar Sosial Tahun 2024	107
Tabel 3.A.5.9	Kenaikan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru	118
Tabel 3.A.5.10	Perkembangan Jumlah Wisman dan Winus Kota Padang Tahun 2020 - 2024.....	141
Tabel 3.A.5.11	Perkembangan Jumlah Wisman dan Winus Kota Padang Tahun 2020 - 2024.....	146
Tabel 3.A.5.12	Klasifikasi Status Kinerja LPPD	163
Tabel 3.A.6.1	Daftar Penempatan Anggota Satpol PP Kota Padang.....	205
Tabel 3.A.6.2	Jumlah Personil Berdasarkan Jabatan	207
Tabel 3.A.6.3	Jumlah Personil Berdasarkan Golongan	207
Tabel 3.A.6.4	Jumlah Personil ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	208
Tabel 3.A.6.5	Jumlah Personil Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	208

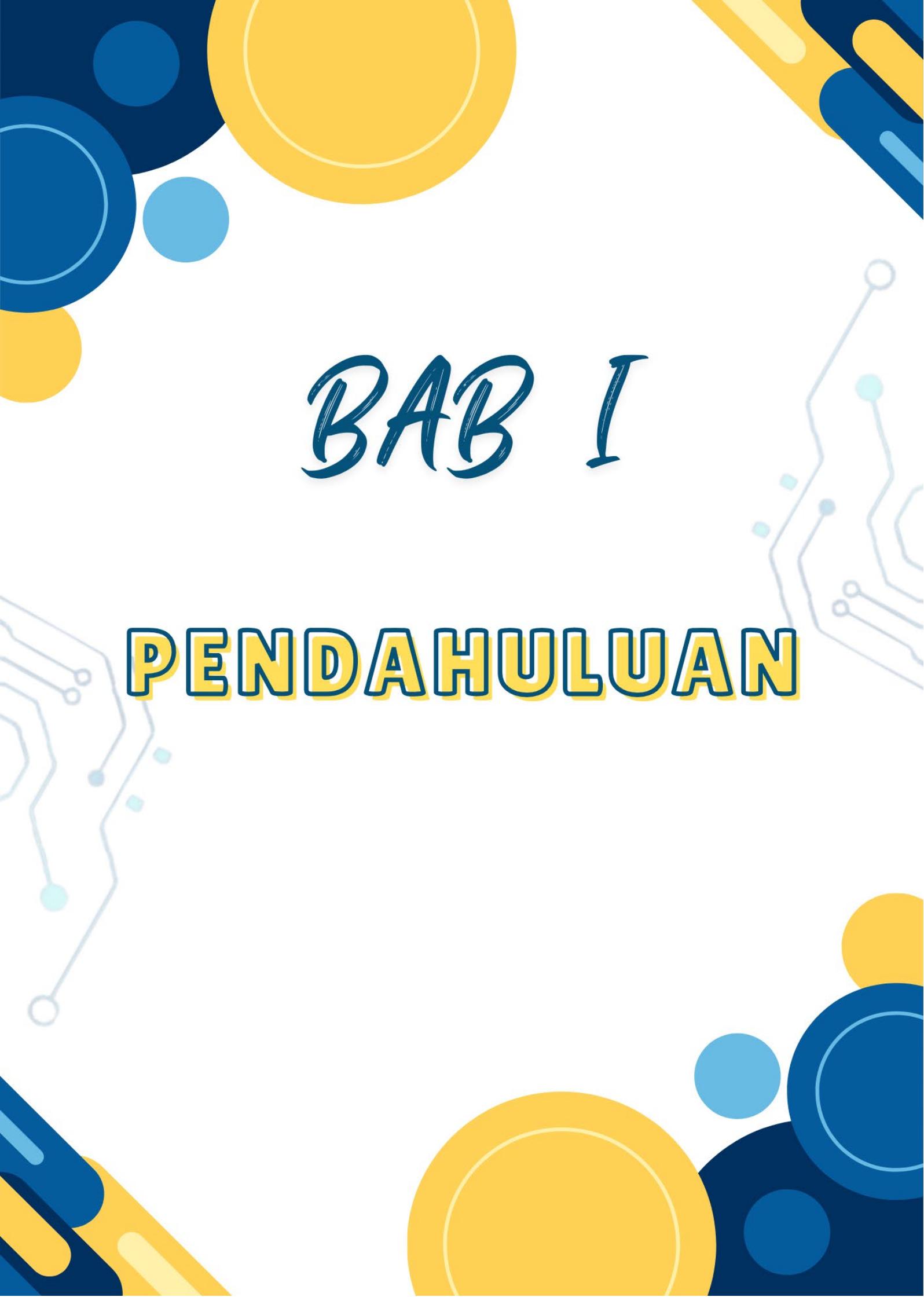
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kota Padang	5
Gambar 3.A.5.1	Pembangunan RKB/USB.....	50
Gambar 3.A.5.2	Program Pendidikan Kesetaraan.....	52
Gambar 3.A.5.3	Berita/laporan Pelayanan Kesehatan oleh Tim PSC 119 Kota Padang.....	56
Gambar 3.A.5.4	Pertemuan Penguatan PHBS bagi Kelompok Kerja Posyandu	57
Gambar 3.A.5.5	Sosialisasi Pengelolaan Kebugaran Anak Sekolah	57
Gambar 3.A.5.6	Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan anak.....	58
Gambar 3.A.5.7	Sosialisasi Pola Asuh Balita Bagi Kader.....	58
Gambar 3.A.5.8	Rapat Evaluasi Program PIS-PIK	58
Gambar 3.A.5.9	Aksi Bergizi Bersama Puskesmas Belimbing di SMP 27 Padang...	59
Gambar 3.A.5.10	Pertemuan Lintas Sektor dalam Rangka Pembentukan Satgas Tanpa Rokok Kota Padang.....	59
Gambar 3.A.5.11	Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Berkelanjutan Tahun 2024.....	60
Gambar 3.A.5.12	Pelaksanaan Pos Gizi Tahun 2024	60
Gambar 3.A.5.13	Penambahan Jaringan Pipa Transmisi Air Minum ke Rumah Masyarakat Penerima	71
Gambar 3.A.5.14	Hibah Air Limbah Setempat (HALS) dan Sanitasi di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung.....	71
Gambar 3.A.5.15	Monitoring Pekerjaan Air Minum Kawasan Permukiman	72
Gambar 3.A.5.16	Monitoring Pekerjaan Hibah Air Limbah Setempat	72
Gambar 3.A.5.17	Koordinasi dengan TNI dan Polri.....	73
Gambar 3.A.5.18	Partoli, Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Perda dan Perkada	74
Gambar 3.A.5.19	Pengaduan Melalui PCC 112	75
Gambar 3.A.5.20	Pendidikan Dasar Bagi Personil Satpol PP.....	75

Gambar 3.A.5.21	Sosialisasi Rencana Pembentukan Relawan Satlinmas	76
Gambar 3.A.5.22	Sosialisasi Bahaya Tawuran dan Kriminal	76
Gambar 3.A.5.23	Sidang Tipiring bagi pelanggar Perda dan Perkada	77
Gambar 3.A.5.24	Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyakit Menular Seksual.....	77
Gambar 3.A.5.25	Dokumentasi Kubus Apung di Sungai Banda Bakali dan Batang Arau	80
Gambar 3.A.5.26	Dokumentasi Pengambilan Sampel Air Sungai	82
Gambar 3.A.5.27	Dokumentasi Kegiatan pengawasan aktif Usaha/kegiatan.....	83
Gambar 3.A.5.28	Dokumentasi Kegiatan Tindak lanjut pengaduan Masyarakat....	84
Gambar 3.A.5.29	Dokumentasi Kegiatan koordinasi Penegakan Hukum	84
Gambar 3.A.5.30	Dokumentasi Kegiatan pemantauan Kualitas Udara Ambien	86
Gambar 3.A.5.31	Dokumentasi Kegiatan Sampling Gas Rumah Kaca.....	88
Gambar 3.A.5.32	Taman-taman yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup	90
Gambar 3.A.5.33	Rekapitulasi luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani di Kota Padang	92
Gambar 3.A.5.34	Pelatihan Tata Rias	102
Gambar 3.A.5.35	Pelatihan Security/Satpam.....	102
Gambar 3.A.5.36	Pelatihan Web Programmer.....	103
Gambar 3.A.5.37	Pelatihan K3	104
Gambar 3.A.5.38	Dukungan Anggaran Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang.....	105
Gambar 3.A.5.39	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	106
Gambar 3.A.5.40	Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat	108
Gambar 3.A.5.41	Pendampingan Pengawasan bersama BKPM RI ke PT. Abaisiat Raya.....	113
Gambar 3.A.5.42	Pendampingan Pengawasan bersama BKPM RI ke PT. Padang Raya Cakrawala	113
Gambar 3.A.5.43	Konsultasi LKPM	114
Gambar 3.A.5.44	Bimbingan Teknis dengan Pelaku Usaha.....	114
Gambar 3.A.5.45	Aplikasi Perizinan OSS	115
Gambar 3.A.5.46	Aplikasi Perizinan SIMBG.....	115

Gambar 3.A.5.47	Aplikasi SINOPEN.....	116
Gambar 3.A.5.48	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	116
Gambar 3.A.5.49	Sosialisasi Ekspor dan Produk Turunan Manggis	120
Gambar 3.A.5.50	Pengawasan dan Monitoring ke Pasar.....	121
Gambar 3.A.5.51	Media Sosial Dinas	121
Gambar 3.A.5.52	Pelatihan Kepada Pelaku Usaha Tentang Bagaimana Memulai Ekspor.....	122
Gambar 3.A.5.53	Kegiatan Peningkatan Kualitas dan kompetensi SDM pelaku Ekonomi Kreatif.....	127
Gambar 3.A.5.54	Silaturahmi antara Dinas Pariwisata Kota Padang dengan stakeholder pariwisata.....	136
Gambar 3.A.5.55	Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kota Padang tahun 2024	136
Gambar 3.A.5.56	Festival Muaro Padang.....	137
Gambar 3.A.5.57	Festival Siti Nurbaya Padang	137
Gambar 3.A.5.58	Pawai Telong-Telong.....	138
Gambar 3.A.5.59	Padang Trail Game Adventure	138
Gambar 3.A.5.60	Event Skatepark.....	139
Gambar 3.A.5.61	Event Tactical Challenge Airsoft.....	139
Gambar 3.A.5.62	Festival Event Akhir Tahun	140
Gambar 3.A.5.63	Kegiatan Pelatihan Simulasi dan Edukasi Bahaya Kebakaran	153
Gambar 3.A.5.64	Kegiatan Pengecekan Alat Proteksi Kebakaran Pada Pelayanan Publik dan Sekolah	153
Gambar 3.A.5.65	Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.....	154
Gambar 3.A.5.66	Kegiatan Investigasi Pasca Kebakaran	154
Gambar 3.A.5.67	Desk Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Perangkat Daerah	160
Gambar 3.A.5.68	Bimtek Implementasi SAKIP dengan Evaluator Kemenpan RB ..	161
Gambar 3.A.5.69	Aplikasi Simetris	161
Gambar 3.A.5.70	Evaluasi terhadap produk LPPD	163
Gambar 3.A.5.71	Kegiatan evaluasi LPPD Kota Padang tahun 2024	164
Gambar 3.A.5.72	Konsultai LKPM.....	186
Gambar 3.A.5.73	Bimbingan Teknis dengan Pelaku Usaha.....	186
Gambar 3.A.5.74	Aplikasi Perizinan OSS	187
Gambar 3.A.5.75	Aplikasi SINOPEN.....	188

Gambar 3.A.5.76	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	189
Gambar 3.A.5.77	Rapat Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) penilaian SPBE tahun 2024	191
Gambar 3.A.5.78	Aplikasi tauval.spbe.go.id.	192
Gambar 3.A.5.79	Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024	192
Gambar 3.A.6.1	Pengabdian Masyarakat Untuk Kebersihan Sungai dan Pantai	200
Gambar 3.A.6.2	Pelaksanaan Kegiatan Belajar Program Pendidikan Kesetaraan...	200
Gambar 3.A.6.3	Sosialisasi Pemanfaatan Pendidikan Kesetaraan	201
Gambar 3.A.6.4	Asesmen Peserta Didik.....	202
Gambar 3.A.6.5	Layanan Intervensi Terpadu.....	202
Gambar 3.A.6.6	Rumah Desaku Menanti.....	211
Gambar 3.A.6.7	Gedung LPKS Kasih Ibu.....	212
Gambar 3.A.6.8	Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Aset (Barang Milik Daerah).....	215
Gambar 3.A.7.9	Proses Penyaluran Bantuan Sosial Uang.....	223
Gambar 3.A.7.10	Bimbingan Tekhnis PSM.....	224
Gambar 3.A.7.11	Pembinaan Panti Sosial	224
Gambar 3.A.7.12	Penyaluran Bantuan Berusaha Untuk Lanjut Usia dan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas.....	225
Gambar 3.A.7.13	Pemberian Bantuan Permakanan Anak Terlantar Diluar Panti....	225
Gambar 3.A.7.14	Pelatihan Keterampilan Membuat Kue.....	226
Gambar 3.A.7.15	Pemulangan Lanjut Usia terlantar.....	227
Gambar 3.A.7.16	Pembinaan PSK di Panti Rehabilitasi Sosial Andam Dewi	227
Gambar 3.A.7.17	Pembinaan Anak Jalanan	228
Gambar 3.A.7.18	Pembinaan Terhadap Keluarga Penyandang Disabilitas.....	228
Gambar 3.A.7.19	Proses Verifikasi dan Validasi DTKS dan Pemutakhiran Data Jaminan Kesehatan	230
Gambar 3.A.7.20	Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan Peningkatan SDM Pendamping PKH	231
Gambar 3.A.7.21	Penyaluran Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin	231



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2006:3), akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi Pemerintahan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun.

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri. Laporan Kinerja ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan

jelas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), dan juga merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun.

Mempedomani RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 dan memperhatikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Tahun 2023 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Padang Tahun 2023. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Pemerintah Kota Padang. Analisis atas capaian sasaran terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan untuk peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

1.2 KEWENANGAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni: 1) urusan pemerintahan absolut; 3) urusan pemerintahan konkuren; dan 3) urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu: urusan pertahanan, keamanan, agama, yustisi, politik luar negeri, moneter dan fiskal. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang

dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terbagi menjadi pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan meliputi urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, transmigrasi. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

1.3 GAMBARAN UMUM KOTA PADANG

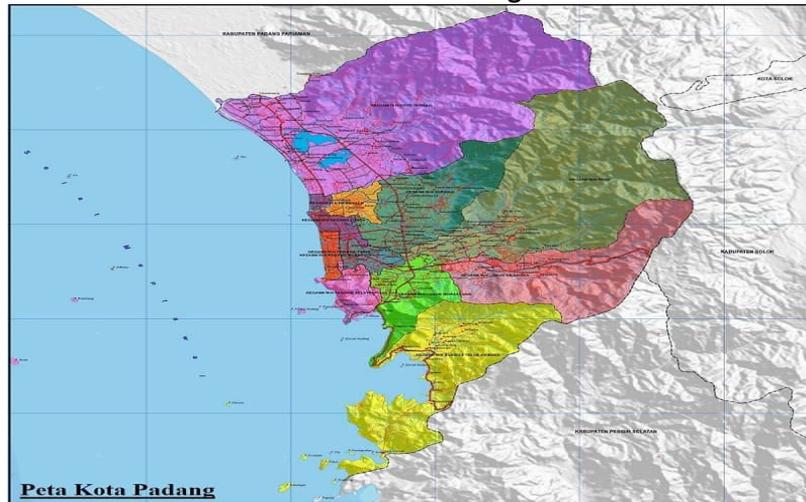
1.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai luas wilayah 694,96 km² daratan yang terletak di pesisir pantai Barat Pulau Sumatera pada posisi astronomis antara 100°05'05"BT dan 100°34'09"BT dan 00°44"00"LS - 01°08"35"LS. Berdasarkan letak, Kota Padang berbatasan dengan 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) samudera, yaitu :

- Sebelah Utara : berbatas dengan Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Solok
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- Sebelah Barat : berbatas dengan Samudera Hindia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1980 dan Perda Nomor 10 Tahun 2005 wilayah administrasi Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Dari seluruh kecamatan tersebut sebanyak 6 kecamatan dan 22 kelurahan berada di daerah pesisir. Kota Padang memiliki 19 pulau kecil yang tersebar pada beberapa kecamatan. Ada tiga pulau yang cukup besar, yaitu Pulau Bintangor seluas 56,78 Ha, Pulau Sikuai seluas 48,12 Ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, serta Pulau Toran seluas 33,67 Ha di Kecamatan Padang Selatan.

Gambar 1.1.
Peta Kota Padang



Wilayah Kota Padang merupakan perpaduan dari dataran tinggi, dataran rendah serta daerah aliran sungai. Sebagian besar wilayah kota ini merupakan hutan lindung (51,01%), kawasan terbangun seluas 62,88 km² (9,05%), dan lahan sawah seluas 52,25 km² (7,52%). Luas kecamatan di Kota Padang sangat bervariasi. Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan terbesar yang mencakup area seluas 232,25km² atau setara dengan 33,42% dari Kota Padang secara keseluruhan. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Pauh dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang mencapai area masing-masingnya seluas 146,29 km² dan 100,78 km². Sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Padang Barat dengan luas 7 km² atau sama dengan 1,01% dari luas Kota Padang secara keseluruhan. Luas dan pusat Kecamatan di Kota Padang tahun 2022 dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel 1.1
Luas dan Pusat Kecamatan di Kota Padang Tahun 2024

No	Kecamatan	Pusat Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)	Persentas Terhadap Luas Wilayah
1	Bungus Teluk Kabung	Pasar Laban	6	100,78	14,50
2	Lubuk Kilangan	Bandar Buat	7	85,99	12,37
3	Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	15	30,91	4,45
4	Padang Selatan	Mata Air	12	10,03	1,44
5	Padang Timur	Simpang Haru	10	8,15	1,17

No	Kecamatan	Pusat Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)	Persentas Terhadap Luas Wilayah
6	Padang Barat	Purus	10	7,00	1,01
7	Padang Utara	Lolong Belanti	7	8,08	1,16
8	Nanggalo	Surau Gadang	6	8,07	1,16
9	Kuranji	Pasar Ambacang	9	57,41	8,26
10	Pauh	Pasar Baru	9	146,29	21,05
11	Koto Tengah	Lubuk Buaya	13	232,25	33,42
Jumlah			104	694,96	100,00

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2024

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara -2 sampai 1.853 m di atas permukaan laut. Daerah tertinggi adalah wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan dan daerah terendah adalah wilayah Kecamatan Padang Barat. Ada 21 sungai besar dan kecil di Kota Padang. Lima sungai diantaranya merupakan sungai besar, dengan sungai terpanjang adalah sungai Batang Kandis yang panjangnya ± 20 Km.

1.3.2 Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Padang tahun 2023 mencapai 919.145 jiwa yang terdiri atas laki-laki 461.712 jiwa, perempuan 457.433 jiwa dengan *sex ratio* 100,94. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023 dan 2024 dan
Laju Pertumbuhan-Penduduk Kota Padang Tahun 2023 dan 2024 Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun (%)	
		2023	2024	2020-2023	2020-2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bungus Teluk Kabung	28.788	29.251	1,71	1,69
2.	Lubuk Kilangan	60.614	61.665	1,84	1,81
3.	Lubuk Begalung	128.453	130.410	1,63	1,60

4.	Padang Selatan	62.333	62.758	0,78	0,76
5.	Padang Timur	78.407	78.591	0,34	0,31
6.	Padang Barat	43.200	43.26	0,25	0,22
7.	Padang Utara	55.484	55.564	0,25	0,22
8.	Nanggalo	59.240	59.450	0,46	0,43
9.	Kuranji	153.137	155.485	1,64	1,61
10.	Pauh	63.489	63.886	0,73	0,70
11.	Koto Tengah	209.793	21.854	2,04	2,02
Padang		942.938	954.177	1,29	1,26

Sumber : Padang Dalam Angka Tahun 2024

1.3.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Kota Padang pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 (link google drive pada lampiran), dengan susunan sebagai berikut :



NOMENKLATUR DINAS

13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14. Dinas Kesehatan
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
17. Dinas Pemadam Kebakaran
18. Dinas Pertanahan
19. Satuan Polisi Pamong Praja
20. Dinas Sosial
21. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
1. Dinas Perikanan dan Pangan
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Dinas Pemuda dan Olahrag
9. Dinas Pariwisata
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11. Dinas Pertanian
12. Dinas Perdagangan

NOMENKLATUR BADAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Kecamatan Padang Utara
2. Kecamatan Padang Selatan
3. Kecamatan Padang Timur
4. Kecamatan Padang Barat
5. Kecamatan Padang Koto Tengah
6. Kecamatan Nanggalo
7. Kecamatan Kuranji
8. Kecamatan Pauh
9. Kecamatan Lubuk Kilangan
10. Kecamatan Lubuk Begalung
11. Kecamatan Bungus Teluk Kabung

NOMENKLATUR KECAMATAN

1.4 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi mencakup visi, misi dan tujuan organisasi sehingga diperoleh kejelasan tentang nilai-nilai organisasi. Pada RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 telah ditetapkan visi dan misi Kota Padang Tahun 2019 - 2024. Visi Kota Padang Tahun 2019-2024 yaitu :

“Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul serta Berdaya Saing”

Visi ini menunjukkan tujuan yang akan dicapai Kota Padang pada akhir tahun 2024. RPJMD Kota Padang memperlihatkan konsistensi keinginan untuk mewujudkan Visi RPJPD Kota Padang yakni masyarakat madani melalui pembangunan sektor perdagangan, pendidikan dan pariwisata yang unggul. Penjelasan visi RPJMD Kota Padang periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Madani

Masyarakat Madani diartikan sebagai masyarakat perkotaan yang beradab yang memiliki tatanan kehidupan yang beragama, demokratis dan menghargai kearifan lokal. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan, kearifan lokal dan peradaban. Masyarakat madani disebut juga *civil society* karena tata krama kehidupan mereka diatur oleh hukum dan undang-undang berdasarkan kesepakatan tentang kesetaraan untuk kemajuan yang membentuk budaya perkotaan (*urban culture*). Masyarakat madani memiliki kebebasan yang bertanggung jawab dalam mendiskusikan isu-isu dan permasalahan pembangunan untuk kepentingan bersama dan menyampaikan ke lembaga dan institusi yang relevan. Masyarakat madani selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter, berpengetahuan dan paham tentang adat, agama, etika dan

moral yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut dengan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

2. Pendidikan Unggul dan Berdaya saing

Pendidikan unggul dan berdaya saing adalah pendidikan yang berkualitas dan berkarakter yang menghasilkan siswa-siswa berprestasi dan berkarakter dari sekolah-sekolah di Kota Padang. Pengelolaan Institusi Pendidikan yang baik menjadikan Kota Padang sebagai tujuan utama pendidikan di Sumatera Barat dan regional Sumatera. Keunggulan dan daya saing institusi pendidikan tidak terlepas dari sumberdaya manusia yang kompeten dan sarana prasarana pendidikan yang cukup dalam mengelola proses pendidikan sehingga menghasilkan siswa yang unggul dan berdaya saing di Sumatera Barat dan Nasional.

3. Perdagangan Unggul dan Berdaya saing

Perdagangan unggul dan berdaya saing adalah perdagangan produk-produk unggul yang dihasilkan oleh industri besar dan UMKM dari usaha-usaha ekonomi kreatif di Kota Padang dan sekitarnya. Kota Padang mempunyai keunggulan sebagai pusat aktivitas perdagangan dan bisnis di wilayah Pantai Barat Sumatera yang didukung oleh sentra-sentra pasar modern, mall, supermarket, mini market, pergudangan, hotel dan restoran yang tersebar di Kota Padang. Posisi Kota Padang sebagai pusat perdagangan ekonomi kreatif yang unggul di Sumatera Barat dan regional, juga didukung oleh sarana dan prasarana transportasi seperti jalan *by pass* yang menghubungkan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dengan Pelabuhan Internasional Teluk Bayur, Kereta Api Bandara, dan Bus Trans Padang serta sarana dan prasarana lainnya.

4. Pariwisata Unggul dan Berdaya saing

Pariwisata unggul dan berdaya saing di Kota Padang adalah pariwisata yang berorientasi wisata halal (*halal tourism*). Wisata halal yang dimaksud berpedoman kepada sebelas standar pariwisata halal yang ditetapkan *Global Muslim Travel Index (GMTI)*. Keunggulan dan daya saing pariwisata Kota Padang juga ditunjukkan dengan konsep MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*). Kota Padang menjadi tujuan utama stakeholder yang mengadakan kegiatan-kegiatan pertemuan, seminar, workshop, pelatihan dan pameran baik yang bersifat akademis, pemerintahan maupun umum. Di samping itu

Pemerintah Kota Padang juga melaksanakan *event* wisata dalam skala internasional, nasional dan lokal bekerjasama dengan pemerintah pusat maupun pihak terkait lainnya. Pariwisata yang unggul dan berdaya saing akan menarik atau *backward linkage* dengan sektor primer pertanian (tanaman dan hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan), dan akan mendorong sektor atau *forward linkage* untuk tumbuhnya industri, perdagangan dan jasa melalui hubungan pemasaran yang luas. Pariwisata akan mempercepat integrasi pembangunan lintas sektor sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Padang dapat dipercepat.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kota Padang periode 2019-2024, telah disusun 7 Misi Pembangunan Kota Padang sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif
4. Mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif.
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan
6. Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana
7. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan dan sasaran ini mempunyai peranan penting sebagai rujukan utama dalam pembangunan daerah, dimana rumusan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi landasan perumusan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tujuan Kota Padang sesuai dengan tujuh misi pembangunan kota adalah sebagai berikut:

No.	Misi	No.	Tujuan
1.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing	1.	Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman kreatif, inovatif dan berdaya saing
2.	Mewujudkan Kota Padang yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal	2.	Terwujudnya Kota Padang yang layak huni
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang yang Inklusif	3.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
4.	Mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan dan Ekonomi Kreatif	4.	Menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat.
5.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pariwisata yang Nyaman dan Berkesan	5.	Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap perekonomian
6.	Menciptakan Masyarakat Sadar, Peduli dan Tangguh Bencana	6.	Terwujudnya Kota Padang yang tanggap dan tangguh bencana
7.	Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima	7.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

1.5 ISU STRATEGIS KOTA PADANG TAHUN 2024

Tidak sedikit masalah atau isu pembangunan yang diidentifikasi dalam proses pembangunan daerah di Kota Padang. Isu strategis merupakan kondisi atau isu yang perlu mendapatkan perhatian dan diprioritaskan untuk direncanakan pembangunannya. Masalah dan isu-isu strategis yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria berikut:

1. Memiliki cakupan luas dan berdampak signifikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat.
2. Isu yang mendasar dan penting serta berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah dan mengacu pada skala prioritas pembangunan nasional.

3. Merupakan pendorong pembangunan daerah Kota Padang secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
4. Merupakan tugas, tanggung jawab dan urusan Pemerintah Kota Padang yang dapat dikelola dan diharapkan bisa diselesaikan dengan baik pada Tahun 2023.
5. Merupakan prioritas visi dan misi Wali Kota yang harus diwujudkan.

Sehubungan kriteria di atas, isu-isu strategis mendesak atau menjadi prioritas serta berkaitan satu sama lain untuk dikelola dan diselesaikan di Kota Padang pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang kreatif - inovatif yang adaptif terhadap kondisi *new normal*.
2. Optimalisasi pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
3. Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah dalam rangka mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dan sumber daya daerah.
5. Pembangunan ekonomi inklusif berbasis pertumbuhan ekonomi berkualitas, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
6. Pelestarian lingkungan hidup, peduli bencana berbasis partisipasi masyarakat dan budaya daerah.
7. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

1.5.1 Isu Strategis Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu pilar pembangunan utama Kota Padang. Melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan diharapkan akan tercipta generasi-generasi yang berkualitas dan tangguh serta berdaya saing dan tetap memegang nilai-nilai moral yang sesuai dengan tuntunan adat dan agama. Hal ini sangat sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yakni meningkatkan SDM yang

berkualitas dan berdaya saing. Dalam prioritas Nasional tahun 2024 peningkatan daya saing SDM di bidang pendidikan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi dalam rangka menghadapi era industri 4.0.

Isu strategis tentang pendidikan berkaitan erat dengan pembangunan karakter bangsa. Untuk pembangunan karakter (*character building*) dimulai dari rumah tangga sampai ke jenjang pendidikan dan masyarakat. Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Padang sebagai Kota Pendidikan yang aman, tenang dan menyenangkan, serta didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Untuk itu program peningkatan sarana prasarana pendidikan dilanjutkan dengan pembangunan 500 Ruang Kelas Baru (RKB) dan pengadaan mebeleur untuk SD dan SMP. Target pembangunan ruang kelas baru ini dalam upaya melaksanakan proses belajar mengajar satu shift

Secara nasional masalah kematian ibu dan stunting masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas dalam pembangunan kesehatan. Terkait bidang kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan juga harus didukung oleh fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan pembiayaan kesehatan. Pemberian fasilitas kesehatan gratis di puskesmas maupun di RSUD bagi warga penduduk miskin Kota Padang terus diberikan. Pembangunan sarana prasarana kesehatan yaitu pembangunan RSUD akan dilanjutkan. Isu strategis tentang kesehatan juga berkaitan dengan derajat kesehatan masyarakat, jangkauan dan biaya pelayanan kesehatan akan menjadi harapan bagi masyarakat untuk mencapai Padang sehat. Kinerja bidang pendidikan dan kesehatan akan tercermin terhadap meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks IPM Kota Padang tahun 2018-2022 merupakan salah satu yang tertinggi di Indonesia dan yang paling tinggi di Provinsi Sumatera Barat.

1.5.2 Isu Strategis Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana dalam Pelayanan Masyarakat

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur Kota Padang merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Dengan demikian bisa terwujud Kota Padang yang layak huni (*livable*) yang mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga kota. Isu strategis penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana ini juga merupakan skala prioritas nasional yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Keberhasilan pembangunan juga diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan isu strategis ini adalah meningkatnya layanan transportasi perkotaan; menurunnya luas kawasan banjir dan genangan; meningkatnya ketentraman, ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Untuk meng*address* isu strategis ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2024 akan dilanjutkan program-program yang sudah dan sedang berjalan. Antara lain melanjutkan betonisasi jalan lingkungan, pengaspalan dan pelebaran jalan serta perbaikan drainase dan pengendalian banjir terpadu. Untuk peningkatan layanan transportasi massal yang mudah dan nyaman bagi masyarakat, akan dilanjutkan penataan angkutan umum dengan pembukaan koridor baru Trans Padang dengan memperhatikan aksesibilitas dan beragam kebutuhan kondisi masyarakat pengguna seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak dan ibu hamil. Selain itu akan terus dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar pergerakan orang dan barang. Program penyediaan tanah

untuk pembangunan lanjutan Terminal Anak Aia, dan pembangunan Sei Pisang (parkir, *foodcourt*, gazebo, dan *souvenir shop*) juga dilanjutkan.

Untuk penanggulangan kemiskinan dari aspek infrastruktur, akan dilanjutkan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Peningkatan sarana prasarana dalam pelayanan masyarakat dilakukan dengan merevitalisasi sarana prasarana olahraga tingkat RT/RW dan membuat taman kota per kecamatan serta mengembangkan pusat kreatif dan inovasi Pemuda (*Youth Centre*). Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan diharapkan menjadi salah satu dorongan untuk mengatasi permasalahan dan meningkatkan kualitas infrastruktur skala lingkungan/wilayah kelurahan.

1.5.3 Isu Strategis Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Perdagangan dan Jasa

Kota Padang memiliki beragam potensi unggulan sumber daya daerah yang dapat didorong untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu potensi utama tersebut adalah sektor ekonomi kreatif. Diharapkan sektor ekonomi kreatif ini memberikan dampak terhadap transformasi ekonomi ke depan yang akan berpengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Padang.

Untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kota Padang, khususnya untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas pelaku UMKM, kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk, serta legalitas dan izin usaha akan diimplementasikan beberapa program seperti pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, pembangunan inkubasi bisnis, pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, pengembangan sentra-sentra industri skala UMKM potensial dan pembangunan Pusat Kreatifitas Pemuda (*Youth Center*). Program-program ini juga sejalan dengan prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Tingkat pengangguran di Kota Padang sangat tinggi jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, mengingat Kota Padang merupakan Ibukota provinsi dan pusat pendidikan dan perdagangan Sumatera Barat. Untuk mengatasi pengangguran terbuka di Kota Padang diperlukan upaya kolaborasi seluruh

stakeholder dalam wadah *Skill Development Center* (SDC). Diharapkan nantinya pencari kerja yang ada di Kota Padang memiliki *skill* yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri serta menjadi *entrepreneur* baru (pelaku ekonomi kreatif). SKPD terkait (Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata dan DPMPTSP) diharapkan dapat memfasilitasi perizinan/legalitas UKM. Untuk mempercepat pertumbuhan UKM/wirausaha, SKPD terkait juga perlu memfasilitasi kegiatan inkubasi UKM melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Inkubator. Selain itu, PD di lingkungan Pemko Padang dapat memprioritaskan penggunaan produk UKM dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Pertumbuhan tertinggi ekonomi Kota Padang juga disumbang oleh sektor-sektor dalam kelompok jasa antara lain informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga dapat diarahkan pada beragam kegiatan jasa tersebut. Upaya penting lain yang harus dilakukan adalah peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya peran investasi swasta, pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan secara maksimal. Untuk itu, peningkatan kemudahan melakukan usaha diukur menggunakan Indeks Kemudahan Berusaha juga harus menjadi fokus kebijakan dalam pengembangan ekonomi daerah.

1.5.4 Isu Strategis Optimalisasi Potensi Wisata

Optimalisasi potensi wisata juga merupakan potensi utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan pariwisata yang unggul dan berdaya saing, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan melalui strategi mendorong perkembangan pariwisata halal dengan memperkuat kelembagaan dan mendorong pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata halal berbasis potensi, sumberdaya dan kearifan lokal. Pariwisata halal harus didorong menjadi suatu industri yang mampu mendorong atau membangun ekonomi daerah dan bukan hanya sekedar aktivitas rekreasi atau liburan. Terkait isu ini, akan dilanjutkan pengembangan Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang, pulau-pulau kecil dan wilayah Timur Kota Padang.

Pengembangan destinasi wisata tersebut diharapkan dapat menyentuh konsep pariwisata halal, serta melengkapi fasilitas dan amenities yang dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh semua pengunjung dengan beragam kondisi termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak.

1.5.5 Isu Strategis Sosial Budaya dan Pembangunan Inklusif

Isu strategis sosial budaya Kota Padang tidak lepas dari masalah kemiskinan, pengangguran, pencegahan HIV AIDS, peredaran narkoba, perbuatan asusila, perjudian, mabuk, konflik sosial, aksi teror/begal, anak jalanan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, isu gender, dan penguatan iman dan takwa (IMTAK) dalam masyarakat sehingga dapat memberikan arah dan bimbingan terhadap pelaksanaan proses pembangunan. Isu ini juga menjadi prioritas nasional yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Aspek ini perlu diberikan tekanan dan perhatian yang lebih, guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan Kota Padang menuju Kota Madani dalam rangka mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya. Untuk itu, perlu dilanjutkan program pembinaan mental keagamaan, penyelenggaraan pesantren Ramadhan, kegiatan keagamaan, seni budaya dan olahraga rekreasi yang berkualitas. Program peningkatan perlindungan khusus anak juga dilakukan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Selain itu, perlu dibangun kelompok masyarakat peduli dalam memacu pembangunan berdasarkan konsep partisipasi dan pemberdayaan sosial. Sebuah kota dikatakan layak huni tidak hanya dari sarana prasarana yang memadai tetapi juga diiringi oleh partisipasi warga yang baik. Persoalan perkotaan sangat kompleks karena pertumbuhan penduduk akan lebih cepat dibandingkan ketersediaan sarana prasarana. Untuk itu dalam membangun kota harus melibatkan partisipasi masyarakatnya dengan memberdayakan komunitas lokal yang ada seperti kelompok pemuda dan kelompok masyarakat minoritas. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang melibatkan semua masyarakat yang berbeda latar belakang, karakteristik status sosial, kondisi, kemampuan, etnik, budaya dan lainnya. Konsep

pembangunan inklusif lahir dari komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan warga sehingga dalam prosesnya terjadi penyebaran manfaat yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang lebih luas. Sasaran yang ingin dicapai ini adalah meningkatnya kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan penduduk. Hal inilah yang akan diwujudkan dalam pembangunan daerah Kota Padang. Untuk itu, keadilan dalam pembangunan akan terus diupayakan dalam pembangunan kota, dengan memperhatikan kelompok berkebutuhan khusus seperti masyarakat penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok lainnya. Hal ini sejalan dengan piagam Kota Inklusif yang sudah dideklarasikan dan ditandatangani dimana Kota Padang adalah salah satu dari Jaringan Walikota Indonesia menuju Kota Inklusif yang digagas UNESCO dan APEKSI.

1.5.6 Isu Strategis Pelestarian Lingkungan dan Tangguh Bencana

Isu strategis pelestarian lingkungan dan tangguh bencana sejalan dengan prioritas nasional yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pelestarian lingkungan adalah upaya melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia sebagai penghuni lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Namun disayangkan seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan dimana pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai dimasa yang akan datang atau bersifat *sustainable*. Untuk itu, program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan akan terus dilakukan.

Isu strategis Padang tangguh bencana lebih diarahkan kepada mitigasi bencana dengan meningkatkan partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, menyediakan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Juga sangat diperlukan penyebaran informasi tentang upaya Padang melakukan mitigasi bencana, sehingga calon investor tidak ragu berinvestasi ke Padang. Upaya lain yang penting dilakukan adalah penyelenggaraan pemulihan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan serta normalisasi kehidupan korban bencana. Untuk itu beberapa program untuk Padang tangguh bencana akan dilakukan antara lain program pencegahan dan kesiapsiagaan dengan meningkatkan kegiatan Sarana dan Prasarana Evakuasi (SPM), penanggulangan bencana kebakaran dan kedaruratan lainnya serta peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana.

1.5.7 Isu Strategis Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Isu ini juga merupakan prioritas nasional terutama dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik. Birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mindset* dan *culture-set* serta pengembangan dan budaya kerja yaitu core values ASN *Berakhlak*. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal, efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi. Jika berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut,

setidaknya sudah menuju ke arah upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Jadi keberhasilan reformasi birokrasi akan mewujudkan pada tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga upaya pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten.

Isu dan tantangan pengelolaan tata pemerintahan di Kota Padang, juga berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Peningkatan alokasi sumber dana di kelurahan diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di kelurahan baik terkait sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain keterbatasan jumlah dan kualitas ASN di kelurahan menjadi salah tantangan dalam mengelola dana tersebut secara efektif, transparansi dan akuntabel.

Untuk meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi, budaya kerja aparatur dan pelayanan publik, beberapa program yang akan dilanjutkan dan dilakukan pada tahun 2024 adalah pembangunan kantor-kantor pemerintahan seperti gedung DPRD Kota Padang, Kantor Camat dan Lurah, dan pembangunan Tower Gedung Pemerintahan.

1.6 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Padang Tahun 2024 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.

1.7 MAKSUD, TUJUAN, DAN ALUR PIKIR PENYUSUNAN LAPORAN

1.7.1 Maksud Penyusunan Laporan Kinerja

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang telah diberikan masyarakat diperlukan adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur. Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan hasil tingkat kinerja yang dicapainya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pemerintah mengkomunikasikan capaian kinerja organisasinya dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sarannya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Tahun 2024 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Tahun Anggaran 2024, yang

ditujukan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Menteri Dalam Negeri, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

1.7.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan penyusunan laporan kinerja secara umum adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, sebagai umpan balik peningkatan kinerja pemerintah Kota Padang, meningkatkan perencanaan di semua sektor pemerintahan, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, dan mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.7.3 Alur Pikir Penyusunan Laporan Kinerja

Alur pikir penyusunan laporan kinerja dimulai dengan menjelaskan RPJMD yang terdiri atas visi, misi dan tujuan serta sasaran, yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program. Dari RPJMD dibuat Dokumen Perencanaan (RKPD) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara pencapaian sasaran yang diukur melalui indikator kinerja sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Sistematika penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas informasi umum pemerintah Kota Padang dan menjabarkan aspek strategis organisasi, isu strategis yang sedang dihadapi organisasi serta maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024.

- Bab II** **Perencanaan Kinerja Tahun 2024**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Padang untuk periode 2019-2024.
- Bab III** **Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024**, menjelaskan analisis capaian kinerja Pemerintah Kota Padang dikaitkan dengan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Tahun 2024 serta realisasi anggaran Tahun 2024.
- Bab IV** **Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Padang dengan menyusun dan menetapkannya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen/janji (kontrak) kinerja yang akan diwujudkan oleh Kepala Daerah sebagai penerima amanah, yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu. Ruang lingkup Perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah, yang diutamakan terhadap program utama yang menggambarkan keberadaan pemerintah daerah serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Melalui perjanjian kinerja ini pemerintah daerah akan dapat memantau dan mengendalikan pencapaian kinerjanya, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja, dan menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintah.

Perjanjian kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil berupa peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan yang diharapkan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
5. Dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024, Pemerintah Kota Padang telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Pemerintah Kota Padang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Rata-rata Lama Sekolah p	11,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Harapan Lama Sekolah	16,56	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,20	Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	2,50	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,30	DP3AP2KB
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran perKapita (Rp. Juta)	15.302	Bappeda
5.	Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perhubungan	84,70	Dinas Perhubungan
6.	Meningkatnya Pemukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman yang Layak	81,16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan didalam Masyarakat	Angka Kriminalitas	1.875	Satpol PP
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sanitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,50	Dinas Lingkungan Hidup
		Luas Kawasan Kumuh Yang Ditangani	122,33	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran	10,16	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Terbuka		
10.	Meningkatnya Tingkat Perekonomian Penduduk	Tingkat Kemiskinan	4,10	Dinas Sosial, Bappeda
		PDRB Per-Kapita ADHB (Rp ribu)	82.040	Bappeda
11.	Meningkatnya Investasi	Peningkatan nilai PMA (US \$)	17.123.288	DPMPTSP
		Peningkatan nilai PMDN (Rp juta)	650.000	DPMPTSP
12.	Menjadikan Sektor Perdagangan sebagai Penggerak Utama Perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	17,85	Dinas Perdagangan
13.	Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (e-kraf)	10,50	Dinas Pariwisata
14.	Mewujudkan Kota Padang menjadi Tujuan Pariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	32,50	Dinas Pariwisata
15.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Destinasi	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	29.950	Dinas Pariwisata
		Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	3.650.000	Dinas Pariwisata
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	1,94	Dinas Pariwisata
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Domestik	2,50	Dinas Pariwisata
16.	Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana	4,81	BPBD
17.	Berkurangnya Dampak Kebakaran dan	Persentase Bencana yang Ditangani	100	Dinas Pemadam Kebakaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyelamatan Kedaruratan Lainnya			
18.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	BPKAD, Inspektorat
19.	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	Predikat A	Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	3,20	Bagian Tata Pemerintahan
20.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	85,00	Bagian Organisasi
		Indeks Kemudahan Perizinan Daerah	83,50	DPMPSTP
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,60	Dinas Kominfo

NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
1.	Pengelolaan Pendidikan	Rp. 243.626.486.400	Dinas Pendidikan
2.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Rp. 67.065.617.000	Dinas Kesehatan
3.	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 319.175.900	DP3AP2KB
4.	Pengelolaan System Data Gender dan Anak	Rp. 27.450.000	DP3AP2KB
5.	Perlindungan Perempuan	Rp. 181.562.000	DP3AP2KB
6.	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 896.988.300	DP3AP2KB
7.	Pemenuhan Hak Anak	Rp. 370.445.000	DP3AP2KB
8.	Perlindungan Khusus Anak	Rp. 397.012.000	DP3AP2KB

NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
9.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 57.455.359.050	Dinas Perhubungan
10.	Pengembangan Perumahan	Rp. 3.506.968.760	DPRKP
11.	Kawasan Permukiman	Rp. 15.722.013.284	DPRKP
12.	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp. 3.178.016.000	DPRKP
13.	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp. 43.044.944.750	DPRKP
14.	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 19.407.500.300	Satpol PP
15.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Rp. 589.784.720	DLH
16.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp. 3.243.970.300	DLH
17.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 91.211.000	DLH
18.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 79.553.000	DLH
19.	Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 578.621.000	Disnakerin
20.	Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 290.068.000	Disnakerin
21.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 8.273.409.200	Dinas Sosial
22.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.258.622.875	Dinas Sosial
23.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 1.113.367.800	Dinas Sosial
24.	Penanggulangan Bencana	Rp. 5.056.035.924	BPBD
25.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 313.000.000	DPMPTSP
26.	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 321.750.000	DPMPTSP
27.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 100.000.000	DPMPTSP
28.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 4.940.840.176	Dinas Perdagangan
29.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 29.500.000	Dinas Perdagangan
30.	Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan	Rp. 221.677.933	Dinas Perdagangan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	OPD
	Barang Penting		
31.	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 198.951.040	Dinas Perdagangan
32.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 3.762.478.516	Dinas Perdagangan
33.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 9.259.282.422	Dinas Pariwisata
34.	Pemasaran Pariwisata	Rp. 5.776.288.900	Dinas Pariwisata
35.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 3.309.107.200	Dinas Pariwisata
36.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 8.260.396.500	Dinas Damkar
37.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 20.144.130.117	BPKAD
38.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 15.704.663.854	BPKAD
39.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 627.131.200	Inspektorat
40.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 172.308.100	Inspektorat
41.	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 1.351.218.500	Bappeda
42.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 741.956.900	Bappeda
43.	Penelitian dan Pembangunan Daerah	Rp. 741.956.900	Bappeda
44.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 192.270.400	Bagian Organisasi
45.	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 34.773.000	Bagian Tata Pemerintahan
46.	Aplikasi Informatika	Rp. 6.260.607.000	Diskominfo
47.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 78.310.000	Diskominfo

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 lengkap semua kepala perangkat daerah sebagaimana terlampir.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.A CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PADANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan dari pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dibuat untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang bersih sehingga *good governance* dapat diwujudkan. Akuntabilitas kinerja sendiri merupakan suatu kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk mengetahui pencapaian realisasi setiap indikator kinerja kegiatan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam mencapai visi, misi agar dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang. Dalam konteks pengukuran ini, dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* baik untuk rencana maupun realisasi sehingga dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi tersebut. Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (*outcome*) pada sasaran digunakan pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interval Nilai Evaluasi AKIP

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
≥ 100	Sangat memuaskan
$85 \leq 100$	Sangat baik
$70 \leq 85$	Baik
$55 \leq 70$	Cukup
≤ 55	Kurang Baik

Pemerintah Kota Padang menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor Kota Padang 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat dalam RPJM Kota Padang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kinerja Walikota Padang, yang menjadi ukuran dalam proses penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah Kota Padang. Dalam laporan kinerja instansi Pemerintah Kota Padang dipaparkan 20 sasaran kinerja dan 31 indikator kinerja yang mendukung dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Padang di tahun 2024. Sasaran dan indikator kinerja ini penting mengingat keduanya merupakan dasar untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran dan indikator kinerja ini sekaligus sebagai alat untuk mencapai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang telah disusun sebelumnya. Sasaran kinerja maupun indikator kinerja dapat menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap perjanjian kinerja dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

3.A.1 PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,64	11,63	99,91
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	16,56	16,57	100,06
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	74,95	75,20	100,33
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	2,55	2,53	100,78
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	94,30	*93,84	*99,51
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran perKapita (Rp juta)	15.302	15.458	101,02
5.	Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perhubungan (nilai)	84,70	86,36	101,96
6.	Meningkatnya Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman yang Layak (persen)	81,16	78,03	96,14
7.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan didalam Masyarakat	Angka Kriminalitas (angka)	1.875	1.969	105,01

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sanitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	72,50	77,26	106,56
		Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani (Ha)	122,33	122,33	100
9.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,16	9,88	97,24
10.	Meningkatnya Tingkat Perekonomian Penduduk	Tingkat Kemiskinan (%)	4,10	4,06	100,1
		PDRB Per-Kapita (ADHB) (Rp ribu)	82.040	84.220	107,53
11.	Meningkatnya Investasi	Peningkatan nilai PMA (US \$)	17.123.288	15.007.995	87,65
		Peningkatan nilai PMDN (Rp Juta)	650.000	3.425.496,8	527
12.	Menjadikan Sektor Perdagangan sebagai Penggerak Utama Perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	17,85	17,52	98,15
13.	Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (e-kraf) (persen)	10,50	11,81	112,47
14.	Mewujudkan Kota Padang Menjadi Tujuan Pariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat (%)	32,50	29,38	90,41

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Destinasi	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	29.950	191.632	639,83
		Jumlah Kunjungan Wisata Domestik (orang)	3.650.000	5.455.685	149,96
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (hari)	1,94	1,93	99,48
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Domestik (hari)	2,50	2,80	112
16.	Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana (angka)	5	5	100
17.	Berkurangnya Dampak Kebakaran dan Penyelamatan Kedaruratan Lainnya	Persentase Bencana yang Ditangani	100	100	100
18.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP	A	BB	98,33
		Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	3,2	3,26	101,8
20.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik (nilai)	85,00	88,79	104,45
		Indeks Kemudahan Perizinan Daerah (nilai)	83,50	84,67	101,4
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,60	3,96	110

Catatan: *Data realisasi belum tersedia

Untuk capaian kinerja rata-rata lama sekolah di Kota Padang dari target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 11,64 dengan capaian sebesar 11, 63 atau sebesar 99,91%. Tidak tercapainya target rata-rata lama sekolah tersebut disebabkan karena berbagai faktor antara lain faktor ekonomi dan aksesibilitas ke satuan Pendidikan. Untuk angka harapan lama sekolah di Kota Padang target yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah 16,56 dengan capaian 16,57 atau 100,06%.

Untuk capaian kinerja pada sasaran 3 data capaian kinerja belum tersedia, data yang dipakai masih data tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Untuk capaian kinerja pengeluaran per kapita di Kota Padang pada tahun 2024 sebesar 15.458 juta rupiah per tahun dengan capaian 101,02% atau melebihi dari target pada tahun 2024 yaitu

15.302. Untuk capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan pada tahun 2024 adalah 86,36 atau 101,96 atau melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 84,70.

Untuk capaian kinerja persentase perumahan dan permukiman yang layak pada tahun 2024 dari target 78,03 capaiannya adalah 78,08 atau 100%. Untuk capaian kinerja angka kriminalitas dari target 1875 capaiannya adalah 1969. Data ini didapat dari Polresta Kota Padang.

Untuk indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup dari target pada tahun 2024 72,50 capaiannya adalah 77,26 atau 106,56% dengan kategori baik yaitu besar dari 74 sampai dengan 82. Untuk indikator kinerja luas Kawasan kumuh yang ditangani pada tahun 2024 targetnya adalah 122,33 ha dengan realiasi capaian 122,33 ha atau 100%. Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Padang menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 10,16% namun baru tercapai sebesar 9,88% dengan capaian sebesar 97,24%.

Untuk indikator kinerja tingkat kemiskinan pada tahun 2024 targetnya 4,1% dengan realisasi 4,06% dengan capaian 100,1%. Untuk indikator kinerja PDRB per kapita target 82.040 capaiannya 88.220 atau 107,53%. Untuk capaian peningkatan nilai PMA targetnya 17.123.288 capaiannya adalah 87,65% atau 15.007.995. Sedangkan untuk capaian indikator Jumlah nilai PMDN adalah 3.425.496, 55 atau 527%. Hal ini jauh lebih dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu 650.000.

Capaian kinerja kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB adalah 17,52 atau 98,15% dari target pada tahun 2024 yaitu 17, 85. Untuk capaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi usaha ekonomi kreatif (ekraf), dari target pada tahun 2024 sebesar 10,50 capaiannya adalah 11,81 atau 112,47%. Untuk capaian indikator kinerja kontribusi sector pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dari target pada tahun 2024 sebesar 32,50% capaian kerjanya 29,38% atau 90,41%.

Untuk capaian kinerja sasaran pariwisata terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian 3 (tiga) indikator melebihi dari target yang telah ditetapkan, dan 1 (satu) kurang dari target yang telah ditetapkan. Rata-rata lama tinggal wisman 1.93 hari berada pada tahun 2023 dan 2024, sedangkan rata-rata lama tinggal wisnus tertinggi berada pada tahun 2024 dengan lama tinggal 2.80 hari. Sedangkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisman dan wisnus terendah pada tahun 2021 dengan angka 1.538 wisman dan lama tinggal 1.13 hr dan untuk wisnus 1.000.732 orang dan lama tinggal 1.50 hr. sesuai table diatas persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara tahun 2024 sebesar 47.33%.

Untuk capaian indikator kinerja persentase peningkatan kelurahan Tangguh bencana dari target 4,81% realisasinya adalah 5% yaitu Kelurahan Lolong Belanti, Kelurahan Purus, Kelurahan Teluk Bayur, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, dan Kelurahan Batang Kabung Ganting. Untuk capaian indikator kinerja persentase bencana yang ditangani realisasinya 100%.

Untuk pencapaian Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan pada sasaran strategis “Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”, target WTP terhadap Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2024 dapat dicapai. Pemerintah Kota Padang telah berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 (sepuluh) kali dan 7 (tujuh) tahun berturut turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2014.

Untuk capaian indikator kinerja nilai SAKIP Pemerintah Kota Padang tingkat akuntabilitas kinerjanya BB dengan nilai 78,68 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2023 yaitu 0,43 poin. Pemerintah Kota Padang belum mencapai target kinerjanya pada tahun 2024 yaitu A. Untuk capaian indikator kinerja nilai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), dari target 3,20 capaiannya adalah 3,26 atau 101,8%. Data target Nilai LPPD Tingkat Nasional yang disajikan merupakan target yang ditetapkan untuk hasil penilaian yang akan keluar pada tahun 2024 yaitu hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2022. Data

realisasi yang tertera merupakan capaian kinerja dari hasil penilaian LPPD tahun 2022 yang nilainya dikeluarkan atau diumumkan pada tahun 2024.

Untuk capaian indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik, dari target 85,00 realisasinya adalah 88,79 atau 101,4%. Pada pelaksanaan kegiatan pengukuran IKM pada tahun 2024 didapatkan nilai akhir 88,79 dari 30 OPD/UKPP yang dinilai. Hasil ini, mengalami peningkatan sebesar 3,99 dibandingkan dengan pengukuran tahun 2023 dengan nilai 84,80 dan hasil ini tetap melebihi target yang telah ditetapkan pada PK Kota Padang sebesar 85. IKM Kota Padang pada tahun 2024 sebesar 88,79 atau masuk dalam kategori A. Dari 30 OPD yang disurvei, 13 OPD mendapatkan nilai A dan 18 OPD mendapatkan nilai B. Adapun skor masing-masing untuk 30 OPD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Puskesmas Lubuk Begalung dengan skor IKM sebesar 98,32 dengan nilai A
2. Kecamatan Lubuk Kilangan dengan skor IKM sebesar 96,13 dengan nilai A
3. Puskesmas Seberang Padang dengan skor IKM 95,44 dengan nilai A
4. Kecamatan Nanggalo dengan skor IKM sebesar 94,85 dengan nilai A
5. Kecamatan Padang Timur dengan skor IKM sebesar 93,35 dengan nilai A
6. Dinas Sosial dengan skor IKM sebesar 93,18 dengan nilai A
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan skor IKM sebesar 93,11 dengan nilai A
8. DPMPTSP dengan skor IKM sebesar 92,75 dengan nilai A
9. Kecamatan Lubuk Begalung dengan skor IKM sebesar 91,62 dengan nilai A
10. Puskesmas Ikur Koto dengan skor IKM sebesar 91,41 dengan nilai A
11. Dinas Kesehatan dengan skor IKM sebesar 89,27 dengan nilai A
12. Kecamatan Padang Selatan dengan skor IKM sebesar 89,09 dengan nilai A
13. Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan skor IKM sebesar 88,25 dengan nilai B
14. RSUD Rasidin dengan skor IKM sebesar 88,16 dengan nilai B
15. Kecamatan Padang Utara dengan skor IKM sebesar 88,12 dengan nilai B
16. Badan Pendapatan Daerah dengan skor IKM sebesar 87,61 dengan nilai B
17. Kecamatan Koto Tengah dengan skor IKM sebesar 86,87 dengan nilai B

18. Dinas Perhubungan dengan skor IKM sebesar 86,36 dengan nilai B
19. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dengan skor IKM sebesar 86,33 dengan nilai B
20. Kecamatan Padang Barat dengan skor IKM sebesar 86,31 dengan nilai B
21. Kecamatan Pauh dengan skor IKM sebesar 86,12 dengan nilai B
22. Puskesmas Ulak Karang dengan skor IKM sebesar 86,09 dengan nilai B
23. Kecamatan Kuranji dengan skor IKM sebesar 86,03 dengan nilai B
24. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan skor IKM sebesar 86,02 dengan nilai B
25. Dinas Perdagangan dengan skor IKM sebesar 85,50 dengan nilai B
26. Puskesmas Nanggalo dengan skor IKM sebesar 84,87 dengan nilai B
27. Puskesmas Padang Pasir dengan skor IKM sebesar 84,20 dengan nilai B
28. Puskesmas Andalas dengan skor IKM sebesar 83,42 dengan nilai B
29. Puskesmas Pauh dengan skor IKM sebesar 83,41 dengan nilai B
30. Dinas Pariwisata dengan skor IKM sebesar 81,65 dengan nilai B

Untuk capaian indikator kinerja indeks kemudahan perizinan daerah dari target 83,50 capaiannya adalah 84,67 atau 101,4%. Indeks kemudahan perizinan daerah dilakukan secara penilaian mandiri oleh DPMPTSP Kota Padang. Untuk capaian indikator kinerja indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), capaiannya adalah 3,96 dari target 3.60.

3.A.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Realisasi	% Capaian Kinerja								
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11.58	101.10	11.59	101.60	11.60	98.97	11.62	100,08	11.63	99,91
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	16.52	98.92	16.53	99.88	16.54	97,69	16.56	100,06	16,57	100,06
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	73,65	100,38	73,69	100,40	73,93	100,44	74,94	101,37	75,20	100,33
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	6,7	-	7,1	121,11	4,7	137,33	2,65	162,14	2,53	100,78
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	-	-	93,64	99,86	93,81	100,04	93,81	100,04	*93,84	*99,51
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran perKapita (Rp Juta)	14.481	-	14,540	98,24	14.889	101,09	15,089	98,44	15,458	101,02
5.	Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perhubungan (nilai)	-	-	77,24	-	-	-	78,60	-	86,36	101,96
6.	Meningkatnya Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman yang Layak (persen)	-	-	-	-	76,58	100	77,82	100,03	78,03	96,14
7.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan	Angka Kriminalitas (angka)	2.931	-	1.104	-	1.291	-	1.968	-	1.969	105,01

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Realisasi	% Capaian Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Keamanan di dalam Masyarakat											
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sanitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (nilai)	71,53	-	70,07	-	70,82	-	72,28	-	77,26	106,56
		Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani (Ha)	-	-	-	-	63,95	100	84,62	100,8	122,33	100
9.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	13,64	91,64	13,64	80,72	11,69	113,77	10,86	-	9,88	97,24
10.	Meningkatnya Tingkat Perekonomian Penduduk	Tingkat Kemiskinan (%)	4,40	105,68	4,94	93,12	4,26	101,64	4,17	101,64	4,06	100.1
		PDRB Per-Kapita (ADHB) (Rp ribu)	64.660	95,79	71.360	109,78	78.360	88,53	84.530	105,36	88.530	107,53
11.	Meningkatnya Investasi	Peningkatan Nilai PMA (US \$)	39.142.920	166,7	38.991.665	227,7	57.967.400	338,5	55.539.311,1	324,3	15.007.995	87,65
		Peningkatan Nilai PMDN (Rp juta)	368.146,9	42,81	886.626,6	118,2	462.089,2	61,61	609.329	81,24	3.425.496,8	527
12.	Menjadikan Sektor Perdagangan sebagai Penggerak Utama Perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (persen)	-	-	16,50	97,63	17,42	100,99	17,40	98,08	17,52	98,15
13.	Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (e-kraf) (persen)	-	-	8	-	9	-	10,43	-	11,81	112,47

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Realisasi	% Capaian Kinerja								
14.	Mewujudkan Kota Padang Menjadi Tujuan Pariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat (%)	33	-	20,37	-	27,65	-	36,80	-	29,38	90,41
15.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Destinasi	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara (orang)	21.600	-	1.538	-	22.995	-	455.698	-	191.632	639,83
		Jumlah Kunjungan Wisata Domestik (orang)	2.562.966	-	1.000.732	-	2.832.140	-	3.702.838	-	5.455.685	149,96
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (hari)	1.13	-	1.22	-	1.90	-	1.93	-	1.93	99,48
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Domestik (hari)	1.50	-	1.62	-	2.10	-	2.15	-	2.80	112
16.	Meningkatnya Ketangguhan Kawasan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana (angka)	-	-	1	-	16	-	5	-	5	100
17.	Berkurangnya Dampak Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Bencana yang Ditangani	-	-	-	-	-	-	98,5	98,5	100	100

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			Realisasi	% Capaian Kinerja								
	Kedaruratan Lainnya											
18.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	100								
19.	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP (predikat)	BB	100	BB	100	BB	100	BB	97,80	BB	98,30
		Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kota (nilai)	3,316	105,27	-	-	-	-	2,99	-	3,26	101,8
20.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik (nilai)	79,83	101,31	82,66	103,55	82,66	103,32	82,53	103,03	88,79	104,45
		Indeks Kemudahan Perizinan Daerah (nilai)	-	-	-	-	80,17	106,9	83,33	102,87	84,67	101,4
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (nilai)	2,96	106,47	2,47	88,84	3,01	108,27	3,54	118,21	3,96	110

Catatan: *Data realisasi belum tersedia

3.A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET RPJMD	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Rata-rata lama sekolah	11,63	11,7	96,84
		Harapan lama sekolah	16,57	17,35	95,50
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	75,20	73,68	102,06
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	2,53	6,50	161,08
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	*93,85	93,48	100,39
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran perkapita (Rp Juta)	15,458	15,302	101,02
5.	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	86,36	84,50	102,20
6.	Meningkatnya permukiman layak huni	Persentase perumahan dan permukiman yang layak	78,03	78,95	98,83
7.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan didalam Masyarakat	Angka Kriminalitas	1.969	1875	105,01
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sanitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,26	68,60	112,62
		Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	122,33	122,33	100
9.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,88	12,86	130,16
10.	Meningkatnya Tingkat Perekonomian Penduduk	Tingkat Kemiskinan	4,06	4,10	100,10
		PDRB Per-Kapita (ADHB)	88.220	82.040	107,53
11.	Meningkatnya investasi	Peningkatan nilai PMA (US \$)	15.007.996	17.123.288	87,65
		Peningkatan nilai PMDN	3.425.496,8	750.000	456,73
12.	Menjadikan Sektor Perdagangan sebagai Penggerak Utama Perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	17,52	17,85	98,15

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET RPJMD	PERSENTASE CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (e-kraf)	11,81	10,50	112,47
14.	Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan Pariwisata yang unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	29,38	31,50	93,26
15.	Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	191.632	28.369	675,49
		Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	5.455.685	3.164.222	172,41
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1,93	1.90	101,57
		Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik	2,80	2.50	112
16.	Meningkatnya kemampuan Penanggulangan bencana	Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana	5	5	100
17.	Berkurang dampak kebakaran dan penyelamatan kedaruratan lainnya	Persentase bencana yang ditangani	100	100	100
18.	Meningkatnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100
19	Meningkatnya kinerja birokrasi	Nilai AKIP	BB	A	98,30
		Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	3,26	3,20	101,8
20.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	88,79	80,30	110,57
		Indeks kemudahan perizinan daerah	84,67	80.00	105,84
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,96	2,97	133,33

Catatan: *Data realisasi belum tersedia

*Perbedaan data target pada PK dengan target akhir RPJMD dikarenakan penyesuaian dengan RKPd Tahun 2024 dan capaian pada tahun sebelumnya.

3.A.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2024 DENGAN STANDAR NASIONAL (JIKA ADA)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL	
				Provinsi	Nasional
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Rata-rata lama sekolah	11,63	9,44	-
		Harapan lama sekolah	16,57	14,30	-
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	75,20	74,37	74,15
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	2,53	-	-
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	*93,85	-	-
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran perkapita (Rp Juta)	15.458	11.718	-
5.	Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	86,36	-	-
6.	Meningkatnya Permukiman Layak Huni	Persentase perumahan dan permukiman yang layak	78,03	-	-
7.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan didalam Masyarakat	Angka Kriminalitas	1.969	12.936	288.472
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sanitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,26	74,77	73,55
		Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	122,33	-	-
9.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,88	5,75	4,91
10.	Meningkatnya Tingkat Perekonomian Penduduk	Tingkat Kemiskinan	4,06	5,42	9,03
		PDRB Per-Kapita (ADHB)	88.220	-	-
11.	Meningkatnya Investasi	Peningkatan nilai PMA (US \$)	-	-	-
		Peningkatan nilai PMDN	-	-	-
12.	Menjadikan Sektor Perdagangan sebagai Penggerak Utama Perekonomian	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	17,52	-	-
13.	Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (e-kraf)	11,81	-	-
14.	Mewujudkan Kota Padang Menjadi Tujuan Pariwisata yang Unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	29,38	-	-
15.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Destinasi	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	191.632	-	-
		Jumlah Kunjungan Wisata	5.455.685	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL	
				Provinsi	Nasional
		Domestik			
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1,93	-	-
		Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik	2,80	-	-
16.	Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana	5	-	-
17.	Berkurangnya Dampak Kebakaran dan Penyelamatan Kedaruratan Lainnya	Persentase bencana yang ditangani	100	-	-
18.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	-
19.	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP	BB	BB	-
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	3,26	-	-
20.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	88,79	-	-
		Indeks kemudahan perizinan daerah	84,67	-	-
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,96	3,85	3,23

Catatan: *Data realisasi belum tersedia

3.A.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN DASAR			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	11,64	11,63	99,91
HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)	16,56	16,57	100,06

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan dasar ditandai dengan 2 (dua) indikator kinerja yang meliputi rata-rata lama sekolah dan indikator kinerja harapan lama sekolah. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena salah satu pendukung keterwujudan pencapaian misi I (meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing) dan mencapai tujuan (mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing).

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Untuk nilai Rata-rata Lama Sekolah di Kota Padang, target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 11,64 dengan capaian sebesar 11,63 atau 99,91%. Tidak tercapainya target rata-rata lama sekolah tersebut disebabkan oleh berbagai factor, selain faktor ekonomi masyarakat, aksesibilitas ke satuan pendidikan juga menjadi salah satu penyebab.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didalam mencapai target rata-rata lama sekolah tersebut adalah melakukan pembangunan unit sekolah baru untuk pemerataan pendidikan, dan penambahan Ruang Kelas Baru dengan tujuan meningkatkan daya tampung siswa / rombongan belajar pada sekolah negeri, sehingga setiap anak usia sekolah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan formal tanpa menimbulkan beban ekonomi bagi orang tua siswa terutama rumah tangga yang masih terdampak oleh pandemi Covid-19.

Gambar 3.A.5.1
Pembangunan RKB/USB



Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat

digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Padang target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 16,56 sementara capaiannya adalah 16,57 atau 100,06%. Upaya dan strategi utama yang dilakukan Pemerintah Kota Padang adalah komitmen bersama yang kuat didalam menekan tingginya angka putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah ini merupakan akibat dari belum pulihnya perekonomian masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19.

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Padang melakukan upaya meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah dengan memaksimalkan akses pendidikan Nonformal untuk Paket A, dan Paket B. Adapun yang menjadi sasaran untuk pendidikan non formal ini adalah anak-anak usia sekolah, dan masyarakat usia produktif, sehingga masyarakat memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Untuk memaksimalkan akses pendidikan non formal ini, Dinas Pendidikan melalui Satuan Pendidikan Non Formal gencar melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat sekaligus melakukan pendataan masyarakat putus sekolah. Disamping itu, Satuan Pendidikan Non Formal juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk bersih sungai dan pantai sebagai upaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pendidikan karakter. Selain memaksimalkan akses pendidikan non formal, pada sektor pendidikan formal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang juga memaksimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan untuk sekolah dan siswa kurang mampu, beasiswa keluarga tidak mampu baik yang bersumber dari APBN melalui Program Indonesia Pintar dan Miskin yang bersumber dari APBD melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Padang.

Gambar 3.A.5.2
Program Pendidikan Kesetaraan



Diharapkan, dengan banyaknya masyarakat yang mengikuti pendidikan non formal, dan peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, target kinerja angka harapan lama sekolah pada tahun 2024 yang ditetapkan dapat terpenuhi. Sumber Daya Keuangan/Dukungan Anggaran yang memadai merupakan faktor utama didalam menentukan tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan didalam mensukseskan pencapaian target kinerja adalah dengan melakukan efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan dengan lebih mengedepankan pemikiran dan waktu, tenaga, dan kreatifitas Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.

SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
ANGKA HARAPAN HIDUP	74,95	75,20	100,33
PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA	2,55	2,53	100,78

Pencapaian keberhasilan sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ditandai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu **angka harapan hidup dan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita**. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi I (meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan

berdaya saing) dan mencapai tujuan (mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing).

Analisis keberhasilan atau peningkatan kinerja untuk indikator angka harapan hidup :

- a. Fasilitas pelayanan yang mudah diakses masyarakat sehingga “*Respon Time*” atau waktu yang dibutuhkan pasien untuk mendapatkan pertolongan yang sesuai dengan kegawatdaruratan penyakitnya terpenuhi segera.
- b. Status Puskesmas dan rumah sakit di Kota Padang yang telah terakreditasi yang menunjukkan pelayanan kesehatan di Kota Padang mulai dari puskesmas sampai rumah sakit sudah sesuai standard. Pada tahun 2023 semua Puskesmas di Kota Padang melaksanakan kegiatan akreditasi dengan rincian 23 Puskesmas reakreditasi dan 1 Puskesmas (Puskesmas Parak Karakah) akreditasi pertama kali. Hasilnya 20 Puskesmas akreditasi paripurna, 2 Puskesmas akreditasi utama, 2 Puskesmas akreditasi madya. Untuk RS pada tahun 2023 status akreditasi paripurna sebanyak 24 RS, akreditasi utama sebanyak 2 RS dan 1 RS akreditasi madya.
- c. Keberadaan 9 Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan 19 RS PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) untuk menangani kasus gadar maternal neonatal.

Tabel 3.A.5.1
Status Puskesmas Kota Padang Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	Akreditasi	Keterangan
1	Lubuk Begalung	Paripurna	
2	Dadok Tunggul Hitam	Paripurna	
3	Padang Pasir	Paripurna	PONED
4	Air Tawar	Paripurna	
5	Lubuk Buaya	Paripurna	PONED
6	Lapai	Paripurna	
7	Air Dingin	Paripurna	PONED
8	Anak Air	Paripurna	PONED
9	Ambacang	Paripurna	
10	Alai	Paripurna	
11	Andalas	Paripurna	
12	Nanggalo	Paripurna	PONED

No	Nama Puskesmas	Akreditasi	Keterangan
13	Pagambiran	Paripurna	PONED
14	Ulak Karang	Paripurna	
15	Rawang	Paripurna	
16	Belimbing	Paripurna	
17	Koto Panjang Ikur Koto	Paripurna	
18	Pauh	Paripurna	PONED
19	Seberang Padang	Paripurna	PONED
20	Puskesmas Parak Karakah	Paripurna	
21	Lubuk Kilangan	Utama	
22	Pemancungan	Utama	
23	Bungus	Madya	PONED
24	Kuranji	Madya	

Tabel 3.A.5.2
Rumah Sakit PONEK di Kota Padang Tahun 2024

No	Nama Puskesmas	Akreditasi	Keterangan
1	RSUP Dr.M.Djamil	Paripurna	PONEK
2	RS Umum Daerah dr.Rasidin Padang	Paripurna	PONEK
3	RS Tk. III Reksodiwiryono Padang	Paripurna	PONEK
4	RS Bhayangkara Padang	Paripurna	PONEK
5	RS Umum Yos Sudarso	Paripurna	PONEK
6	RS Umum Bunda Padang	Paripurna	PONEK
7	RS Umum Semen Padang Hospital	Paripurna	PONEK
8	RS Umum Aisyiyah Padang	Paripurna	PONEK
9	RS Umum Islam Ibnu Sina	Paripurna	PONEK
10	RS Islam Siti Rahmah	Paripurna	PONEK
11	RS Ibu dan Anak Cicik	Paripurna	PONEK
12	RS Ibu dan Anak Mutiara Bunda	Paripurna	PONEK
13	RS Ibu dan Anak Siti Hawa	Paripurna	PONEK
14	RS Ibu dan Anak Restu Ibu	Paripurna	PONEK
15	RS Jiwa Prof. Dr. Hasan Basri Saanin	Paripurna	
16	RS Khusus Bedah Ropanasuri	Paripurna	
17	RS Khusus Mata Padang Eye Center	Paripurna	

No	Nama Puskesmas	Akreditasi	Keterangan
18	RS Khusus Mata Regina Eye Center	Paripurna	
19	RS Umum Naili DBS	Paripurna	PONEK
20	RS Universitas Andalas	Paripurna	PONEK
21	RSKGM Baiturrahmah	Paripurna	
22	RS Ibu dan Anak Lenggogeni	Paripurna	PONEK
23	RS Umum Hermina Padang	Paripurna	PONEK
24	RSGM Universitas Andalas	Paripurna	
25	RS Jiwa Dr. Yaunin	Utama	
26	RS Khusus Bedah Kartika Docta	Utama	
27	RS Umum Selaguri	Madya	PONEK

- d. Dibukanya program pelayanan yang melayani masyarakat selama 24 jam sehari yaitu *Public Safety Center* (PSC) semenjak tahun 2021 dan sepanjang tahun 2024 PSC menerima panggilan masuk sebanyak 300 panggilan dengan rincian *emergency* sebanyak 97 panggilan, non *emergency* sebanyak 67 panggilan dan *non category* (salah sambung, panggilan palsu dan panggilan lain) sebanyak 136 panggilan. Panggilan *emergency* dengan rincian trauma kecelakaan lalu lintas (KLL) 7 panggilan, trauma non KLL 72 panggilan, jantung 1 panggilan, stroke 10 panggilan, luka bencana 4 panggilan dan KIA (kesehatan ibu dan anak) 3 panggilan. Panggilan *non emergency* dengan rincian keperawatan 3 panggilan, rujukan 2 panggilan, ambulan transport 47 panggilan, edukasi 1 panggilan, non medis-informasi fasilitas kesehatan 7 panggilan dan non medis informasi lainnya 7 panggilan.

Gambar 3.A.5.3
Berita/Laporan Pelayanan Kesehatan oleh Tim PSC 119 Kota Padang



- e. Penguatan upaya promotif dan preventif yang berkesinambungan dalam merubah perilaku masyarakat agar hidup bersih dan sehat, terutama melalui gerakan nasional GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Gambar 3.A.5.4
Pertemuan Penguatan PHBS bagi Kelompok Kerja Posyandu



Gambar 3.A.5.5
Sosialisasi Pengelolaan Kebugaran Anak Sekolah



- f. Intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung stunting kepada :
- 1) Ibu hamil : pemberian makanan tambahan (PMT), pemberian tablet tambah darah (TTD), suplemen kalsium dan pemeriksaan kehamilan sesuai standard.
 - 2) Ibu menyusui dan anak usia 0-59 bulan : promosi dan konseling menyusui, pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), tata laksana gizi buruk, Vitamin A, imunisasi, suplemen zinc, manajemen terpadu balita sakit (MTBS) dan pencegahan kecacingan.
 - 3) Remaja putri : TTD, gerakan aksi bergizi dan skrining kadar Hb.

Gambar 3.A.5.6
Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan anak



Gambar 3.A.5.7
Sosialisasi Pola Asuh Balita Bagi Kader



- g. Pemberdayaan keluarga melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang menjadikan kegiatan pemberdayaan keluarga sebagai prioritas.

Gambar 3.A.5.8
Rapat Evaluasi Program PIS-PIK



- h. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Padang bersama lintas sektor terkait dalam penerapan kebijakan bidang kesehatan dan dalam mensukseskan pelaksanaan program nasional di bidang kesehatan, seperti Aksi Bergizi. Aksi Bergizi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pengetahuan siswa-siswi tentang pentingnya gizi seimbang dan aktifitas fisik, membiasakan konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri, kebiasaan hidup sehat serta mencegah masalah gizi pada anak usia sekolah, seperti Anemia, Stunting dan Obesitas.

Gambar 3.A.5.9
Aksi Bergizi Bersama Puskesmas Belimbing di SMP 27 Padang



Gambar 3.A.5.10
Pertemuan Lintas Sektor dalam Rangka Pembentukan Satgas Tanpa Rokok Kota Padang



- i. Inovasi pelayanan kesehatan di Puskesmas, seperti Ayo Ceting (Ayo Cegah Stunting) di Puskesmas Andalas yang meraih penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020. Pelaksanaan Pos Gizi tahun 2022 oleh Puskesmas yang melibatkan masyarakat. Launching Rumah Gizi tahun 2023 di Kelurahan Bungo Pasang, Dapur Sehat Nutrisi di Bungus dan Aplikasi Gemoi di Puskesmas Padang Pasir. Tahun 2024 Inovasi Ayo Ceting meraih TOP Five (5) Inovasi Kelompok Keberlanjutan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

Gambar 3.A.5.11
Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Berkelanjutan Tahun 2024



Gambar 3.A.5.12
Pelaksanaan Pos Gizi Tahun 2024



SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA KESETARAAN GENDER			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) (NILAI)	93,88	Data belum tersedia	-

Pencapaian keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja yang meliputi indeks pembangunan gender (IPG). Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi I (meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing) dan mencapai tujuan (mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing).

SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
PENGELUARAN PERKAPITA (RP JUTA)	15,328	15.458	101,02

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja yang meliputi pengeluaran perkapita. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi I meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing dan mencapai tujuan mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing.

Salah satu tujuan utama Pembangunan di seluruh daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakatnya. Kota Padang untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dilihat dari kemampuan daya beli masyarakatnya. Kemampuan daya beli tergambar dalam indikator pengeluaran perkapita, yaitu jumlah pengeluaran rata-rata Masyarakat kota padang per orang dalam kurun waktu 1 tahun.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Padang Tahun 2024 meningkat jika di bandingkan dengan Tahun 2023, hal ini dapat dilihat Dimana pengeluaran perkapita di Kota Padang pada Tahun 2023 sebesar 15,089 juta rupiah per tahun kemudian pada Tahun 2024

pengeluaran perkapita meningkat menjadi 15,458 juta rupiah per tahun. Dengan meningkatnya daya beli Masyarakat Kota Padang menggambarkan meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kota Padang tahun 2024 jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan provinsi, pengeluaran per kapita penduduk kota Padang jauh lebih tinggi.

Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

1. Menjaga ketersediaan barang pangan pokok penting di pasaran, dengan tujuan agar fluktuasi harga bahan yang disebabkan mekanisme pasar menjadi lebih terkendali.
2. Melaksanakan Operasi Pasar Murah bekerjasama dengan BULOG, Produsen minyak goreng (incasi raya), distributor pangan. Operasi Pasar Murah ini dilaksanakan ketika terjadi kenaikan harga produk pangan dipasaran, dengan adanya kegiatan ini Masyarakat bisa mendapatkan produk pangan dengan harga lebih murah.
3. Meningkatnya pendapatan masyarakat dengan memberikan stimulus pada sektor ekonomi masyarakat seperti pemberdayaan usaha mikro melalui:
 - Kemudahan pinjaman modal usaha dengan bunga 0% melalui Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah yang berada hampir disetiap kelurahan di Kota Padang,
 - Penguatan kelembagaan usaha mikro dengan menyediakan Tenaga Pendamping usaha mikro disetiap kelurahan.
 - Peningkatan Sumber Daya Manusia Usaha mikro dan peningkatan kualitas produk dengan program pendampingan dan pelatihan dari dinas terkait (Dinas Koperasi UKM, Dinas Nakerin, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata)
 - Peningkatan Pemasaran Produk dengan melibatkan usaha mikro Kota Padang dalam berbagai event seperti pendampingan pemasaran digital, event bazar, fasilitasi Kerjasama usaha mikro dengan usaha retail yang ada di Kota Padang, seperti dengan Budiman Swalayan, Aciak Mart, Citra Mart, dan sebagainya.
4. Meringankan biaya hidup masyarakat dengan memberikan BPJS Kesehatan Gratis bagi masyarakat miskin, meringankan biaya Pendidikan dasar dengan memberikan bantuan Pendidikan dan beasiswa untuk siswa miskin di Kota Padang.

Dengan memberikan Stimulus untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat serta membantu mengurangi pengeluaran kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kota Padang.

SASARAN STRATEGIS 5 MENINGKATNYA LAYANAN TRASPORTASI PERKOTAAN			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PERHUBUNGAN (NILAI)	84,70	86,36	101,96

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya layanan transportasi perkotaan ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja yang meliputi indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 2 (mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal) dan mencapai tujuan (terwujudnya Kota Padang yang layak huni).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan merupakan salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan. Pada tahun 2024 target IKM terhadap pelayanan perhubungan dengan nilai **84,70** realisasi **86,36** termasuk dalam kategori B, dengan persentase capaian **101,96%**. Pelaksanaan IKM dilakukan melalui survei dengan beberapa responden terhadap layanan yang ada pada Dinas Perhubungan yakni pelayanan Terminal Angkot, pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor dan pelayanan Trans Padang.

Beberapa hal yang menyebabkan IKM Dinas Perhubungan masih dalam kategori B adalah:

- Kapasitas penumpang bus terlalu banyak, melebihi yang seharusnya
- Pramugara kurang perhatian dan tidak memprioritaskan penumpang lansia
- AC tidak berfungsi dengan baik, pintu rusak, dan beberapa kursi tampak goyang
- Rute yang disediakan kurang memadai, perbedaan antar rute dan nomor bus tidak jelas
- Lokasi parkir untuk antrian KIR kurang memadai
- Ruang tunggu untuk layanan KIR kurang nyaman
- Jaringan terkendala sehingga waktu penyelesaian KIR lebih lama
- Alur layanan kurang jelas, terutama bagi pengunjung yang pertama kali datang

ke Layanan KIR

- Waktu pengujian terlalu singkat
- Tempat pengujian sering macet karena dekat dengan SPBU

Berdasarkan unsur layanan dapat dilakukan solusi untuk memperbaiki pelayanannya lebih baik lagi :

1. Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR):

- Unsur waktu pelayanan, dengan memaksimalkan pelayanan dan meminimalisir kesalahan saat pengerjaan sehingga layanan selesai dengan cepat.
- Unsur Sarana Prasarana, dengan menambah papan petunjuk untuk lokasi parker dan menyediakan petugas parker yang membantu pengunjung untuk mendapatkan lokasi parker serta menyediakan ruang tunggu yang nyaman bagi pengunjung.

2. Layanan Trans Padang:

- Unsur waktu pelayanan, dengan menyediakan informasi rute Trans Padang di semua halte dan mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau lokasi bus.
- Unsur prilaku pelaksana, dengan mengingatkan sopir/petugas Trans Padang melayani dengan etika pelayanan senyum, sapa dan salam.
- Unsur sarana prasarana, dengan melakukan perbaikan untuk kerusakan fasilitas armada Trans Padang.
- Unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan, dengan menginformasikan dan mengarahkan pelanggan untuk dapat menyampaikan keluhan, saran dan masukan pada fasilitas yang ada.

Disamping melakukan beberapa hal di atas, Dinas Perhubungan memenuhi target renstra 2019-2024, yakni sebanyak 6 Koridor Trans Padang yang dioperasikan. 6 Koridor yang telah beroperasi yaitu Koridor 1, Koridor 2, Koridor 3, Koridor 4, Koridor 5, dan Koridor 6. Dinas Perhubungan melakukan pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di beberapa ruas jalan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.A.5.3
Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

No	Kegiatan	Jumlah/Volume	Lokasi
A.	Kontruksi		
1	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas (Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu)	Total Rambu Terpasang : 30 unit	Jalan S.Parman (Simpang DPRD Sumbar s/d Simpang Ulak Karang) : 11 unit Jl. Juanda (Simpang Pasar Pagi s/d Jembatan Bakali) : 5 unit Jl. Veteran (Jembatan Bakali s/d Simpang Olo Ladang) : 2 unit Jl. Pemuda (Simpang Sayonara s/d Simpang Hangtuh) : 1 unit Jl. Diponegoro (Simpang Hangtuh s/d Taman Melati) : 3 unit Kawasan Pasar Tanah Kongsil : 8 unit
2	Pemasangan Marka Jalan – Pengadaan Langsung (Belanja Jasa Tenaga Ahli)	Total Volume Marka : 712,93 m²	Jl. Bgd. Aziz Chan (Simpang Alang Laweh s/d Simpang Polresta) : 67,656 m ² Jl. Bgd. Aziz Chan (Depan Kantor Pajak Padang s/d Simpang Polresta) : 28,620 m ² Jl. M. Yamin (Simpang Polresta s/d Kantor Balai kota Lama) : 15,048 m ² Jl. Bgd. Aziz Chan (Simpang Polresta s/d Simpang Kandang) : 32,184 m ² Jl. Bgd. Aziz Chan (Simpang Kandang s/d Simpang A.Yani) : 47,960 m ² Jl. Jend. Sudirman (Simpang A.Yani s/d Simpang PDK) : 153,396 m ² Jl. Bgd. Aziz Chan (Simpang Kandang arah Kantor Pos) : 22,500 m ² Jl. Agus Salim (Simpang Kandang arah RSUD Aisyiyah) : 24,300 m ² Jl. Jend. Sudirman (Simpang Kandang arah SMP 1) : 29,520 m ² Jl. Jend. Sudirman (Simpang PDK arah Taspen) : 26,460 m ² Jl. Jend. Sudirman (Depan Kantor Gubernur) : 30,570 m ² Jl. Jend. Sudirman (Depan Wisma Kemala) : 28,020 m ² Jl. Jend. Sudirman (Depan Makorem) : 29,280 m ² Jl. Jend. Sudirman (Simpang A.Yani arah Makorem) : 26,130 m ² Jl. A.Yani (Simpang A.Yani arah Rumah Dinas Walikota) : 25,380 m ² Jl. Jend. Sudirman (Simpang A.Yani arah Pasar Raya) : 28,290 m ² Jl. Bgd. Aziz Chan (Depan Hotel Padang) : 21,720 m ² Jl. Kis Mangunsarkoro (Simpang PDK

No	Kegiatan	Jumlah/Volume	Lokasi
			arah Timur) : 22,650 m ² Jl. Rasuna Said (Simpang PDK arah Utara) : 32,946 m ²
3	Pemasangan Marka Jalan - Swakelola (Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi serta Belanja Jasa Tenaga Ahli)	Total Volume Marka : 593,06 m²	Jl. MH. Thamrin (Masjid Nurul Iman s/d Simpang Alang Laweh) : 3,072 Jl. M. Yamin (Depan Kawasan Balai Kota Lama) : 125,946 m ² Jl. Rasuna Said (Simpang PDK arah Utara) : 32,946 m ² Simpang Alang Laweh (Lengan arah Timur, Barat dan Utara) : 81,54 m ² Simpang Polresta (Lengan arah Timur, Barat, Utara dan Selatan) : 120,54 m ² Depan Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center : 29,130 m ² Depan SD Alang Laweh Jl. Bgd. Aziz Chan : 25,050 m ² Depan Kantor Pos Jl. Bgd. Aziz Chan : 23,640 m ² Depan SMP 1 Padang Jl. Jend, Sudirman : 34,380 m ² Depan Rumah Dinas Sekda Kota Padang Jl. Ratulangi : 27,276 m ² Depan Rumah Dinas Wali Kota Padang Jl. A.Yani : 45,252 m ² Depan HBT Jl. Kelenteng : 6,432 m ² Depan SDN 02 Cupak Tangah Kec. Pauh : 28,146 m ² Depan SLB 1 Padang : 7,800 m ²
B	Barang		
1	Belanja Modal Rambu Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pengadaan Road Barrier)	44 buah	Kota Padang
2	Belanja Modal Rambu Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya (Pengadaan Traffic Cone Rubber)	40 buah	Kota Padang
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud - Software (Set-Up dan Programming APILL / ITS)	10 unit Lokasi APILL	Kota Padang
4	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya (Multi	1 unit	Kota Padang

No	Kegiatan	Jumlah/Volume	Lokasi
	Tester)		
5	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools): Tools Box Peralatan Bengkel Lengkap	1 set	Kota Padang
6	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Modul Firing - UMC 690 24 VDC)	22 unit	Kota Padang
7	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (PSU Switching 24 v - 500 W)	42 unit	Kota Padang
8	Belanja Modal Rambu Bersuar (Modul CPU UMC 690 24 VDC)	14 unit	Kota Padang
9	Belanja Modal Rambu Bersuar (Modul Display dan Keypad UMC-690 24 VDC)	11 unit	Kota Padang
10	Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Relay AC 220 V LY-4 : 20 unit Relay DC 220 V LY-4 : 20 unit Kabel NYHY 4x1,5 mm : 300 meter	Kota Padang
11	Belanja Bahan Bahan Bangunan dan Konstruksi (Cat Minyak)	50 kg	Kota Padang
12	Belanja Bahan Bahan Bangunan dan Konstruksi (Cat Marka Coldplast)	50 kg	Kota Padang
13	Belanja Komponen Komponen Rambu Rambu (Rambu Lalu Lintas)	17 buah (suku cadang rambu)	Kota Padang

Dinas Perhubungan melakukan pemasangan unit rumah yang terfasilitasi PJU dan Lampu Hias dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.A.5.4
Pemasangan PJU

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	No Rekening	Lokasi	Volume (UNIT)
	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.15.02.2.02		
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	2.15.02.2.02.0002		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	No Rekening	Lokasi	Volume (UNIT)
1.	Pemasangan Strategis Paket 1	2.15.02.2.02.0002.5. 2.04.04.02.0003	Jl. Gajah Mada dan Jl. Kandis Raya, Kelurahan Kampung Olo, Kec. Nanggalo, Kota Padang (Banjir Kanal Belakang Kampus ITP)	36
	PT.EREMPAT SYAHER KARYA		RT IV RW VIII Jati Gaung dan RT III RW IX Jati Parak Salai, Kelurahan Jati, Kec. Padang Timur, Kota Padang	21
			Jl. Bandes Surau Gajah Mada RT 02/ RW 02, Kelurahan Sungai Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang	11
			Kurao Kapalo Banda RT 03/ RW 01, Kelurahan Gunung Sarik, Kec. Kuranji, Kota Padang	9
			Jl. Kimia, Kel. Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang	9
			Jl.Koto Panjang SD 14 Limau Manih Kec Pauh	20
			Kelurahan Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang (Gang Saiyo RT 05 RW 04)	13
			RW 001 Kelurahan Olo Padang Barat	14
			Jl. Surau Gadang Jl. Bandung, Kel. Surau Gadang, Jl.Jl. Berlian I Komplek Cemara 1 Banda Gadang	7
			Jl.Koto Pulaui Kec Koto Tengah	38
			Jl Tanah Sirah Piai Lrg Berseri	11
			Jl.Olo RT 03 RW 03 Teluk Kabung Tengah	6
			Komp. Griya Insani, Kelurahan Padang Besi, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang	14
			RT 01, RW 09, Kelurahan Koto Lalang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang	6
3.	Pemasangan Strategis Paket 2	2.15.02.2.02.0002.5. 2.04.04.02.0003	RT. 03 RW 05, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang	5
	PT.SUMBER MAGNA ANDALAN		RT.02 RW 01 Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang	4
			Jl. Teratai RT. 04 RW. 06, Kelurahan Batung Taba Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang	11
			Jl. Kampung Nias V & Jl. Niaga dalam Kel Kampung Pondok, Kec. Padang Selatan	3
			RT.02 RW.01 Kelurahan Banuaran Nan XX, Kota Padang (jalan ke Mushalla Amal Sejati)	6
			Komp. Green Permata Kel. Tabiang Banda Gadang	1
3.	Pemasangan Penerangan Jalan Umum Paket 1	2.15.02.2.02.0002.5. 2.04.04.02.0031	Jl.Pendestrian Khatib Sulaiman	104
			Jl.Bypas dan Jalan Protokol Kota Padang	190

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	No Rekening	Lokasi	Volume (UNIT)
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan	2.15.02.2.02.0004		
1.	Rehabilitasi/Perbaikan Lampu Hias Jembatan dan Taman Paket 1	2.15.02.2.02.0004.5. 2.04.04.02.0003	Jembatan Kuranji 2 Kuranji	17
2.	Alat Listrik Elektronik Paket 2	2.15.02.2.02.0004.5. 2.04.04.02.0031	Tersebar Kota Padang (untuk operasional rutin PJU dan Jalan Arteri ,Protokol ,jalan utama dan lainnya)	2000
3.	Alat Listrik Elektronik Paket 5	2.15.02.2.02.0004.5. 2.04.04.02.0031	Tersebar Kota Padang (untuk operasional rutin PJU dan Jalan Arteri ,Protokol ,jalan utama dan lainnya)	200
4.	Alat Listrik Elektronik Paket 2	2.15.02.2.02.0004.5. 2.04.04.02.0031	Tersebar Kota Padang (untuk operasional rutin PJU dan Jalan Arteri ,Protokol ,jalan utama dan lainnya)	200

Dinas Perhubungan melakukan penertiban dan pengawasan tepi jalan umum. Kegiatan berupa pengembosan dan penderekan yang dilakukan pada jalan Khatib Sulaiman, Sudirman, Perintis Kemerdekaan, Proklamasi dan S.Parman.

SASARAN STRATEGIS 6 MENINGKATNYA PERMUKIMAN LAYAK HUNI			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
PERSENTASE PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK (%)	81,16	78,03	96,14%

Pencapaian keberhasilan sasaran strategis meningkatnya permukiman layak huni ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja yang meliputi persentase perumahan dan permukiman yang layak. Sasaran dan indikator ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 2 yaitu mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan local dan mencapai terwujudnya Kota Padang yang layak huni.

Pada indikator ini, tahun 2020 belum menggunakan indikator kinerja tersebut karena memakai indikator Indeks Sanitasi. Pada tahun 2021, realisasi indikator Persentase Perumahan dan Permukiman yang Layak sebesar 74,08%. Artinya, untuk indikator persentase perumahan dan permukiman yang layak realisasinya masih belum sesuai target pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan dimana target persentase perumahan dan permukiman layak yaitu 76,58 % dan realisasi adalah 76,58 % atau tercapai 100 %. Pada tahun 2023 juga terjadi peningkatan dimana target persentase perumahan dan permukiman layak yaitu 77,80 % dan realisasi adalah 77,82 % atau tercapai 100,03 %. Sementara pada tahun 2024 juga terjadi peningkatan dimana target persentase perumahan dan permukiman layak yaitu 78,03 % dan realisasi adalah 78,03 % atau tercapai 100%.

Adapun lokasi Perumahan dan Permukiman yang ditangani pada tahun 2024 ini adalah Kel. Kuranji Kec. Kuranji, Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji, Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji, Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji, Kel. Lubuk Lintah Kec. Kuranji, Kel. Anduring Kec. Kuranji, Kel. Jati Kec. Padang Timur, Kel. Limau Manis Selatan Kec. Pauh, Kel. Rawang Kec. Padang Selatan, Kel. Batang Arau Kec. Padang Selatan, Kel. Pasa Gadang Kec. Padang Selatan, Kel. Seberang Padang Kec. Padang Selatan, Kel. Aie Pacah Kec. Koto Tangah, Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah, Kel. Koto Luar Kec. Pauh, Kel. Padang Besi Kec. Lubuk Kilangan, Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara, Kel. Gunung Pangilun Kec. Padang Utara, Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara, Kel. Kurao Pagang Kec. Nanggalo, Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo, dan Kel. Purus Kec. Padang Barat, Kel. Piai Tengah Kec. Pauh, Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah, Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tangah, dan Kel. Bungo Pasang Kec. Koto Tangah.

Ada beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian pada indikator ini. Kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator, pada tahun ini dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat menutupi keterlambatan realisasi pada tahun 2021 yang capaiannya hanya 74,08% dan tahun 2022 yang capaiannya 76,58 %.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan pada indikator ini adalah sebagai berikut:

- Adanya percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan fisik yang telah dilakukan secara swakelola oleh LPM/KSM dan pengadaan oleh penyedia jasa, diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Air Minum Kawasan Permukiman di Kalampayan Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Gambar 3.A.5.13
Penambahan Jaringan Pipa Transmisi Air Minum ke Rumah Masyarakat Penerima



Item pekerjaan pada paket ini adalah berupa penambahan jaringan perpipaan transmisi air minum ke rumah masyarakat penerima. Selain itu juga dilakukan pengetesan dan aksesoris perpipaan air minum.

2. Hibah Air Limbah Setempat (HALS) dan Sanitasi di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Gambar 3.A.5.14
Hibah Air Limbah Setempat (HALS) dan Sanitasi di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung



- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Melaksanakan monitoring pekerjaan Air Minum Kawasan Permukiman di Kota Padang.

Gambar 3.A.5.15
Monitoring Pekerjaan Air Minum Kawasan Permukiman



PPTK didampingi tim dari bidang Kawasan Permukiman melakukan pengecekan dan berdiskusi dengan penerima manfaat serta memastikan bahwa pekerjaan Air Minum yang dikerjakan berhasil, sehingga sumber air minum dapat teraliri hingga ke titik sambungan rumah masyarakat.

2. Melaksanakan monitoring pekerjaan Hibah Air Limbah Setempat (HALS)

Gambar 3.A.5.16
Monitoring Pekerjaan Hibah Air Limbah Setempat (HALS)



Kepala Dinas didampingi Tim dari Bidang Kawasan Permukiman dan tenaga fasilitator lapangan melakukan pengecekan terhadap kegiatan HALS TA 2024 di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara.

SASARAN STRATEGIS 7			
MENINGKATNYA KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN DALAM MASYARAKAT			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET	PERSENTASE CAPAIAN
ANGKA KRIMINALITAS (ANGKA)	1875	1969	105,01

Pencapaian keberhasilan sasaran strategis meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja yang meliputi angka kriminalitas. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 2 mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan local dan mencapai tujuan terwujudnya Kota Padang yang layak huni.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi angka kriminalitas melebihi target kinerja pada tahun 2024 disebabkan beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat yang belum sadar terhadap peraturan yang berlaku;
2. Perlu adanya penyegaran payung hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai landasan Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3. Belum dibentuknya relawan Satlinmas ditiap kelurahan untuk meningkatkan koordinasi antara masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam menjaga lingkungan mereka.

Adapun solusi atau upaya yang telah dilakukan Satpol PP dalam mengatasi permasalahan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan berbagai unsur dan instansi samping seperti TNI dan Polri dalam menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan didalam masyarakat;

Gambar 3.A.5.17
Koordinasi dengan TNI dan Polri



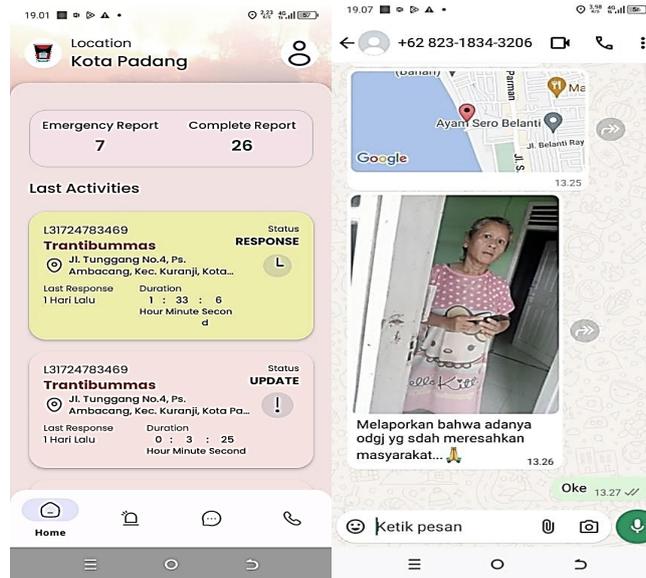
- 2) Menempatkan Personil Satpol PP dikecamatan-kecamatan dan pos-pos tertentu sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan sebagai penghubung informasi dari masyarakat ke markas komando;
- 3) Melakukan partoli, pengawasan dan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada secara rutin, baik pada hari sabtu atau minggu maupun pada hari libur nasional;

Gambar 3.A.5.18
Partoli, Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Perda dan Perkada



- 4) Adanya *Padang Comand Center 112* (PCC 112) sehingga masyarakat yang melihat/mendengar/mengetahui kejadian darurat maupun gangguan trantibum yang terjadi disekitarnya, dapat melakukan panggilan ke layanan PCC 112 dan akan ditindaklanjuti oleh Instansi Kedaruratan salah satunya Satpol PP. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pelaporan langsung kepada Satpol PP melalui beberapa layanan lain sebagai berikut:
 - Telpon : (0751) – 810045
 - Whatsapp : 0823 8935 1525
 - Instagram : @satpolpppadang

Gambar 3.A.5.19
Pengaduan Melalui PCC 112



- 5) Memberikan pendidikan dasar bagi personil Satpol PP yang sebelumnya belum mendapatkan pendidikan dasar;

Gambar 3.A.5.20
Pendidikan Dasar Bagi Personil Satpol PP



- 6) Memberikan sosialisasi rencana pembentukan relawan Satlinmas ke lurah-lurah yang ada di Kota Padang;

Gambar 3.A.5.21
Sosialisasi Rencana Pembentukan Relawan Satlinmas



- 7) Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah pada saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tentang bahaya tawuran dan kriminal;

Gambar 3.A.5.22
Sosialisasi Bahaya Tawuran dan Kriminal



- 8) Melakukan sidang Tipiring bagi pelanggar Perda dan Perkada;

Gambar 3.A.5.23
Sidang Tipiring bagi pelanggar Perda dan Perkada



9) Membentuk Forum Masyarakat Peduli Penyakit Menular Seksual.

Gambar 3.A.5.24
Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Penyakit Menular Seksual



SASARAN STRATEGIS 8 MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SANITASI			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (NILAI)	72,50	77,26	106,56
LUAS KAWASAN KUMUH YANG DITANGANI (Ha)	122,33	122,33	100

Pencapaian Keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sanitasi ditandai dengan 2 (dua) indikator kinerja yang meliputi indeks kualitas lingkungan hidup dan indikator kinerja luas kawasan kumuh yang ditangani. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 2 mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal dan mencapai tujuan terwujudnya Kota Padang yang layak huni.

IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara daerah dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan realisasi dari indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor S318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020-2024.

Capaian IKLH pada tahun 2024 Kota Padang adalah 77.26 dengan demikian IKLH Kota Padang masuk dalam Kategori Baik. Capaian IKLH tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 4.98 point dari 72.28. Kenaikan ini dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) kota Padang tinggi dan berada di atas baku mutu dan mempengaruhi perhitungan IKLH kota Padang. Dari target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 72.50 IKLH kota Padang melebihi target yaitu 77.26.

Tabel 3.A.5.5
Kategori IKLH

Kategori IKLH	Nilai
Unggul	$x > 90$
Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
Baik	$74 < x \leq 82$
Cukup	$66 \leq x \leq 74$
Kurang	$58 \leq x < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
Waspada	$x < 50$

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Sampah yang tidak terkelola dan dibuang ke sungai akan berdampak buruk bagi lingkungan seperti banjir dan berbagai dampak negatif lainnya. Salah satu solusi untuk mengurangi pencemaran lingkungan pada Sungai adalah dengan memasang kubus apung. Kota Padang sudah memasang kubus apung di Sungai Banda Bakali sepanjang ± 47 m. Dengan adanya pengadaan dan pemasangan kubus apung ini, dapat mengurangi sampah yang masuk ke Sungai sehingga bisa mengurangi pencemaran yang terjadi akibat tumpukan sampah.

Pemasangan kubus apung di Sungai Batang Arau yang merupakan salah satu sungai besar yang ada di kota Padang. Kondisi saat ini secara kasat mata masih banyak sampah yang hanyut atau bertumpuk di tepian sungai. Beberapa upaya telah dilakukan seperti pengerukan sungai dari sedimen, pembersihan sungai dari sampah, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang membuang sampah dan limbahnya serta melibatkan sekolah untuk mendidik siswa agar tidak membuang sampah sembarangan dan juga meningkatkan sosialisasi melarang masyarakat membuang sampah ke sungai. Untuk mewujudkan sungai yang bersih dan bebas sampah telah dilakukan pemasangan 10 (sepuluh) perangkat sampah di salter yang menuju sungai batang arau pada tahun 2022. Agar sungai batang arau semakin tacilak, perlu dipasang kubus apung pada beberapa titik di sungai batang arau.

Penambahan Pemasangan kubus apung merupakan salah satu upaya konkrit yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam pengelolaan dan pemulihan DAS Batang Arau dengan penyediaan sarana pengelolaan sampah sehingga diharapkan kontribusi dan

dukungan dari semua pengguna sungai Batang Arau. Kubus apung dipasang di sungai Batang Arau pada 2 lokasi yaitu di depan Mesjid Darussalam Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan (sepanjang 65 m) dan jembatan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung (sepanjang 30 m). Pemasangan kubus apung diharapkan dapat menghambat laju sampah atau mengurangi sampah yang sampai ke muara sungai dan laut.

Gambar 3.A.5.25
Dokumentasi Kubus Apung di Sungai Banda Bakali dan Batang Arau



Untuk meningkatkan indeks kualitas air, pemerintah kota Padang sudah melakukan Studi Kelayakan terhadap sungai Batang Arau. Pemanfaatan sungai ini cukup beragam diantaranya untuk perikanan, tempat pelabuhan kapal-kapal, sebagai badan air penerima limbah pabrik karet dan yang paling dominan adalah sebagai badan air penerima limbah domestik, sehingga Sungai Batang Arau terus mengalami penurunan kualitas perairan. Penelitian terhadap kualitas air di Muara Sungai Batang Arau Padang Sumatera Barat yang telah dilakukan oleh Putri (2010), menunjukkan adanya indikasi pencemaran bahan organik yang ditinjau dari kecerahan, TSS, oksigen terlarut, BOD, COD, pH dan suhu, yang tidak sesuai dengan standar baku mutu perairan (Peraturan Pemerintah RI No. 22, 2021).

Mengacu kepada Laporan Akhir Master Plan Air Limbah Kota Padang Tahun 2013, (Satker PPLHPS, 2013) sebagai acuan awal dari kajian kelayakan pengelolaan air limbah di Kawasan Batang Arau dan sekitarnya ini dilakukan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 PermenPUPR 04/PRT/M/2017, maka Sistem Pengolahan Air Limbah (SPALD) Kawasan Batang Arau Kota Padang telah diformulasikan program pengembangan sistem pengelolaan secara terpusat (off-site), sebagaimana juga dimaksud dalam term of reference pekerjaan studi kelayakan ini. Berdasarkan pokok pikiran tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melakukan Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Sistem Pengolahan Air Limbah Kawasan Batang Arau Kota Padang sebagai tindak lanjut Master Plan Air Limbah Kota Padang 2013 yang telah disusun sebelumnya.

Target dan tujuan strategis pengelolaan air limbah domestik di Kawasan Batang Arau Kota Padang adalah peningkatan layanan pengolahan air limbah kota dengan target pembangunan sistem sewerage kota yang disesuaikan dengan nomenklatur PermenPUPR 04/PRT/M/2017 adalah sistem pengolahan air limbah domestik (SPALD) dengan target capaian 55% dari jumlah beban pencemaran Kota Padang di Tahun 2034 dengan kelembagaan pengelola salah satunya adalah setingkat perusahaan umum daerah (Perusda) yang melibatkan pihak swasta.

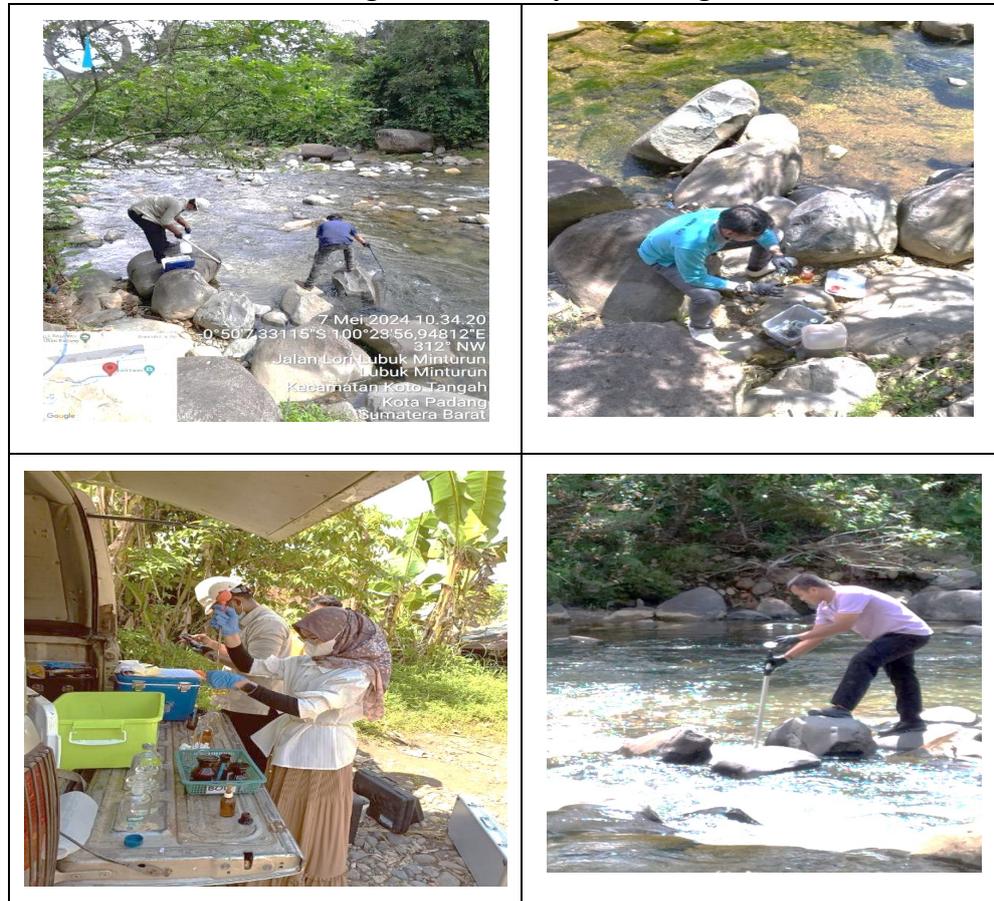
Program kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran kualitas air sungai, terutama sungai Batang Arau, yang merupakan sungai terbesar di kota Padang, dengan adanya SPALD, diharapkan dapat mengurangi beban pencemar sungai, dan dapat meningkatkan kualitas sungai sehingga dapat menarik peminat bagi pariwisata yang datang melihat jembatan Siti Nurbaya dan Muaro sungai Batang Arau. Berikut beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya Indeks Kualitas Air (IKA).

Pemantauan Kualitas Air Sungai

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu Tahap I pada bulan Januari-Juni 2024 dan tahap II pada bulan Juli-Desember 2024, sampel diambil pada 5 (lima) sungai kecil yaitu Sungai Batang Guo, Sungai Batang Ampalu, Sungai Banjir Kanal,

Sungai Batang Taruang dan Sungai Lareh serta 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Batang Arau dan Sungai Aie Dingin.

Gambar 3.A.5.26
Dokumentasi Pengambilan Sampel Air Sungai



Kegiatan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berdampak lingkungan

Selama tahun 2024, pengawasan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan pasif dan aktif. Dari 696 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan, semua usaha/kegiatan yang diawasi taat terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan. Ada 63 usaha/kegiatan yang mendapatkan teguran karena hasil uji laboratorium air limbahnya melebihi baku mutu.

Tabel 3.A.5.6
Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH
Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kab/Kota Pada Tahun 2024

	Jumah Kegiatan yang Diawasi	Taat	Tidak Taat	Persentase
Pengawasan Pasif	644	581	63	90.21%
Pengawasan Aktif	52	52	-	100%
	696	633	63	95.11%

Gambar 3.A.5.27
Dokumentasi Kegiatan pengawasan aktif Usaha/kegiatan



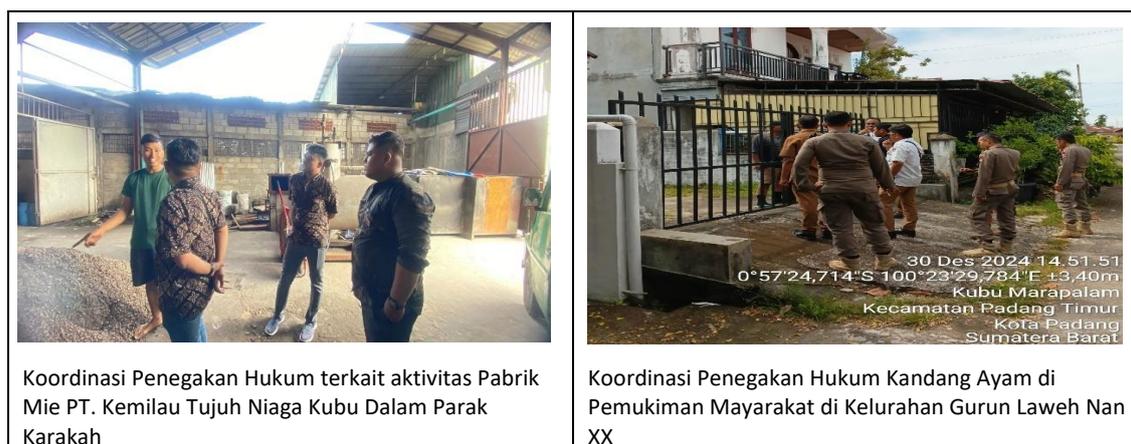
Kegiatan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat dan penegakan Hukum

Tindak lanjut atas dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang disampaikan oleh orang atau badan ke Dinas Lingkungan Hidup. Dengan pelaksanaan kegiatan ini maka pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang akan mempengaruhi indeks kualitas tutupan lahan, kualitas air dan kualitas udara dapat dapat diminimalisir. Semua pengaduan yang terintegrasi sebanyak 53 pengaduan dan dapat tertangani dan ditindaklanjuti.

Gambar 3.A.5.28
Dokumentasi Kegiatan Tindak lanjut pengaduan Masyarakat



Gambar 3.A.5.29
Dokumentasi Kegiatan koordinasi Penegakan Hukum





Koordinasi Penegakan Hukum piket TPS Liar di jalan By Pass



Koordinasi Penegakan Hukum Pembukaan Segel Larangan PT. EMI

2. Indeks Kualitas Udara

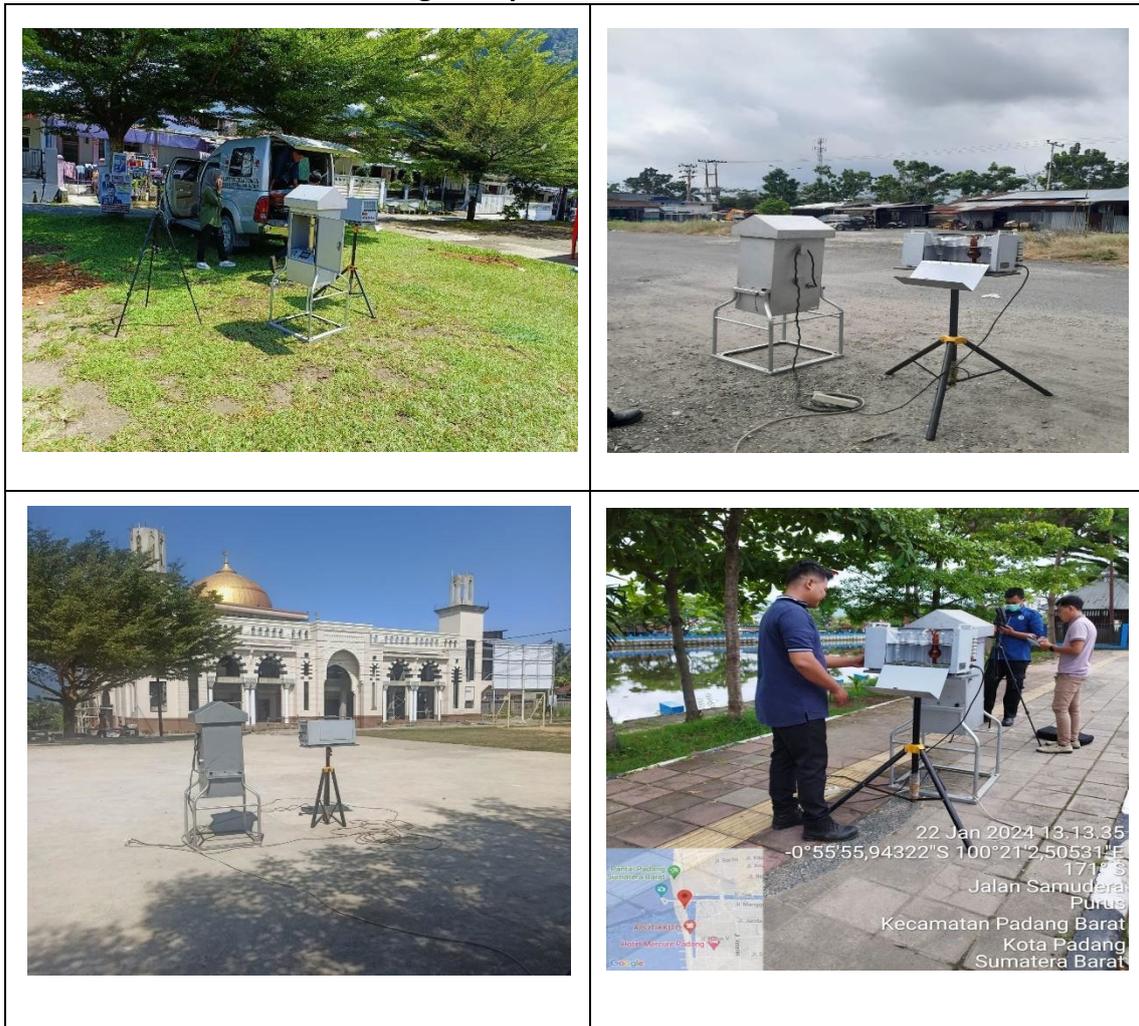
Indeks kualitas udara (IKU) di kota Padang masih berada di bawah ambang batas, hal ini dikarekan masih banyaknya area tutupan lahan dan ruang terbuka hijau, sehingga polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor masih bisa diserap oleh tanaman yang ada di sepanjang jalan raya. Berikut beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Kualitas Udara (IKU) :

Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu Tahap I pada bulan Januari- Juni 2024 dan tahap II pada bulan Juli-Desember 2024. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di area perumahan, kantor, pusat perniagaan, pusat pendidikan, kawasan TPA di kota Padang. Ada 10 (sepuluh) titik pemantauan yaitu:

- Titik 1 : RTH Imam Bonjol
- Titik 2 : Pasar Lubuk Buaya
- Titik 3 : Depan SMA Negeri 1 Padang
- Titik 4 : Perum Cimpago
- Titik 5 : TPA Aia Dingin
- Titik 6 : Terminal Anak Aia
- Titik 7 : RSUD. Dr. Rasidin Padang
- Titik 8 : Depan Kantor Balai Kota
- Titik 9 : Jalan Raya Indarung Padang Basi
- Titik 10 : Danau Cimpago

Gambar 3.A.5.30
Dokumentasi Kegiatan pemantauan Kualitas Udara Ambien



Kegiatan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang berdampak lingkungan

Selama tahun 2024, pengawasan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) jenis pengawasan yaitu pengawasan pasif dan aktif. Dari 696 usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan, semua usaha/kegiatan yang diawasi taat terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan. Ada 63 usaha/kegiatan yang mendapatkan teguran karena hasil uji laboratoriumnya melebihi baku mutu.

Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi

dan Adaptasi Perubahan Iklim

Kegiatan ini bermaksud untuk melakukan inventarisasi dan kajian terhadap sumber gas rumah kaca, baik sumber yang tergolong *point sources* maupun *non point sources* yang ada di Kota Padang. Kegiatan difokuskan dalam upaya inventarisasi potensi gas rumah kaca yang berasal dari sumber *non point sources* utama, seperti aktivitas pertanian dan peternakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi tentang potensi emisi gas rumah kaca dari sector *non point source* di kota Padang, mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya emisi gas rumah kaca dari lokasi *non point sources*. Sampling dilakukan di beberapa lokasi yaitu :

1. Koto Panjang Ikua Koto lokasi sawah
2. Aie Dingin lokasi ladang
3. Kayu Aro lokasi sawah
4. Kayu Aro lokasi kandang sapi
5. Kuranji lokasi kandang sapi
6. Kuranji lokasi ladang
7. Kuranji lokasi sawah
8. Aie Dingin lokasi TPA
9. Aie Dingi lokasi kandang ayam
10. Aie Pacah lokasi ladang
11. Aie Pacah lokasi rumah potong hewan

Gambar 3.A.5.31
Dokumentasi Kegiatan Sampling Gas Rumah Kaca



Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) secara terus menerus telah memicu terjadinya peningkatan efek rumah kaca yang menimbulkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim secara global. Sumber gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂) dan metana ada yang mudah untuk dikenali kapasitas dan sumbernya (point sources) yang berasal dari sektor industri dan ada yang sulit untuk dikenali kapasitas dan sumbernya (non point sources), seperti sektor transportasi, pertanian dan peternakan. Hasil pelaksanaan pengukuran gas CO₂ dan CH₄ yang telah dilakukan memberikan data bahwa sektor pertanian menyumbang emisi yang cukup besar.

Sektor pertanian dan peternakan merupakan dua sumber utama emisi karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄) dari non point sources. Laju emisi CO₂ dan CH₄ dari sumber tersebut ditentukan oleh jenis dan kandungan bahan organik, serta kondisi lingkungan, diantaranya kandungan air, temperature dan aerasi. Oleh sebab itu, untuk mengurangi laju emisi kedua jenis gas tersebut, perlu dilakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk meminimalkan emisi CO₂, hindari penggunaan bahan organik seperti kompos dan pupuk kandang secara berlebihan.
2. Mengolah kotoran ternak dan bahan organik lain menjadi biochar sebelum di aplikasikan ke tanah.
3. Mengurangi intensitas penanaman pada lahan sawah, karena makin tinggi intensitas pananaman akan menyebabkan peningkatan emisi gas metan (CH₄) ke udara.
4. Mengurangi pemakaian pupuk nitrogen secara berlebihan, atau memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman, guna menghindari pembentukan gas metan dari kelebihan pupuk.
5. Memberikan penyuluhan kepada petani dan peternak tentang upaya mitigasi emisi CO₂ dan CH₄, sehingga tercipta pertanian dan peternakan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

3. Indeks Kualitas Lahan

Ruang Terbuka Hijau di kota merupakan ruang-ruang terbuka (*open space*) di berbagai tempat di suatu wilayah kota yang secara optimal digunakan sebagai daerah penghijauan dan berfungsi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kelestarian dan keindahan lingkungan (Nurisjah, 1996). Adanya berbagai macam jenis vegetasi sebagai elemen pembentuk ruang terbuka hijau kota akan berperan penting dan efektif dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan antara lain pereduksi polusi, meminimalkan erosi dan longsor, ameliorasi iklim, penyerap air tanah dan keindahan alami kota (Nurisjah, 2007). Merujuk dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/ PRT/M/2008, RTH Publik di suatu Kota memiliki total luasan minimal 20% dari total luas wilayah. RTH Publik tersebut terdiri dari RTH Taman dan Hutan Kota, RTH Jalur Hijau Jalan, dan RTH Fungsi Tertentu (Sempadan Rel Kereta Api, Jalur SUTET, Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Pemakaman Mata Air, Pemakaman). Berdasarkan klasifikasi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup, secara spesifik di bawah Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan

Lingkungan Hidup (BP2LH), bertanggung jawab dalam pengelolaan RTH Taman dan Jalur Hijau Jalan di Kota Padang.

Saat ini, DLH mengelola 12 (Dua Belas) lokasi RTH Taman dengan total luasan 58.218 m², RTH Jalur Hijau Jalan (JHJ) seluas 77.423,5 m², dan 13 (Tiga Belas) lokasi RTH Taman Pedestrian seluas 2.755 m². Lokasi RTH Taman tersebar di 6 Kecamatan yakni di Kecamatan Padang Utara (Taman Digital); Kecamatan Padang Selatan (RTH Imam Bonjol, Taman Kapal Siti Nurbaya, dan Taman Batang Arau); Kecamatan Padang Barat (Taman Naval Komodo, Taman Muaro Lasak, Taman DIPO, Taman Joeng Sumatera, Taman Rimbo Kaluang), Kecamatan Padang Timur (Taman Jati Gaung Taman Tan Malaka, dan Taman Sisingamangaraja), dan Kecamatan Nanggalo (Taman Nanggalo) (Gambar 1). Adapun RTH paling luas berada di RTH Imam Bonjol yang berada di Kecamatan Padang Selatan dengan luasan 45.000 m². Dari kedua belas taman, 7 (tujuh) diantaranya adalah Taman Aktif dan hanya 5 Taman yang didukung dengan fasilitas permainan Anak. Taman-taman tersebut adalah Taman Rimbo Kaluang, Taman Tan Malaka, Taman Jati Gaung, RTH Imam Bonjol, dan Taman Nanggalo.

Gambar 3.A.5.32
Taman-taman yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup





Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani

Pada indikator ini, capaian tahun 2024 adalah sebesar 100,8% sedangkan pada tahun 2023 adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian tahun 2024 mengalami penurunan secara persentase tetapi dikarenakan merupakan sisa pencapaian pengurangan tahun akhir. Hal ini dikarenakan target luasan pada tahun 2020 hanya 5% dari total luasan Kawasan kumuh yaitu 6,12 Ha dan realisasi adalah 10,29 Ha. Pada tahun 2021 target penanganan yaitu 34,76 Ha dan realisasi adalah 39,68 Ha atau bertambah 29,39 Ha dari capaian tahun 2020. Pada tahun 2022 target penanganan yaitu 63,95 Ha dan tercapai 100% dengan realisasi sebesar 63,95 Ha atau bertambah 24,27 Ha dari capaian tahun 2021. Pada tahun 2023 target penanganan yaitu 83,95 Ha dan tercapai 100,8% dengan realisasi

sebesar 84,62 Ha atau bertambah 20,67 Ha dari capaian tahun 2022. Sementara pada tahun 2024 target penanganan yaitu 122,33 Ha dan tercapai 100% dengan realisasi sebesar 122,33 Ha atau bertambah 37,71 Ha dari capaian tahun 2023.

Adapun Rekapitulasi luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani di Kota Padang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 3.A.5.33
Rekapitulasi luas Kawasan permukiman kumuh yang ditangani di Kota Padang



PEMERINTAH KOTA PADANG
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Jalan Jend. Sudirman No. 4A Telp. (0751) 26633 Fax (0751) 38119 Padang 25128
laman: www.perkim.padang.go.id/

**REKAPITULASI LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG
DITANGANI DI KOTA PADANG**

Jumlah Luas Permukiman Kumuh < 10 Ha	107,96 Ha	SK No. 163 Tahun 2014	SK Kumuh Lama (2014-2019)
	122,33 Ha	SK No. 519 Tahun 2020	SK Kumuh Baru (2020-2024)
	230,29 Ha	Luas Gabungan SK 2014 dan SK 2020	

Jumlah Luas Permukiman Kumuh Tertangani	107,96 Ha	SK No. 163 Tahun 2014	Data KOTAKU
	10,89 Ha	SK No. 519 Tahun 2020	Tahun 2020
	28,79 Ha	SK No. 519 Tahun 2020	Tahun 2021
	24,27 Ha	SK No. 519 Tahun 2020	Tahun 2022
	20,67 Ha	SK No. 519 Tahun 2020	Tahun 2023
	37,71 Ha	SK No. 519 Tahun 2020	Tahun 2024
	230,29 Ha	Luas Gabungan Penanganan SK 2014 dan SK 2020 (sampai dengan Tahun 2024)	

Dari daftar rekapitulasi diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk periode 2014-2019, luas permukiman kumuh di kota Padang adalah 107,96 Ha, dengan capaian tertangani 100 %. Sisanya untuk periode 2020 – 2024, Luas Permukiman Kumuh yang harus ditangani adalah sebesar 122,33 Ha. Capaian sampai dengan tahun 2024 adalah 122,33 Ha. Sehingga luasan kawasan kumuh sudah selesai ditangani pada tahun 2024, sesuai SK periode 2020-2024 tersebut.

Capaian indikator kinerja sasaran ini diukur dengan dengan formulasi: **Luas Kawasan Kumuh Yang ditangani Tahun n**. Pencapaian luas kawasan kumuh 122,62

Ha tersebut merupakan akumulasi dari investasi pelaksanaan fisik infrastruktur (jalan, drainase, persampahan, dan peningkatan sarana air bersih dan air limbah seperti peningkatan kualitas akses jaringan air bersih dan sanitasi aman) yang telah dilakukan sebagai berikut :

Tabel 3.A.5.7
Luas Kawasan Kumuh Yang ditangani Tahun 2024

No	Nama Kelurahan	Lokasi Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tahun	Skala Pelayanan Kota/Perkotaan/Kawasan/Lingkungan	Sub Komponen Kegiatan	Detail Sub Komponen Kegiatan	Volume Kegiatan	Satuan	Sumber Dana
1	Bungus Timur	RT002-RW007	MCK (DAK)	2022	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	25	Unit/KK	DAK
2	Bungus Timur	RT004-RW006	MCK (DAK)	2023	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	29	Unit/KK	DAK
3	Bungus Timur	RT004-RW006	S.Bor/Resouwer/J.PIPA/SR	2022	Lingkungan	Air Bersih	S.Bor/Resouwer/J.PIPA/SR	29	KK	APBD Kota
4	Bungus Timur	RT002-RW007	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	APBD Kota
5	Bungus Timur	RT004-RW006	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	5	Unit	APBD Kota
6	Bungus Barat	RT001-RW003	Air Bersih	2022	Lingkungan	Air Bersih	S.Bor/Resouwer/J.PIPA/SR	6	KK	APBD Kota
7	Bungus Barat	RT001-RW001	Air Bersih	2022	Lingkungan	Air Bersih	S.Bor/Resouwer/J.PIPA/SR	4	KK	APBD Kota
8	Bungus Barat	RT002-RW003	Air Bersih	2022	Lingkungan	Air Bersih	S.Bor/Resouwer/J.PIPA/SR	2	KK	APBD Kota
9	Bungus Barat	RT001-RW003	Jalan Beton	2022	Lingkungan	Jalan	Jalan Beton	300	M	APBN Kotaku
10	Bungus Barat	RT002-RW003	Jalan Beton	2022	Lingkungan	Jalan	Jalan Beton	200	M	APBN Kotaku
11	Bungus Barat	RT001-RW003	Drainase	2022	Lingkungan	Drainase	Drainase Lingkungan	273	M	APBN Kotaku
12	Bungus Barat	RT002-RW003	Drainase	2022	Lingkungan	Drainase	Drainase Lingkungan	135	M	APBN Kotaku
13	Bungus Barat	RW001	Bentor	2022	Lingkungan	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	1	Unit	Swadaya
14	Bungus Barat	RW003	Bentor	2022	Lingkungan	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	1	Unit	Swadaya
15	Balai Gadang	RT003-RW010	Air Bersih	2022	Lingkungan	Air Bersih	S.Bor/Resouwer/J.PIPA/SR	7	KK	DAK
16	Balai Gadang	RT003-RW012	Air Bersih	2022	Lingkungan	Air Bersih	S.Bor/Resouwer/J.PIPA/SR	68	KK	DAK
17	Balai Gadang	RT003-RW010	Drainase	2022	Lingkungan	Drainase	Drainase Lingkungan	150	Meter	APBD Kota
18	Balai Gadang	RT003-RW012	Drainase	2023	Lingkungan	Drainase	Drainase Lingkungan	150	Meter	APBD Kota
19	Balai Gadang	RW010 - RW12	PAMSIMAS (APBD)	2022	Lingkungan	Air Bersih	Resouwer/J.PIPA/SR	1	Unit	APBD Kota
20	Balai Gadang	RT003-RW010	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	6	Unit	APBD Prov
21	Batipuh Panjang	RT004-RW004	MCK (DAK)	2022	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	19	Unit	DAK
22	Batipuh Panjang	RT003-RW004	MCK (DAK)	2022	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	24	Unit	DAK
23	Batipuh Panjang	RT004-RW004	Drainase	2022	Lingkungan	Drainase	Drainase Lingkungan	200	Meter	APBD Kota
24	Batipuh Panjang	RT003-RW004	Drainase	2022	Lingkungan	Drainase	Drainase Lingkungan	200	Meter	APBD Kota
25	Binuang Kampung Dalam	RT002-RW002	MCK (DAK)	2022	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	49	Unit	DAK
26	Binuang Kampung Dalam	RT004-RW002	MCK (DAK)	2023	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	1	Unit	DAK
27	Binuang Kampung Dalam	RT003-RW001	MCK (DAK)	2022	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	50	Unit	DAK
28	Binuang Kampung Dalam	RT001-RW002	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	5	Unit	APBD Prov
29	Binuang Kampung Dalam	RT002-RW002	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	APBD Prov
30	Binuang Kampung Dalam	RT003-RW002	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	APBD Prov
31	Binuang Kampung Dalam	RT004-RW002	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	APBD Prov
32	Binuang Kampung Dalam	RT002-RW001	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	5	Unit	APBD Prov
33	Binuang Kampung Dalam	RT003-RW001	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	5	Unit	APBD Prov
34	Binuang Kampung Dalam	RW001 - RW002	Bentor (Swadaya)	2022	Lingkungan	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	4	Unit	Swadaya
35	Lubuk Begalung Nan XX	RT001-RW003	MCK (DAK)	2022	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	38	Unit/KK	DAK
36	Lubuk Begalung Nan XX	RT002-RW003	MCK (DAK)	2023	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	21	Unit/KK	DAK
37	Lubuk Begalung Nan XX	RT001-RW003	Bentor (Swadaya)	2022	Lingkungan	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	1	Unit	Swadaya
38	Lubuk Begalung Nan XX	RT002-RW003	Bentor (Swadaya)	2022	Lingkungan	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	1	Unit	Swadaya
39	Padang Besi	RT001-RW002	MCK (DAK)	2022	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	57	Unit/KK	DAK
40	Padang Besi	RT001-RW002	PAMSIMAS (APBD)	2022	Lingkungan	Air Bersih	Bor/Resevoir/Jaringan Perpipaan SR	13	KK	APBD Kota
41	Padang Besi	RT001-RW002	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	APBD Kota
42	Bandar Buat	RT006-RW006	MCK (DAK)	2022	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	20	Unit	DAK
43	Bandar Buat	RT006-RW006	Bentor (Swadaya)	2022	Lingkungan	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	1	Unit	Swadaya
44	Banuaran Nan XX	RT003-RW007	MCK (DAK)	2022	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	58	Unit/KK	DAK
45	Tabing Banda Gadang	RT004-RW002	MCK (DAK)	2022	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	14	Unit/KK	DAK
46	Tabing Banda Gadang	RT007-RW003	MCK (DAK)	2022	Lingkungan	MCK	Jamban (closet+bak air+septictank+resapan)	9	Unit/KK	DAK
47	Tabing Banda Gadang	RT002-RW002	Bentor (Swadaya)	2022	Lingkungan	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	1	Unit	Swadaya
48	Tabing Banda Gadang	RT007-RW002	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	APBD Kota
49	Batang Kabung Gantiang	RT002-RW007	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	APBD Kota
50	Batang Kabung Gantiang	RT003-RW007	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	4	Unit	APBD Kota
51	Batang Kabung Gantiang	RT005-RW013	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	APBD Kota
52	Limau Manis	RT002-RW005	Air Bersih	2022	Lingkungan	Air Bersih	Resouwer/J.PIPA/SR	1	Unit	DAK
53	Limau Manis	RT002-RW005	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	APBD Kota
54	Piai Tengah	RT003-RW003	S.Bor/Resouwer/J.PIPA/SR	2022	Lingkungan	Air Bersih	Resouwer/J.PIPA/SR	24	KK	APBD Kota
55	Piai Tengah	RT002-RW003	Drainase	2022	Lingkungan	Drainase	Drainase Lingkungan	300	M	APBD Kota
56	Piai Tengah	RT003-RW003	Drainase	2022	Lingkungan	Drainase	Drainase Lingkungan	100	M	APBD Kota
57	Piai Tengah	RT002-RW003	Bentor (Swadaya)	2022	Lingkungan	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	1	Unit	Swadaya
58	Piai Tengah	RT003-RW003	Bentor (Swadaya)	2022	Lingkungan	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	1	Unit	Swadaya
59	Flamboyan	RW004	Bentor (Swadaya)	2022	Lingkungan	Persampahan	Gerobak/Motor Sampah	2	Unit	Swadaya
60	Ambacang	RT004-RW007	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	APBD Kota
61	Anduring	RT001-RW006	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	1	Unit	APBD Kota
62	Anduring	RT004-RW003	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	2	Unit	APBD Kota
63	Koto Lalang	RT003-RW008	RTLH	2022	Lingkungan	Perumahan	Rehab/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Aladin)	3	Unit	APBD Kota

No.	Kelurahan	Kecamatan	Lokasi Kegiatan	Uraian Kegiatan	Tahun	Skala Pelayanan	Volume Kegiatan	Satuan	Sumber Dana
35	Bungus Timur	Bungus Teluk Kabung	RT002-RW007	Jalan Lingkungan	2023	Lingkungan	258,6	Meter	APBD
36	Bungus Timur	Bungus Teluk Kabung	RT002-RW007	Drainase Lingkungan	2023	Lingkungan	56	Meter	APBD
37	Bungus Timur	Bungus Teluk Kabung	RT002-RW007	MCK	2023	Lingkungan	59	unit/KK	APBD / Hibah
38	Bungus Barat	Bungus Teluk Kabung	RT001-RW003	MCK	2023	Lingkungan	63	unit/KK	APBD / Hibah
39	Batang Kabung Ganting	Koto Tengah	RT002-RW007	MCK	2023	Lingkungan	19	unit/KK	APBD / Hibah
40	Batang Kabung Ganting	Koto Tengah	RT003-RW007	Jalan Lingkungan	2023	Lingkungan	200	Meter	APBD
41	Batang Kabung Ganting	Koto Tengah	RT003-RW007	Drainase Lingkungan	2023	Lingkungan	186,7	Meter	APBD
42	Padang Sarai	Koto Tengah	RT003-RW005	MCK	2023	Lingkungan	12	unit/KK	APBD / Hibah
43	Padang Sarai	Koto Tengah	RT003-RW005	Jalan Lingkungan	2023	Lingkungan	204,29	Meter	APBD
44	Padang Sarai	Koto Tengah	RT003-RW005	Drainase Lingkungan	2023	Lingkungan	156,71	Meter	APBD
45	Koto Lalang	Lubuk Kilangan	RT003-RW006	MCK	2023	Lingkungan	12	unit/KK	APBD / Hibah
46	Pisang	Pauh	RT002-RW002	MCK	2023	Lingkungan	12	unit/KK	APBD / Hibah
47	Bandar Buat	Lubuk Kilangan	RT006-RW006	Jalan Lingkungan	2023	Lingkungan	452,51	Meter	APBD
48	Bandar Buat	Lubuk Kilangan	RT006-RW006	Drainase Lingkungan	2023	Lingkungan	151,37	Meter	APBD
49	Batipuh Panjang	Koto Tengah	RT004-RW004	Jalan Lingkungan	2023	Lingkungan	209,84	Meter	APBD
50	Batipuh Panjang	Koto Tengah	RT004-RW004	Drainase Lingkungan	2023	Lingkungan	123	Meter	APBD
51	Batipuh Panjang	Koto Tengah	RT004-RW004	Perbaikan RTLH	2023	Lingkungan	10	unit/KK	APBD
52	Flamboyan	Padang Barat	RT003-RW004	Jalan Lingkungan	2023	Lingkungan	186,8	Meter	APBD
53	Flamboyan	Padang Barat	RT003-RW004	Drainase Lingkungan	2023	Lingkungan	80	Meter	APBD
54	Anduring	Kuranji	RT003-RW003	Perbaikan RTLH	2023	Lingkungan	3	unit/KK	APBD
55	Pasar Ambacang	Kuranji	RT004-RW007		2023	Lingkungan	1	unit/KK	APBD
56	Padang Besi	Lubuk Kilangan	RT001-RW002	Perbaikan RTLH	2023	Lingkungan	2	unit/KK	APBD
57	Limau Manis	Pauh	RT002-RW005	Perbaikan RTLH	2023	Lingkungan	6	unit/KK	APBD
58	Piai Tengah	Pauh	RT003-RW003	Perbaikan RTLH	2023	Lingkungan		unit/KK	APBD

Adapun hal-hal yang menyebabkan tercapainya indikator ini adalah:

- Percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan fisik yang dilakukan melalui proses tender, diantaranya sebagai berikut :

1. Perbaikan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tengah



2. Pekerjaan Saluran / Drainase / Gorong – Gorong Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tengah



3. Perbaikan dan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah



- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan, diantaranya sebagai berikut :
 1. Melaksanakan monitoring pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh di Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Bungus Teluk Kabung.



Kepala Dinas Perkim Kota Padang didampingi PPTK dan tim dari Bidang Kawasan Permukiman beserta pelaksana dan pengawas dilapangan, melakukan monitoring di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung dan Kelurahan Batang Kabung Ganting Kecamatan Koto Tangah, serta melakukan pengukuran untuk memastikan bahwa lebar dan ketebalan jalan yang dibangun sesuai dengan perencanaan dan dokumen pencairan dana.

2. Melaksanakan monitoring pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Kumuh di Kelurahan Padang Sarai dan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah, serta Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Teluk Kabung.



Kepala Dinas Perkim Kota Padang didampingi PPTK dan Tim Bidang Kawasan Permukiman Kota Padang melakukan peninjauan pekerjaan drainase lingkungan Kawasan Kumuh yang telah selesai 100 % didampingi pelaksana dan pengawas, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan tersebut.

3. Melaksanakan monitoring pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah



Kepala Dinas didampingi PPTK dan Tim dari Bidang Perumahan serta Fasilitator lapangan melakukan monitoring dan pengecekan pekerjaan perbaikan rumah tidak layak huni.

SASARAN STRATEGIS 9 MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)	10,16	9,88	97,24

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesempatan kerja didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 3 meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif serta mencapai tujuan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator pencapaian keberhasilan urusan ketenagakerjaan. Namun perlu digarisbawahi bahwa untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perlu langkah bersama antar stakeholder baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat. Penurunan TPT bukan semata-mata tugas Dinas Tenaga Kerja akan tetapi tugas bersama semua OPD saling bersinergi dalam rangka penurunan TPT. Pengangguran terjadi pada semua sektor seperti perdagangan, industri, perikanan kelautan, pertanian dan sektor lapangan usaha lainnya. TPT juga berkorelasi positif terhadap perekonomian global dan nasional. Dampak pandemi berimplikasi pada banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan bahkan di PHK.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan ketenagakerjaan adalah urusan wajib bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, urusan ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kota Padang dalam rangka menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi berkorelasi terhadap meningkatnya masalah-masalah sosial seperti kriminalitas dan masalah sosial lainnya seperti anak jalan, pengemis dll. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator pencapaian keberhasilan urusan ketenagakerjaan. Namun perlu digarisbawahi bahwa untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perlu langkah bersama antar stakeholder baik Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat. Penurunan TPT bukan semata-mata tugas Dinas Tenaga Kerja akan tetapi tugas bersama semua OPD saling bersinergi dalam rangka penurunan TPT. Pengangguran terjadi pada semua sektor seperti

perdagangan, industri, perikanan kelautan, pertanian dan sektor lapangan usaha lainnya. TPT juga berkorelasi positif terhadap perekonomian global dan nasional. Dampak pandemi berimplikasi pada banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan bahkan di PHK.

Meningkat atau menurunnya kinerja selain dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi nasional dan kondisi ekonomi global juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal tersebut antara lain prioritas pembangunan yang tidak memprioritaskan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi agenda prioritas daerah, alokasi anggaran yang tidak dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan TPT serta belum bersinerginya program kegiatan APBD Daerah dalam mendukung penurunan TPT.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian menargetkan penurunan TPT 2024 dapat ditekan menjadi 10,16%. Realisasi penurunan TPT dapat terealisasi menjadi 9,88%. Artinya target pencapaian penurunan target yang telah ditetapkan atau persentase pencapaian sebesar 97,24%. Untuk lebih menekan TPT perlu sinergitas antar sektor lapangan usaha. Salah satu solusi untuk menekan angka pengangguran adalah untuk menekan angka pengangguran di Kota Padang, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

1. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja

- Pelatihan Vokasi: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri.
- Kerjasama dengan Dunia Usaha: Membangun kerjasama yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja.
- Program Magang: Memperbanyak program magang untuk memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru dan meningkatkan daya saing mereka.

2. Membuka Lapangan Kerja Baru

- Mendukung UMKM: Memberikan kemudahan dan insentif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
- Investasi: Menarik investasi dari dalam dan luar negeri untuk membangun industri baru dan memperluas sektor yang sudah ada.

- Pariwisata: Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama dan pencipta lapangan kerja.
3. Memperkuat Jaringan Informasi Lowongan Kerja
- Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, seperti melalui aplikasi atau portal online.
 - Bursa Kerja: Mengadakan bursa kerja secara berkala untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
 - Kerjasama dengan Media: Memanfaatkan media massa untuk mempublikasikan informasi lowongan kerja.

Pentingnya Kolaborasi

Untuk mencapai keberhasilan dalam menekan angka pengangguran, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran penting dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Namun OPD-OPD maupun stakeholder harus bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan keberhasilan target ini. Selama OPD-OPD dan stakeholder peningkatan keterampilan ketenagakerjaan masih berjalan sendiri-sendiri (parsial) tentunya program-program yang dilaksanakan akan tidak terarah. Adanya sistem pelatihan yang terpadu dengan sistem informasi pasar kerja dan penempatan akan mampu menekan Tingkat Pengangguran Terbuka secara signifikan. Tentunya hal ini tidak hanya menjadi sekadar wacana akan tetapi perlu diwujudkan dalam rangka menurunkan angka TPT ini.

Selain itu ada yang perlu menjadi perhatian dan perlu dilakukan dalam mengatasi pengangguran, sebagai berikut:

1. Memperluas Lapangan Kerja

Cara mengatasi pengangguran pertama adalah dengan memperluas dan memperbanyak lapangan kerja di Indonesia. Dengan meningkatnya lowongan pekerjaan, semakin banyak juga pencari kerja yang akan melamar. Hal ini dapat

meningkatkan peluang para pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Di kota Padang pasca pandemik ini, pergerakan perekonomian sudah mulai menggeliat seperti peningkatan jumlah gerai-gerai café dan usaha industri kecil dan menengah yang tentunya dapat menyerap tenaga kerja. Disamping itu, dengan pelatihan yang diberikan oleh instansi terkait mampu memberikan skill pencari kerja untuk dapat membuka lapangan usaha sendiri. Tidak hanya memperluas lapangan kerja didalam negeri, tetapi diharapkan tersedianya lapangan usaha di luar negeri dengan skill yang dapat diisi oleh pencari kerja di Kota Padang.

2. Menempatkan Pencari Kerja di Tempat yang Tepat

Solusi pengangguran yang satu ini dapat membuat pencari kerja lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan lebih loyal pada perusahaan. Selain itu, pemerataan pekerja di berbagai bagian akan membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan dan pekerja lebih mudah mengerjakan pekerjaan. Hal ini membuat produktivitas pekerja meningkat dan berkurangnya pengangguran. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan kerja. Salah satu tujuan dari kegiatan tersebut adalah bagaimana menempatkan pencari kerja pada tempat yang tepat sesuai dengan skill dan keahliannya.

3. Melatih Para Pencari Kerja untuk Membuat Usaha Sendiri

Cara mengatasi pengangguran berikutnya adalah dengan melatih pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Dengan mengarahkan para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri yang sesuai dengan *passion* mereka, pekerja juga jadi semakin semangat berwirausaha. Dengan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian diharapkan selain untuk mendapatkan penempatan kerja pencari kerja yang dilatih diupayakan agar bisa membuka usaha sendiri.

4. Memberikan Pelatihan Kompetensi ke Pencari Kerja

Solusi pengangguran berikutnya adalah dengan memberikan pelatihan Kompetensi ke pencari kerja. Hal tersebut karena pencari kerja yang memiliki sertifikasi atau keahlian melalui [pelatihan berkompentensi](#) akan memiliki peluang lebih besar untuk

mendapatkan pekerjaan. Semakin banyak orang yang memiliki sertifikat pelatihan, semakin berkurang juga tingkat pengangguran.

Gambar 3.A.5.34
Pelatihan Tata Rias



Gambar 3.A.5.35
Pelatihan Security/Satpam



Gambar 3.A.5.36
Pelatihan Web Programmer



Gambar 3.A.5.37
Pelatihan K3



SASARAN STRATEGIS 10			
MENINGKATNYA TINGKAT PEREKONOMIAN PENDUDUK			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
TINGKAT KEMISKINAN (%)	4,10	4,06	100,1
PDRB PER KAPITA (ADHB) (RP RIBU)	82.040	88.220	107,53

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat perekonomian penduduk ditandai dengan 2 (dua) indikator kinerja tingkat kemiskinan serta indikator kinerja PDRB per kapita (ADHB). Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 3 (meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang

inklusif) serta mencapai tujuan (terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan).

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global.

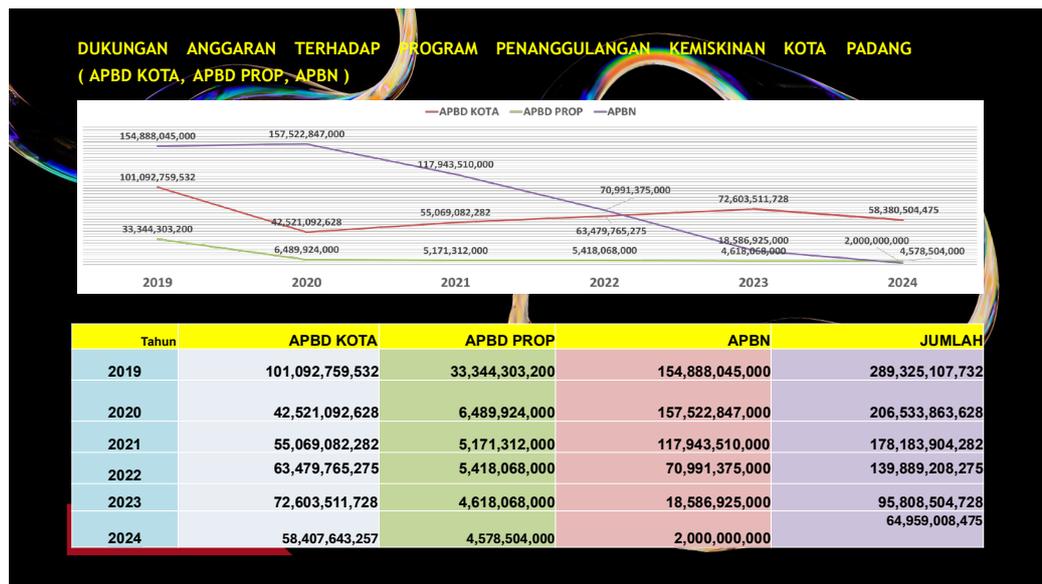
Menurunnya angka kemiskinan Kota Padang pada tahun 2024 ini berdasarkan laporan BPS semakin membuka harapan terhadap prospek pemulihan ekonomi di Kota Padang. Setelah melonjak pada tahun 2021 dari angka 4,4% pada tahun 2020 menjadi 4,94% pada tahun 2021 akibat pandemi, tingkat kemiskinan kembali dapat ditekan ke angka 4,26% pada tahun 2022, kembali turun pada tahun 2023 di angka 4,17% dan pada tahun 2024 angka kemiskinan sebesar 4,06 %. Angka ini menurun 0,11 poin jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2023.

Hal ini bisa dikarenakan pada periode 2023-2024 program Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang sudah berhasil menurunkan jumlah kemiskinan di Kota Padang.

Gambar 3.A.5.38
Dukungan Anggaran Terhadap Program
Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang



No	SKPD	APBD KOTA PADANG
1	2	3
1	RSUD dr. RASIDIN	200,000,000
2	DINAS SOSIAL	9,317,864,341
3	BAGIAN KESRA	190,030,000
4	DINAS KESEHATAN	26,406,072,000
5	DISNAKERIN	309,500,000
6	DINAS PERTANIAN	1,841,233,200
7	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	1,487,396,000
8	DINAS KOPERASI DAN UMKM	7,824,205,716
9	DINAS PENDIDIKAN	4,199,810,000
10	BAGIAN HUKUM	28,287,000
11	DINAS PERKIM	6,450,598,366
12	DINAS PERDAGANGAN	152,646,634
	JUMLAH	58,407,643,257



a. Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)

Pemerintah Kota Padang tetap berkomitmen dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil Walikota Padang. Tim ini beranggotakan sebanyak 13 OPD. Setiap OPD mempunyai peran masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pengentasan kemiskinan. Tim yang dikoordinatori oleh Bappeda secara rutin selalu melaksanakan rapat koordinasi. Dalam rapat selalu dibahas strategi pencapaian masing-masing OPD, kendala dan tantangan serta mencari Solusi dari kendala tersebut.

**Gambar 3.A.5.39
Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan**



Dinas Sosial sebagai salah satu OPD pengampu Program Penanggulangan Kemiskinan, memfokuskan kegiatan untuk pemberian jaminan dan perlindungan sosial melalui pelaksanaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang merupakan basis dari pemberian bantuan sosial, peningkatan kemandirian bagi Fakir Miskin, Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis serta penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

b. Dukungan Pilar-pilar Sosial

Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinas Sosial dibantu oleh pilar-pilar sosial. Pada tahun 2024 tercatat jumlah pilar-pilar sosial sebagai berikut :

**Tabel 3.A.5.8
Pilar-Pilar Sosial Tahun 2024**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	TKSK	11 orang	
2	Pekerja Sosial Masyarakat	312 orang	
3	Taruna Siaga Bencana	154 orang	
4	Pendamping Rehsos	11 orang	
5	Karang Taruna	104 kelurahan	

Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial, perlu didukung oleh tenaga yang memiliki jiwa sosial dan kemampuan dalam menganalisa masalah sosial. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menyikapi hal tersebut, Dinas Sosial secara rutin setiap tahun melaksanakan pembinaan terhadap pilar-pilar sosial. Pembinaan dilakukan bukan hanya untuk pilar sosial perorangan (TKSK, PSM) tapi juga kelompok (Tagana, Karang Taruna), Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS (panti)

Gambar 3.A.5.40
Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat



c. Kerjasama Kementerian Sosial dan Dunia Usaha

Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan social terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Pemerintah Kota Padang menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS).

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing - masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Kenaikan nilai tambah dari masing-masing penduduk diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup dan perekonomian Masyarakat.

Pada Tahun 2023 capaian PDRB per kapita (atas dasar harga berlaku) telah melebihi target yang ditetapkan, pada tahun 2023 PDRB perkapita Kota Padang ditargetkan sebesar 80,23 juta/orang/ tahun Telah tercapai sebesar 84,53 juta/orang/tahun. Untuk Tahun 2024 capaian PDRB perkapita 88,22 juta/orang/tahun juga melebihi angka PDRB perkapita kota Padang Tahun 2023.

Peningkatan PDRB per kapita ini menggambarkan meningkatnya produktifitas rata-rata penduduk di Kota Padang. Peningkatan produktivitas yang berujung pada

peningkatan perekonomian di Kota Padang. Peningkatan perekonomian Kota Padang juga dipengaruhi oleh kestabilan kondisi ekonomi sendiri, ke stabilan iklim usaha serta mulai meningkatnya produksi dan daya saing produk Kota Padang.

SASARAN STRATEGIS 11 MENINGKATNYA INVESTASI			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
PENINGKATAN NILAI PMA (US \$)	\$ 17.123.288	15.007.995	87,65
PENINGKATAN NILAI PMDN	750.000	3.425.496,8	527

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya investasi ditandai dengan 2 (dua) indikator kinerja peningkatan nilai PMA dan indikator kinerja nilai PMDN. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 3 meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif serta mencapai tujuan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Capaian Target Kinerja Tahun 2023 untuk Jumlah Nilai PMA tercapai 234,7 % dari target yang telah ditetapkan, adapun target sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Dinas adalah US\$ 17. 123.288. Capaian PMA untuk Kota Padang disumbangkan dari penambahan realisasi PMA PT. Padang Raya Cakrawala dan Penambahan Konstruksi pada Lantai VI Rumah Sakit Hermina. Untuk PMDN tercapai 54,31 % kurang dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian target ini merupakan realisasi capaian kinerja pada triwulan III, dikarenakan belum adanya release secara resmi dari BKPM RI.

Tahun 2023 untuk non perizinan DPMPTSP Kota Padang guna meningkatkan layanan non perizinan sudah menggunakan Sistem Informasi Non Perizinan (SINOPEN). Pada tahun 2023 DPMPTSP melalui penilaian layanan publik oleh Kemenpan RB DPMPTSP semula nilai B naik menjadi A- sedangkan untuk penilaian pelayanan publik dari OMBUDSMAN Tahun 2023 dengan predikat hijau.

Beberapa permasalahan penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah :

- 1. Pemahaman OPD Teknis mengenai penggunaan akun pengawasan pada aplikasi OSS.**

Dinas Teknis belum memahami ketentuan/ regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko per sektor perizinannya setelah menerima hak akses, mengingat ketika hak akses dari pengelola hak akses sudah diturunkan ke Dinas Teknis, maka Dinas Teknis wajib melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha yang telah diterbitkan sesuai dengan kewenangannya setelah pelaku usaha memperoleh NIB, sertifikat standar atau izin. Harapannya, DPMPTSP dan Dinas teknis selalu bersinergi dalam melakukan pengawasan perizinan berusaha karena ini merupakan komitmen Bersama.

2. Tingkat Kepatuhan/Kesadaran Pelaku Usaha untuk menyampaikan LKPM masih rendah.

Kesadaran pelaku usaha dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal. Berdasarkan Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah dijabarkan secara teknis melalui Pasal 7 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) salah satu kewajiban pelaku usaha adalah penyampaian Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah, pemerintah daerah mesti melakukan pemantauan kepada pelaku usaha, pembinaan kepada pelaku usaha, dan pengawasan kepada pelaku usaha. Pengawasan terintegrasi oleh tim yang terpadu tentu menjadi sebuah keniscayaan. Strategi pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang efektif perlu dilakukan sehingga pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah dapat terwujud.

Masih rendahnya pengetahuan investor (PMA/PMDN) mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di Kota Padang termasuk di dalamnya mengetahui secara jelas akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penanam modal. Sebagian besar perusahaan PMA/PMDN di Kota Padang masih belum menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM kepada DPM & PTSP;

Perusahaan PMA/PMDN sebagian besar belum dapat mengisi LKPM dengan baik dan benar. Hal ini akan mempengaruhi informasi nilai realisasi investasi yang

disampaikan sehingga diperlukan waktu dalam proses validasi melalui konfirmasi ulang kepada perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan masih belum tertib dalam waktu menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan sebagaimana yang telah ditentukan;

Pada Tahun 2023, ini berdasarkan data hasil pengawasan kepatuhan pelaporan LKPM, dari 188 perusahaan yang dilakukan pengawasan hanya 44 perusahaan yang sudah melaporkan LKPM atau 15,43% dari total perusahaan yang diawasi.

3. Belum Maksimalnya Pelaksanaan Promosi Peluang Investasi

Strategi promosi investasi atau penanaman modal daerah. Bahwa penentuan fokus strategi sektor unggulan saja tidaklah cukup. Penyusunan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada *market* belum tersedia, promosi investasi yang dilakukan masih sangat terbatas, *Feasibility Study* yang ada untuk Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang, Ex Dinas Kesehatan Kota, Gedung Bagindo Azizchan (saat ini sudah digunakan untuk YouthCenter Kota Padang) dan Kawasan pantai Pasir Jambak, itupun tidak dilengkapi dengan data atau informasi utama yang utuh sekaitan ketersediaan atau kepemilikan lahan, kendala lahan masih menjadi persoalan klasik yang menggurkan Upaya promosi investasi daerah dan sebagainya.

Promosi Peluang Investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan minat investor masuk ke kota Padang. Untuk itu DPMPTSP Kota Padang perlu melakukan promosi peluang investasi bukan hanya di Kota Padang akan tetapi juga di luar Kota Padang baik nasional maupun internasional. Promosi yang dilakukan masih sangat terbatas hal ini disebabkan terbatasnya anggaran untuk melakukan promosi juga terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten terkait promosi daerah.

4. Pemerintah Kota Padang belum memiliki peta potensi investasi dan rencana umum/*masterplan* investasi

Ketersediaan data base yang komprehensif, akurat dan terbaru untuk penanaman modal di Kota Padang. Bahwa data potensi investasi di Kota Padang

belum tersedia secara utuh. Penyediaan data yang tepat dan akurat terkait sektor unggulan akan sangat mempermudah investor untuk melihat secara utuh potensi daerah yang dapat dikelola. Ketiadaan data yang memadai dapat melahirkan citra bahwa pemerintah kota kurang transparansi dalam penyediaan informasi fasilitasi layanan investasi daerah.

5. Perubahan/penyesuaian produk hukum daerah pasca pelaksanaan UU cipta kerja dan peraturan teknis pelaksanaannya belum terlaksana secara menyeluruh

Ketersediaan regulasi daerah yang mendukung atmosfer investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan terpadu. Perubahan besar regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan Menteri menuntut penyesuaian dan perubahan yang signifikan juga pada tataran produk hukum daerah. Hal tersebut tentunya dalam menunjang pelaksanaan kemudahan iklim investasi dan perizinan yang ramah kepada publik. Sejak undang-undang cipta kerja diberlakukan, Pemerintah Kota Padang baru melakukan penyesuaian aturan dalam bentuk tiga peraturan wali kota. Peraturan dalam rangka penguatan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggaran urusan penanaman modal pastinya juga dibutuhkan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Memaksimalkan tim kerja melakukan pengawasan ke pelaku usaha dengan mengabaikan target awal dari BKPM.
2. Meningkatkan kompetensi pelaku usaha melalui:
 - a. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai LKPM.
 - b. Pemberitahuan melalui media massa terkait sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Pelaporan LKPM dapat dipenuhi oleh pelaku usaha secara daring melalui OSS Berbasis Risiko
3. Memaksimalkan digitalisasi melalui:
 - a. Memberdayakan tenaga IT dan merekrut tenaga ahli untuk menyiapkan konsep promosi investasi secara digital.
 - b. Memaksimalkan kanal-kanal digital seperti media sosial, media pemberitaan online untuk kebutuhan promosi.
 4. Menyiapkan anggaran dan sub kegiatan untuk penyusunan peta potensi pada Tahun 2024.
 5. Memaksimalkan rapat koordinasi teknis dengan perangkat daerah untuk penyelesaian persoalan layanan perizinan berusaha.

Gambar 3.A.5.41

Pendampingan Pengawasan bersama BKPM RI ke PT. Abasiat Raya



Gambar 3.A.5.42

Pendampingan Pengawasan bersama BKPM RI ke PT. Padang Raya Cakrawala



Selain melakukan monitoring, dan evaluasi kepada pelaku usaha, DPMPSTP juga melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai OSS dan pengisian LKPM bagi pelaku usaha. Sosialisasi dan bimbingan teknis ini bertujuan untuk mencapai target peningkatan realisasi investasi daerah. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha, lembaga pemerintah

dan lembaga sosial kemasyarakatan difasilitasi dalam suatu forum untuk saling berbagi (sharing) informasi berkaitan dengan iklim investasi di Kota Padang. Para pelaku usaha dalam kesempatan tersebut diberi penjelasan tentang regulasi penanaman modal, kemudahan berusaha (insentif) dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Dimana masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan iklim investasi di Kota Padang.

Pelaku usaha dapat berkonsultasi mengenai pembuatan NIB melalui OSS dan akan dibantu untuk proses registrasinya. DPMPSTSP juga menyediakan klinik LKPM dengan di pandu oleh help desk bagi pelaku usaha yang belum mengetahui cara dalam pengisian LKPM.

Gambar 3.A.5.43
Konsultasi LKPM



Gambar 3.A.5.44
Bimbingan Teknis dengan Pelaku Usaha

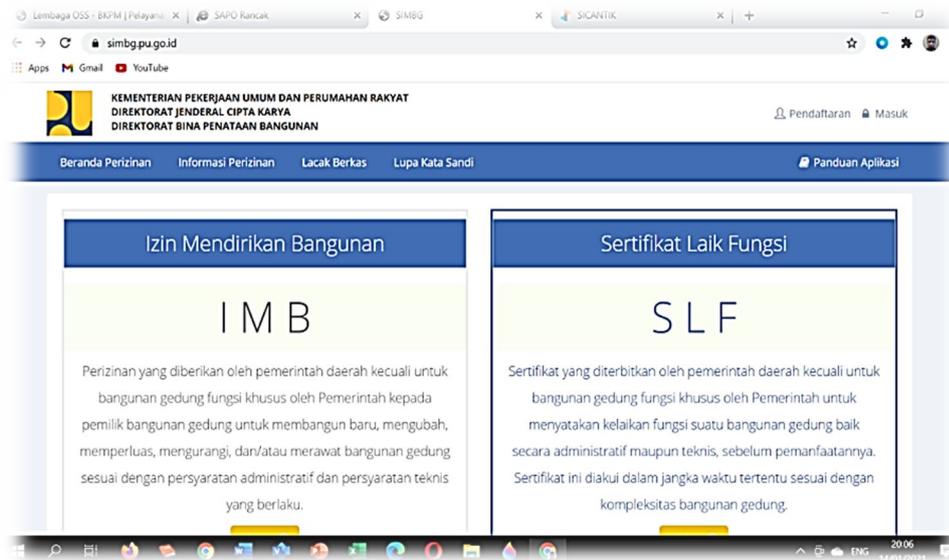


Untuk mendukung tercapainya target perizinan penanaman modal maka aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) DPMPSTSP adalah secara online, terdiri dari Online Single Submission (OSS), Sapo Rancak, SIMBG dan Sicanik Cloud, tahun 2023 untuk layanan non perizinan sudah dilakukan melalui aplikasi SINOPEN. Sehingga pelayanan perizinan di DPMPSTSP menjadi lebih mudah dan cepat diakses oleh pemohon (pelaku usaha) melalui aplikasi bagi yang mampu menguasai teknologi informasi.

Gambar 3.A.5.45
Aplikasi Perizinan OSS



Gambar 3.A.5.46
Aplikasi Perizinan SIMBG



Gambar 3.A.5.47
Aplikasi SINOPEN



Dalam upaya mempersiapkan SDM yang berkompetensi dan berkualitas dalam pelayanan perizinan, DPMPSTP Kota Padang melaksanakan program dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan tersebut bersifat rutin setiap tahun dalam upaya meningkatkan keahlian aparatur dalam penguasaan teknologi informasi yang sekiranya dapat membantu pelayanan perizinan seperti OSS. Dasar pertimbangan pelaksanaan kegiatan karena masih banyak tenaga pelayan DPMPSTP yang belum menguasai penggunaan OSS, begitu juga dengan aplikasi lainnya seperti Sapo Rancak.

Gambar 3.A.5.48
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



SASARAN STRATEGIS 12			
MENJADIKAN SEKTOR PERDAGANGAN SEBAGAI PENGGERAK UTAMA PEREKONOMIAN			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB (%)	17,75	17,52	98,15

Pencapaian sasaran strategis menjadikan sektor perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 4 mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif serta mencapai tujuan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat.

Meskipun beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama dalam menghadapi Inflasi, namun segenap hambatan tetap ditemukan di lapangan. Beberapa hambatan tersebut diantaranya:

1. Berkurangnya komoditi export Kota Padang ke negara tujuan seperti ekspor manggis dari Kota Padang , dikarenakan petani manggis sudah 2 (dua) tahun gagal panen untuk buah-buahan kualitas ekspor. Masalah yang dihadapi dalam budidaya manggis adalah sangat lambatnya laju pertumbuhan tanaman akibat kurang baiknya sistem perakaran, rendahnya kapasitas daun manggis menangkap karbon (CO₂), serta rendahnya kualitas buah. Rendahnya kualitas buah manggis disebabkan oleh adanya beberapa faktor antara lain penanganan prapanen dan pascapanen yang kurang tepat, terutama yang predominan adalah adanya getah kuning pada buah. Meskipun demikian ditemukan pula gejala-gejala keretakan kulit buah dan pembeningan (trans lu cent) daging buah di samping pengerasan kulit dan terdapatnya getah pada daging buah. Jika getah kuning tersebut masuk ke dalam daging buah maka daging buah

menjadi bening/transparan dan terasa pahit, Getah kuning juga seringkali didapatkan sebagai bintik kuning pada kulit buah yang mempengaruhi kualitas buah khususnya mempengaruhi penampilan buah, keluarnya getah kuning pada buah sebenarnya merupakan kelainan fisiologis, yang dapat disebabkan oleh hujan lebat yang terus menerus dan juga oleh terik sinar matahari. Selain itu tungau dapat menyebabkan kerusakan pada buah yang ditandai oleh bekas tusukan kecil maupun goresan.



- Adanya kenaikan beberapa harga bahan kebutuhan pokok menjelang natal dan tahun baru.

Tabel 3.A.5.9
Kenaikan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru

1	BERAS	OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.1	Medium													
	Beras Cap Ir Muaro Labuh	Rp/kg	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	17.714	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
1.2	Premium													
	Beras Cap Ir 42 Padang	Rp/kg	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	15.929	15.500	15.750	16.000	16.000	16.000	
	Beras Kuriak Kusuik	Rp/kg	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	17.643	17.000	17.000	17.000	17.000	17.200	
1.4	Beras Indikasi Geografis													
	Beras Cap Anak Daro	Rp/kg	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	Bera Cap Cisokan Solok	Rp/kg	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.214	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
3	Cabai													
3.1	CM Keriting (lokal)	Rp/kg	25.667	26.857	31.000	28.000	25.286	26.286	25.429	24.444	25.000	28.857	34.286	45.400
3.2	CM Keriting (Luar Sumbar)	Rp/kg	28.000	28.286	32.333	31.111	26.571	28.000	26.286	26.000	26.000	28.857	34.286	46.600
3.3	Cabai Hijau	Rp/kg	20.000	19.429	18.000	22.889	22.857	22.000	20.000	21.556	23.667	26.000	29.429	30.400

3.4	C Rawit Merah	Rp/kg	44.500	57.143	62.833	48.889	40.000	50.000	46.571	35.111	30.333	30.571	39.714	51.200
3.5	C Rawit Hijau	Rp/kg	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000	28.571	23.714	27.333	33.333	37.714	43.000	45.400
4	Bawang Merah													
4.1	Bawang Merah Super	Rp/kg	30.000	32.000	32.000	32.000	33.714	36.000	36.000	36.000	34.333	34.000	34.571	37.800
4.2	Bawang Merah Biasa	Rp/kg	28.000	28.000	28.000	28.000	29.714	34.000	34.000	34.000	30.667	30.000	31.143	35.000
4.3	Bawang Merah Pecking	Rp/kg	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.286	24.857	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Bapak Hasil Industri			-	-										
5	Gula Pasir													
6	Minyak Goreng													
6.1	Curah	Rp/L	15.300	15.300	15.675	16.100	16.393	16.843	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.2	Premium	Rp/L	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.571	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Bapak hasil peternakan dan perikanan														
8	Daging Ayam Ras	Rp/kg	40.579	40.579	40.579	41.867	43.478	43.478	42.857	42.028	42.028	43.271	43.478	44.637
9	Telur Ayam Ras	Rp/kg	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.657	28.800
10	Daging Sapi													
10.3	Tetelan	Rp/kg	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10.4	Daging Beku Kerbau	Rp/kg	0		#DIV/0!	#DIV/0!								
11	Ikan Segar													
11.1	Ikan Kembung	Rp/kg	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11.2	Tongkol	Rp/kg	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11.3	Tuna (sisik)	Rp/kg	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.4	Ikan Tawar (Nila)	Rp/kg	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Bapak Lainnya			-	-										
16	Bawang Putih Honan	Rp/kg	36.000	36.000	37.333	38.000	38.000	38.000	38.571	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Bawang Bombay	Rp/kg	30.000	30.000	30.000	29.111	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
18	Jahe Lokal	Rp/kg	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19	Tomat	Rp/kg	6.000	7.857	8.000	10.000	14.571	16.000	16.000	16.667	17.000	15.000	12.571	11.600
20	Ketimun	Rp/kg	8.000	8.000	8.000	9.556	10.857	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	10.571	10.000
21	Sawi Hijau	Rp/kg	8.000	6.000	6.000	6.444	7.000	7.286	8.000	11.667	15.000	14.571	12.571	11.700
22	Kangkung	Rp/kg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Wortel	Rp/kg	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.143	12.000	12.000	12.000	10.571	10.000
24	Kacang Panjang	Rp/kg	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
25	Kentang	Rp/kg	18.000	14.571	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	13.167	13.000	13.000	13.100
28	Jagung Pipilan	Rp/kg	0											
37	Telur Itik	Rp/kg	42.000	42.000	41.533	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600	41.400	42.000	42.000

3. Masih minimnya pemahaman pelaku usaha (UKM) Kota Padang tentang ekspor seperti masalah legalitas, standarisasi produk dan informasi pelaku usaha (UKM) terhadap peluang pasar luar negeri.

Agar hambatan ini tidak terlalu mengganggu program kegiatan Pemerintah Kota Padang, maka dilakukan beberapa usaha sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kembali terhadap barang-barang export seperti budidaya buah manggis yang siap untuk ekspor, memberikan kembali pelatihan, sosialisasi tentang tanaman manggis dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Dinas Pertanian, tim ahli pertanian dari universitas dan Disperindag Provinsi dalam hal pelepasan ekspor Kota Padang. Selain sosialisasi bagaimana menghasilkan buah manggis yang siap ekspor juga bagaimana membuat produk turunan dari manggis, sehingga buah manggis yang sisa ekspor bisa dibuat produk olahan seperti sirup, permen dan lain sebagainya.

Gambar 3.A.5.49
Sosialisasi Ekspor dan Produk Turunan Manggis



2. Melakukan pengawasan dan monitoring langsung ke distributor, pasar modern dan pasar-pasar rakyat untuk melihat dan memastikan ketersediaan stok sembako cukup dipasaran dan melakukan sosialisasi atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 tahun 2022 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan.

Gambar 3.A.5.50
Pengawasan dan Monitoring ke Pasar



3. Melakukan kegiatan pasar murah untuk menekan kenaikan beberapa harga bahan pokok terutama kenaikan harga minyak goreng, yang bekerjasama
4. dengan Kementrian dan para Distributor minyak. Juga mengikutsertakan kecamatan dalam pelaksanaan pasar murah.

Gambar 3.A.5.51
Pasar Murah Di Kecamatan



5. Melakukan pelatihan kepada pelaku usaha tentang bagaimana memulai ekspor. Untuk peningkatan pengetahuan para pelaku usaha ekspor, dinas Perdagangan Kota Padang melakukan Bimtek yang bekerjasama dengan Kementrian Perdagangan pusat pelatihan ekspor dan jasa perdagangan (PPEJP) setiap tahunnya dengan 30 peserta metode cost sharing.

Gambar 3.A.5.52
Pelatihan Kepada Pelaku Usaha Tentang Bagaimana Memulai Ekspor



SASARAN STRATEGIS 13 MENJADIKAN KOTA PADANG SEBAGAI PUSAT EKONOMI KREATIF			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
PERTUMBUHAN PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF (E KRAF)	10,50	11,81	112,47%

Pencapaian keberhasilan sasaran strategis menjadikan Kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (e-kraf). Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 4 mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif serta mencapai tujuan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera Barat.

Usaha ekonomi kreatif merupakan sebuah usaha yang berasal dari perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Usaha ekonomi kreatif di Kota Padang memiliki peran meningkatkan perekonomian secara global. Industri kreatif erat hubungannya dengan tingkat kreativitas manusia sebagai sumber daya utama penggerak roda perekonomian.

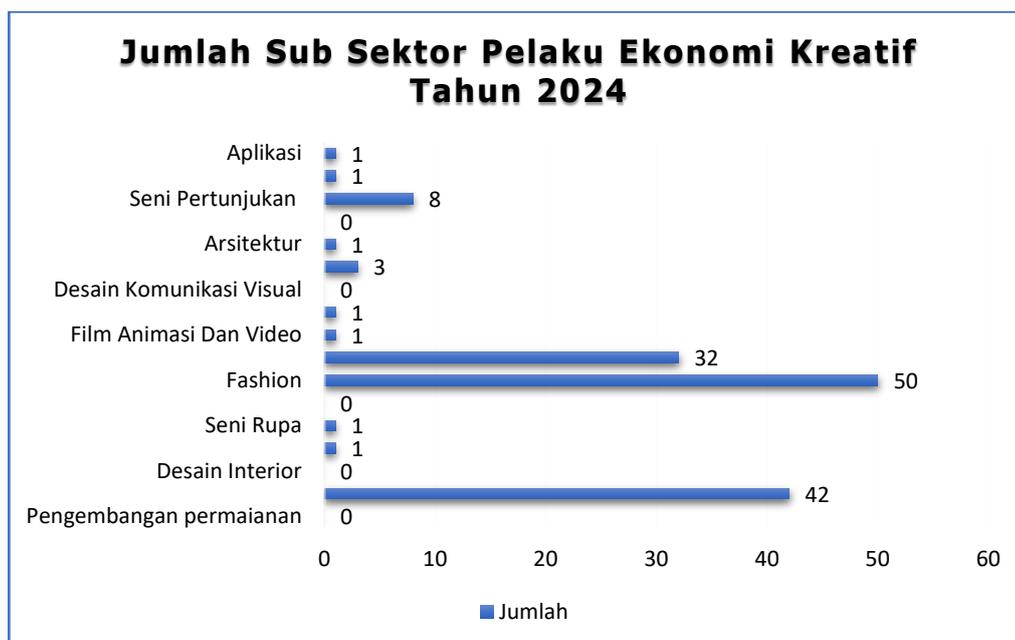
Untuk mendukung kreatifitas para pelaku ekonomi kreatif, Pemerintah pusat telah mengesahkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015, produk-produk ekonomi kreatif diklasifikasikan kedalam 17 subsektor. Rincian ketujuh belas subsektor ekonomi kreatif tersebut adalah sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Arsitektur | 10 Fotografi |
| 2. Desain interior | 11 Kriya |
| 3. Musik | 12 Kuliner |
| 4. Fesyen | 13 Perklanan |
| 5. Aplikasi | 14 Televisi dan radio |
| 6. Desain produk | 15 Seni Pertunjukan |
| 7. Penerbitan | 16 Seni rupa |
| 8. Film, animasi dan video | 17 Desain Komunikasi visual |
| 9. Pengembangan permainan (game) | |

Sasaran menjadikan Kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif mempunyai 1 indikator kinerja yaitu pertumbuhan usaha pelaku ekonomi kreatif dengan capaian kinerja sebesar 67.18%. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No. 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, dimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, sesuai nomenklatur tersebut muncul satu bidang baru pada Dinas Pariwisata yakni Bidang ekonomi kreatif, dan dengan telah diresmikannya gedung Youth Center yang terletak di Jalan Bagindo Aziz Chan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Uno pada bulan 16 September Tahun 2022 sebagai wadah para generasi muda kreatif Kota Padang untuk mengembangkan kreativitasnya, sehingga dengan adanya wadah ini menjadikan Dispar Kota Padang lebih fokus dan terarah dalam membina, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Kreatif yang tersebar pada berbagai sub sektor di Kota Padang.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif Kota Padang Dinas Pariwisata Kota Padang adalah OPD pendukung sasaran strategis menjadikan Kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif dengan indikator kinerja pertumbuhan usaha pelaku ekonomi kreatif. Tahun 2024 Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Parwisata telah melakukan pembinaan terhadap 142 pelaku ekraf yang tersebar dalam beberapa sub sektor ekraf seperti yang tampak pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.A.5.1
Jumlah sub sektor pelaku ekonomi kreatif tahun 2024



Dari tabel diatas tampak bahwa sub sektor ekraf yang berjumlah 17 sub sektor muncul dan berkembang di Kota Padang. Mengacu kepada grafik di atas terlihat bahwa belum semua sub sektor ekraf yang mengalami perkembangan pesat, terdapat 4 sub sektor yang mendominasi yaitu sub sektor Fashion menduduki posisi teratas dengan jumlah sebanyak 50 pelaku, dan diikuti oleh sub sektor Kriya sebanyak 40 pelaku, Kuliner sebanyak 32 pelaku, dan sub sektor Seni Pertunjukan 8 pelaku.

Langkah yang diambil Pemerintah Kota Padang dalam rangka meningkatkan pertumbuhan sektor ekraf sebagai berikut :

- Untuk kelancaran ekonomi kreatif perkembangan inovasi, teknologi, kreativitas serta produk lokal karya pelaku ekonomi kreatif di kota padang. Para pelaku ekonomi kreatif diundang oleh Dinas Pariwisata melalui Bidang Ekonomi Kreatif mengadakan Bimtek Public Speaking yang diadakan pada 19 s.d 21 Juni 2024 digedung Bagindo Aziz Chan Youth Center terhadap 50 orang pelaku ekonomi kreatif. Bimtek tersebut diadakan dengan tujuan memberikan pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif cara memasarkan dan mempromosikan barang dagangannya baik secara online atau offline.
- Memberikan bimbingan teknis pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Atas Intelektual) terhadap 50 orang pelaku ekraf/ kelompok ekraf yang telah mempunyai produk

kemasan dan juga sudah ada merk. Bimtek ini diadakan pada 26 s.d 28 Juni 2024 di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center dengan materi membangun dan melindungi Kekayaan intelektual bagi pelaku ekraf, tata cara dan proses pendaftaran HAKI, Kebijakan pemerintah Prov. Sumbar dalam fasilitasi HAKI bagi pelaku Ekraf, Pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas di Kota Padang, Pentingnya legalitas usaha bagi pelaku ekraf di Kota Padang, Strategi dan optimalisasi pemasaran di era digital. Keberlanjutan dari Bimtek ini adalah Dinas Pariwisata memfasilitasi sejumlah 15 pelaku ekraf untuk memperoleh HAKI produknya.

- Dalam mendorong kreativitas para pelaku ekonomi kreatif agar dapat berinovasi terhadap perkembangan dunia Digital Fotografi melalui Bimtek Fotografi yang diadakan Dinas Pariwisata melalui Bidang Ekonomi kreatif yang dilaksanakan tanggal 29 – 31 Juli 2024 diikuti oleh 25 pelaku ekraf. Dengan outcome kegiatan para pelaku ekraf yang dilatih mampu menghasilkan foto yang memiliki nilai jual yang tinggi dengan Teknik yang di dapat dari hasil bimtek tersebut.
- Bimbingan teknis Musik yang dilaksanakan oleh dinas Pariwisata melalui Bidang Ekonomi Kreatif diadakan pada tanggal 28 – 30 Agustus 2024 di gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center dengan jumlah peserta 50 orang yang berasal dari pelaku pelaku ekonomi kreatif komunitas Musik. Dengan tujuan dapat menunjang kreatifitas komunitas dalam mempelajari teknik musik yang dipaparkan oleh narasumber.
- Kegiatan yang akan di lakukan mengundang berberapa narasumber dan 50 orang peserta, yang berasal dari pelaku ekonomi Kreaktif dalam bidang Fashion Design yang diadakan pada tanggal 18 – 20 September 2024. Kegiatan yang akan dilakukan untuk kelancaran ekonomi kreaktif untuk melatih peserta untuk dapat menjadi platform yang efektif untuk berbagi pengetahuan, mengasah kreativitas dan membangun jaringan di industry fashion.Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para pelaku usaha rintisan dalam bidang fashion termasuk tentang Teknik design trend fashion. Sehingga dapat Mendorong kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha bagi pelaku fahion design. Dan Menciptakan produk fashion yang mempertimbangkan keberlanjutan dan keselamatan lingkungan

- Membangun dan meningkatkan sinergi dengan stakeholder pariwisata. Dalam rangka memupuk silaturahmi antara Dinas Pariwisata Kota Padang dengan stakeholder pariwisata dilaksanakanlah kegiatan Pentahelix. Melalui kegiatan Pentahelix dimana unsur pemerintah, akademisi, usaha jasa pariwisata seperti hotel/ restoran/ biro perjalanan, masyarakat/komunitas dan media bersatu padu dan berkoordinasi guna memajukan dunia kepariwisataan di Kota Padang.
- Menstimulan pelaku ekonomi kreatif melalui peningkatan kreatifitas inovasi dan diversifikasi kualitas produk ekonomi kreatif melalui kegiatan Pekan Ekonomi Kreatif, Promosi Sub Sektor Fashion dan bazar Ekonomi kreatif, kegiatan ini diselenggarakan pada bulan November dan Desember 2024 beretepatan Menyambut libur akhir tahun dengan tujuan banyak masyarakat yang akan menyaksikan event ini. Beberapa Kegiatan ini digelar di beberapa tempat seperti gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Lapangan Apeksi Balai kota dan Pantai Padang Kawasan ini merupakan salah satu destinasi wisata populer di Kota Padang. Festival ini bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata Kota Padang,. Selain itu, festival ini juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
- Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Padang dengan sumber dana pikir yang dilaksanakan tanggal 18 s.d 27 November 2024 bertempat di Royal Asia College diikuti oleh 90 orang peserta, kegiatan yang diselenggarakan yaitu pelatihan frozen food, hantaran, Bakery, cake and Decoration.

Gambar 3.A.5.53
Kegiatan Peningkatan Kualitas dan kompetensi SDM pelaku Ekonomi Kreatif

Pelatihan Public Speaking



Bimbingan Teknis Fotografi



Pelatihan Sub Sektor Musik



Pelatihan Sub Sektor Fashion



Pentahelix



Pekan Ekraf



Promosi Sub Sektor Fashion



Pekan Ekraf Kuranji



Bazar Ekraf



**Pel
atihan**



Hantaran



Pelatihan Frozen food



Pelatihan Cake dan Decoration



Pemakaian Gedung Youth Center sebagai salah satu pusat bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Padang. Melalui aplikasi Si Buyuang merupakan website yang menyediakan pengguna untuk menjelajahi Gedung Bagimdo Aziz Chan Youth Center secara virtual melalui website youthcenter.padang.go.id. Si Buyuang juga memudahkan pelaku ekonomi kreatif untuk dapat meminjam ruangan secara online dan cepat dengan cara membuat akun sebagai pelaku ekonomi kreatif dan komunitas ekonomi kreatif. Berikut jumlah pengunjung Youth Center dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 3.A.5.2
Jumlah Pengunjung Youth Center Tahum 2024



Dari tabel diatas tampak bahwa banyak pengunjung yang datang setiap harinya ke Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center. Mengacu kepada grafik di atas terlihat bahwa terjadi naik turun jumlah pengunjung, terjadi lonjakan yang signifikan pada bulan januari dengan jumlah pengunjung 5073 dan pada bulan Mei sebesar 5114 orang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan turunnya jumlah pengunjung yang datang, seperti faktor cuaca dan libur nasional. Pada pemakaian atau pemanfaatan ruangan yang ada di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center telah disediakan web Si Buyuang dengan tujuan mempermudah pelaku ekonomi kreatif dan komunitas ekonomi kreatif dalam pemanfaatan ruangan. Untuk jumlah peminjaman setiap harinya ada dari beberapa komunitas, seperti komunitas fotografi, seni pertunjukan, seni music, televisi dan radio, kuliner, dan komunitas yang tergabung kedalam 17 sub sektor ekonomi kreatif.

Dalam mencapai target indikator dari sasaran Meningkatnya pertumbuhan pelaku Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Kota Padang telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.309.107.200,- yang bersumber dana dana APBD dan Dana pikir melalui program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Keatif, dan terealisasi sebesar Rp. 2.889.400.516,- atau sebesar 87.32%, sisa anggaran sebesar Rp. 419.706.684 atau 12.68%

merupakan efisiensi anggaran, pembayaran honorarium pelatihan dana dak non fisik mengacu pada juknis kemenparekraf tentang alokasi dana dak non fisik tahun 2024.

SARAN STRATEGIS 14 MEWUJUDKAN KOTA PADANG MENJADI TUJUAN PARIWISATA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA KOTA PADANG TERHADAP PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT	32,50	*29,38	90,41

*Data Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian sasaran strategis mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan pariwisata yang unggul dan berdaya saing didukung dengan 1 (satu) indikator kinerja kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 5 meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan serta mencapai tujuan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase kontribusi pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Prov. Sumatera Barat sebesar 29,38% artinya Sasaran 2 dengan indikaor kinerja Kontribusi Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Prov. Sumatera Barat belum mencapai target yang ditetapkan.

Indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian kinerja sasaran *strategis mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan pariwisata yang unggul dan berdaya saing* adalah kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Capaian dari indikator persentase kontribusi pariwisata Kota Padang terhadap Provinsi. Sumbar dihitung berdasarkan data jumlah kunjungan wisatawan (wisman dan wisnus) ke Kota Padang dibandingkan dengan total jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke 19 kab/ kota ke Sumatera Barat. Realisasi persentase kontribusi pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Provinsi. Sumatera Barat sebesar 26,16% artinya Sasaran dengan indikator kinerja Kontribusi Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai target yang ditetapkan.

Tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Barat berjumlah 17.336.771 orang terlihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.A.5.3
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Sumatera Barat Tahun 2024



Catatan : *data sementara

Dari grafik diatas jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat periode Januari sampai dengan November 2024, terlihat jumlah kunjungan wisatawan terbanyak yaitu pada bulan Januari dengan jumlah 1.772.310 orang. Adapun jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Padang periode Januari s.d November sejumlah 4.536.649 orang, dengan rincian jumlah kunjungan wisatawan.

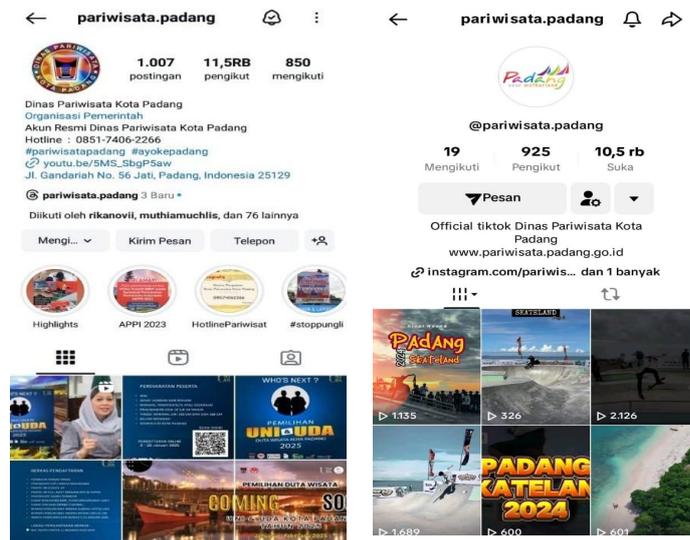
Grafik 3.A.5.4
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Padang Tahun 2024



Dari tabel di atas terlihat jumlah kunjungan wisatawan setiap bulannya, dengan jumlah kunjungan terbanyak pada bulan Oktober sebanyak 856.857 orang. Upaya untuk mencapai target sasaran Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan pariwisata yang unggul dan berdaya saing, yaitu dengan :

- a. Pengembangan pemasaran pariwisata melalui media cetak, elektronik dan media online, langkah yang dilakukan :

Memaksimalkan pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan tiktok



Pembuatan video destinasi pariwisata, jingle pariwisata dan pembuatan aplikasi **sideta** (sistim destinasi wisata). Disamping pemanfaatan media sosial juga menyediakan layanan pengaduan masyarakat hotline 0851-7406-2266 hal ini dibuatguna menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung ketika berwisata di Kota Padang.

- b. Membangun dan meningkatkan sinergi dengan stakeholder pariwisata
 Dalam rangka menjalin silaturahmi antara Dinas Pariwisata Kota Padang dengan stakeholder pariwisata dilaksanakanlah kegiatan Hexahelic. Melalui kegiatan Hexahelic dimana unsur pemerintah, akademisi, usaha jasa pariwisata seperti hotel/restoran/biro perjalanan, masyarakat/komunitas dan media bersatu padu dan berkoordinasi guna memajukan dunia kepariwisataan di Kota Padang.

Gambar 3.A.5.54

Silaturahmi antara Dinas Pariwisata Kota Padang dengan stakeholder pariwisata



c. Pelaksanaan event kepariwisataan

- Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kota Padang, dilaksanakan pada 1 Januari s.d 2 Maret 2024 di ZHM Premiere Hotel Padang

Gambar 3.A.5.55

Pemilihan Uda Uni Duta Wisata Kota Padang tahun 2024



- Festival Muaro Padang, dilaksanakan pada 19 s.d 21 April 2024 di Batang Arau

Gambar 3.A.5.56
Festival Muaro Padang



- Festival Siti Nurbaya Padang, dilaksanakan pada 2 s.d 6 Agustus 2024 di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center dan Kantor Balai Kota Lama

Gambar 3.A.5.57
Festival Siti Nurbaya Padang



- Pawai Telong-Telong, dilaksanakan 4 Agustus 2024

Gambar 3.A.5.58
Pawai Telong-Telong



- Padang Trail Game Adventure, dilaksanakan pada 11 Agustus 2024 di Lubuk Minturun

Gambar 3.A.5.59
Padang Trail Game Adventure



- Event Skatepark, dilaksanakan pada 9 s.d 10 November 2024 di Muaro Lasak

Gambar 3.A.5.60
Event Skatepark



- Event Tactical Challenge Airsoft, dilaksanakan pada 7 s.d 8 Desember 2024 di Ruang Taman Hijau Imam Bonjol

Gambar 3.A.5.61
Event Tactical Challenge Airsoft



- Festival Event Akhir Tahun, dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 22 Desember 2024

Gambar 3.A.5.62
Festival Event Akhir Tahun



e. Penyusunan data kepariwisataan Kota Padang

Penyusunan data kepariwisataan Kota Padang dilaksanakan selama tahun 2024 dengan output satu dokumen buku data statistik pariwisata Kota Padang yang berisikan informasi terpilih kepariwisataan untuk menggambarkan perkembangan dan potensi Kota Padang.

Dalam mencapai target sasaran 2 pada indikator kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata prov. Sumatera Barat. Sumber dana yang tersedia berasal dari dana APBD dan Dana Pokir melalui program pemasaran pariwisata dengan total pagu dana sebesar Rp. 5.776.288.900,- dan realisasi sebesar Rp. 5.144.235.660,- atau sebesar 89.06%. Sisa anggaran sebesar Rp. 632.053.240,- atau 10.94% merupakan efisiensi belanja dan adanya satu pekerjaan berupa pengadaan sampan yang bersumber dari dana pokir yang tidak terlaksana dikarenakan penerima hibah telah menerima hibah dari SKPD lain pada tahun 2023, sehingga tidak mungkin bisa diterima pada tahun yang berturut-turut.

SASARAN STRATEGIS 15 MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN DESTINASI			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
JUMLAH KUNJUNGAN WISATA MANCANEGARA (ORANG)	29.950	191.632	639,83
JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DOMESTIK (ORANG)	3.650.000	5.455.685	149,96
RATA-RATA LAMA TINGGAL WISATAWAN MANCANEGARA (HARI)	1,94	1.93	99,48
RATA-RATA LAMA TINGGAL WISATAWAN DOMESTIC (HARI)	2.5	2.80	112

Tabel 3.A.5.10
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Winus Kota Padang
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah	
	Wisman	Wisnus
2020	21.660	2.562.966
2021	1.538	1.000.270
2022	22.995	2.832.140
2023	455.698	3.702.838
2024	131.085	4.378.762

Berdasarkan tabel diatas tampaklah bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir tingkat kunjungan wisman dan wisnus terendah pada tahun 2021. Faktor terbesar yang mempengaruhi menurunnya kunjungan wisatawan adalah pandemi covid 19 yang menyebabkan intensitas penurunan kunjungan disebabkan adanya regulasi dalam melakukan perjalanan wisata seperti mewajibkan penumpang tes PCR.

Tahun 2023 dunia pariwisata mulai menggeliat kembali pasca 2 tahun adanya pandemi Covid 19, untuk itu Dinas Pariwisata Kota Padang telah melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan dan lama tinggal di Kota Padang, adapun upaya yang dilakukan Dispar Kota Padang pada tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Menjadikan Kota Padang sebagai tempat penyelenggaraan MICE (Meeting, Insentive, Convention, Exhibition)

Sebagai tempat penyelenggaraan MICE berskala lokal dan nasional, Pemerintah Kota Padang tetap berbenah diri dalam menyambut pelaksanaan event di Kota ini dengan mempersiapkan sarana, prasarana dan infrastruktur agar pengunjung merasa betah dan datang kembali mengunjungi Kota Padang. Salah satu event berskala nasional yang digelar yaitu dengan pelaksanaan pertemuan ilmiah nasional (PIN) XII PERHATI-KL dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 26 Oktober 2024 dengan tema “Good ENT Health Care Through Humanity, Professionalism, Colaboration and Technology”. Disamping itu Pertemuan Ilmiah Nasional POI 2024 dilaksanakan pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2024 di ZHM Premiere Padang, dan Pembentukan Pokja KB Kota Padang dilaksanakan pada 6 November 2024.

b. Pembangunan Sarana dan Prasarana di destinasi Wisata

Untuk mempercantik tampilan destinasi wisata, tahun ini telah dilakukan pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana di destinasi wisata yang bersumber seperti :

- i. Revitalisasi Bangunan Pujasera
- ii. Pembangunan Sarana Penunjang Pasar Kuliner Pantai Padang
- iii. Pembangunan Drainase, Gazebo di DTW Pantai Air Manis
- iv. Pembangunan 2 unit Kios di DTW Pantai Air Manis

c. Pengembangan destinasi pariwisata

Dinas pariwisata merupakan pengembangan program unggulan walikota terpilih 2019 -2024 yaitu pengembangan Kawasan Wisata terpadu Gunung Padang, pulau-pulau kecil dan kawasan timur Kota Padang. Untuk mendukung progul ini Dinas Pariwisata telah menyusun dokumen perencanaan yaitu:

1. Penyusunan Masterplan kawasan Pasie Jambak
2. Penyusunan Masterplan Kawasan bungus
3. Penyusunan DED DTW Gunung Padang

d. Inovasi dalam mendukung pariwisata halal

Pariwisata Padang Ramah Muslim (PAPARAMU) merupakan bentuk layanan untuk menarik wisatawan muslim baik lokal maupun internasional. Wisatawan ramah muslim tidak hanya mengedepankan destinasi yang bersih, sehat, aman dan nyaman namun juga menyediakan layanan kemudahan menemukan sarana ibadah,

kuliner bersertifikat halal, oleh-oleh produk halal dan penginapan yang sesuai syariah serta ramah keluarga. PAPARAMU tersebut telah ditetapkan oleh Wali Kota Padang pada Keputusan Wali Kota Padang Nomor 583 Tahun 2022 tentang Pujasera Pantai Padang sebagai Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat.

e. Meningkatkan Sapta Pesona Pada Destinasi wisata

Disamping pembangunan sarana dan prasarana, untuk menciptakan rasa nyaman bagi pengunjung pada destinasi wisata, Dispar Kota Padang bekerjasama dengan instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polresta, dan koramil bersinergi untuk mewujudkan rasa aman bagi pengunjung melalui kegiatan pengamanan terpadu destinasi wisata. Dan untuk menjaga kebersihan pantai agar tampak indah, bersih dan rapi Dispar Kota Padang memiliki 66 orang petugas kebersihan yang tersebar pada titik-titik destinasi wisata unggulan di Kota Padang. Selain pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana pada destinasi wisata juga dilakukan pengamanan dan pengawasan pada objek wisata di Kota Padang guna memberikan kenyamanan dan keamanan pengunjung yang dilaksanakan oleh tim Balawista Dinas Pariwisata Kota Padang.





f. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism)

Community based tourism merupakan aspek penting dalam pengembangan kepariwisataan yang fokus terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam merencanakan dan mengembangkan potensi di destinasi pariwisata. Dengan terlibatnya masyarakat di destinasi wisata secara langsung dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan Dispar Kota Padang adalah melakukan pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kompetensi pengelola Pokdarwis agar lebih profesional dan berkualitas, kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- 1) Pelatihan Peningkatan Inovasi dan Higienitas Sajian Kuliner sebanyak 40 orang, pelatihan ini bertujuan untuk Untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kemampuan para pengelola usaha kuliner dalam melakukan inovasi dan meningkatkan higienitas sajian kuliner
- 2) Kegiatan Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi dan Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata sebanyak 40 orang, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kemampuan para pengelola daya tarik wisata dan desa wisata dalam melaksanakan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di daya tarik wisata dan desa wisata
- 3) Pelatihan Tata Kelola, Bisnis, dan Pemasaran Destinasi Pariwisata sebanyak 40 orang, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi

dan kemampuan para pengelola daya tarik wisata, desa wisata, dan destinasi pariwisata lainnya dalam melakukan tata kelola, bisnis dan pemasaran destinasi

- 4) Pelatihan Pengelolaan Usaha Homestay/ Pondok Wisata sebanyak 40 orang, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kompetensi pengelola usaha homestay/pondok wisata agar lebih profesional dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan
- 5) Pelatihan Pengelolaan Desa Wisata sebanyak 40 orang, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kompetensi pengelola desa wisata agar lebih profesional dan berkualitas dalam melakukan pengelolaan desa wisata dan memberikan pelayanan kepada wisatawan
- 6) Pelatihan Pemasaran Digital sebanyak 40 orang, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kompetensi pengelola destinasi dan daya tarik wisata agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran pariwisata
- 7) Pelatihan Pemandu Balawisata sebanyak 40 orang, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi dan kompetensi para pemandu keselamatan wisata tirta agar dapat memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Pemandu Keselamatan Wisata Tirta

Tabel 3.A.5.11

Nama-Nama Pokdarwis Kota Padang Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KELOMPOK SADAR WISATA	
1.	Padang Barat	1. Berok Nipah	Kampoeng Bernip	
		2. Olo	Pantai Samudera	
		3. Purus	Pantai Purus	
		4. Kampung Pondok	Kota Tua	
2.	Koto Tangah	1. Pasie Nan Tigo	1. Bintang Samudera Pasie Jambak 2. Batang Aie Dingin 3. Ophilbas	
		2. Balai Gadang	1. Baringin Balai Gadang 2. Sungai Bangek 3. Lubuk Lukum	
		3. Batang Kabung Ganting	Salingka Eatang Kabung	
3.	Kuranji	1. Kuranji	Lubuk Tampuruang	
		2. Gunung Sarik	Kampung Adat Rimbo Tarok	
4.	Padang Selatan	1. Air Manis	Air Manis	
		2. Mata Air	Bukit Matoa	
		3. Batang Arau	1. Cagar Budaya Batang Arau 2. Gunung Padang 3. Sejahtera Batang Arau 4. Siti Nurbaya	
			4. Bukit Gado-Gado	Bukit Gado-Gado
			5. Rawang	Bukit Karan
5.	Lubuk Kilangan	Indarung	Gua Kelelawar Padayo Indarung	
6.	Lubuk Begalung	1. Pegambiran Ampalu Nan XX	Pagambiran Ampalu Nan XX (Pesona Gambir)	
		2. Kampung Jua Nan XX	Kampung Wisata Alam Bukit Nobita	
7.	Bungus Teluk Kabung	1. Teluk Kabung Utara	Lubuk Hitam	
		2. Teluk Kabung Selatan	1. Sungai Pisang 2. Kelompok Usaha Bersama Sironjong Island 3. Kampung Wisata Bungus	
			3. Teluk Kabung Tengah	Teluk Buo
8.	Pauh	Lambung Bukit	1. Ekowisata Sungkai <i>Green Park</i> 2. Padang Janiah	
			9.	Nanggalo

Sumber : SK Pokdarwis No 688 tentang Pokdarwis Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS 16 MENINGKATNYA KEMAMPUAN PENANGGULANGAN BENCANA			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
PERSENTASE PENINGKATAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA	5	5	100

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketangguhan kawasan dalam penanggulangan bencana ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kelurahan tangguh bencana. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 6 (menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana serta mencapai tujuan (meningkatkan kapasitas Kota Padang dalam penanggulangan bencana).

Persentase Kelurahan Tangguh Bencana terdapat realisasi capaian sebesar 100%, hal ini terjadi karena pentingnya penambahan jumlah masyarakat yang harus memperoleh sosialisasi kebencanaan membuat pimpinan BPBD Kota Padang mencari jalan lain untuk menambah jumlah kelurahan yang akan diberikan sosialisasi. Pada tahun 2023, BPBD Kota Padang membuat kebijakan dengan membentuk kelurahan tangguh bencana dengan target sebanyak 5 Kelurahan. Penghitungan Kelurahan Tangguh Bencana meliputi peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Pencapaian kelurahan bencana ditetapkan terlebih dahulu dengan menetapkan kriteria kelurahan tangguh bencana minimal 1 dari unsur kelurahan tangguh bencana telah meningkat kapasitasnya. Salah satu dari 3 unsur kelurahan tangguh bencana adalah meningkatnya kapasitas masyarakatnya dalam menghadapi bencana.

Mengingat pentingnya membentuk kelurahan tangguh bencana sehingga dibuat beberapa langkah yang diambil untuk melakukan penambahan jumlah kelurahan sehingga realisasi target kelurahan tangguh bencana menjadi 5 kelurahan. Materi yang diberikan dalam kelurahan tangguh bencana ini dapat berupa 9 modul materi Kelurahan Tangguh bencana. Materi ini diberikan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan serta kemandirian Masyarakat dalam menyikapi besarnya potensi bencana. Selain itu juga

diberikan arahan bagaimana menjaga kepekaan agar dapat melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bencana terjadi.

Dalam hal ini, pembinaan yang dilakukan berbentuk pengkajian potensi resiko bencana sistem peringatan dini, penyusunan rencana evakuasi, penyusunan protap, pembentukan forum PRB, penyusunan rencana penanggulangan bencana, pendampingan, sosialisasi, dan simulasi.

Pembinaan ini diberikan kepada perangkat kelurahan dan setiap elemen masyarakat yang ada di kelurahan tersebut untuk dikembangkan kepada masyarakat, sehingga semua orang yang ada di kelurahan tersebut memiliki kemampuan dan kemandirian dalam penanggulangan bencana, baik dalam melakukan pencegahannya maupun penanggulangan dari dampak yang terjadi akibat bencana tersebut, melakukan pencegahannya maupun penanggulangan dari dampak yang terjadi akibat bencana tersebut.

Secara umum, pemilihan wilayah implementasi difokuskan kepada Kelurahan yang berbatasan langsung atau berjarak dekat dengan pantai dan sungai (masih dalam potensi landaan tsunami). Calon kelurahan yang akan dilakukan pendampingan Kelurahan Tangguh Bencana pada tahun 2024, Peserta Perkelurahan 20 (dua puluh) Orang x 5 Kelurahan, dengan kriteria pemilihan wilayah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Kelurahan yang akan didampingi dalam Kegiatan Kelurahan Tangguh Bencana, dengan kriteria pemilihan Kelurahan sebagai berikut :

No	Kelurahan	Kecamatan	Dasar Pemilihan
1	Lolong Belanti	Padang Utara	-Kelurahan akan dijadikan pilot project (proyek percontohan) untuk meningkatkan nilai ketangguhan kelurahan menuju kategori “madya” -Melengkapi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) darurat yang menjadi kekurangan dokumen pada Tsunami Ready Community
2	Purus	Padang Barat	-Kelurahan akan dijadikan pilot project (proyek percontohan) untuk meningkatkan nilai ketangguhan kelurahan menuju kategori “madya” -Melengkapi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) darurat yang menjadi kekurangan dokumen pada Tsunami Ready Community
3	Teluk Bayur	Padang Selatan	Terdapat objek vital nasional diantaranya PT Semen Padang PP Teluk Bayur, PT Pelabuhan Indonesia dan Mako Lantamal II
4	Teluk Kabung Tengah	Bungus Teluk Kabung	Terdapat objek vital nasional diantaranya Terminal BBM PT Pertamina, PLTU Teluk Sirih dan PT PLN Indonesia Power

No	Kelurahan	Kecamatan	Dasar Pemilihan
			UBP Teluk Sirih
5	Batang Kabung Ganting	Koto Tengah	-Ada permintaan tertulis dari pihak Kelurahan -Satu-satunya kelurahan di Kecamatan Koto Tengah yang belum dilakukan kegiatan pendampingan serupa

Beberapa dampak positif yang didapat antara lain:

1. Memperkuat eksistensi dan esensi Pemerintah Kota Padang (khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang) dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
2. Memperkuat dan membangun jejaring.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga/organisasi kebencanaan dalam hal keilmuan dan wawasan pengurangan risiko bencana, terutama terkait bencana gempa bumi, tsunami, banjir, longsor dan lainnya.
4. Meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi masyarakat dan lembaga/organisasi kebencanaan dalam mengimplementasikan kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana di daerah masing-masing.

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi melalui papan informasi, marka tsunami safe zone, medsos multimedia.
- 2) Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Kota Padang, dalam rangka mengenang, mengambil hikmah atas peristiwa 30 September 2009 kilas balik dan menumbuhkan budaya kesiapsiagaan, yang melibatkan sekitar 1000 orang partisipan.
- 3) Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang. Secara keseluruhan rangkaian kegiatan gladi kesiapsiagaan bencana banjir Kota Padang tahun 2024 ini dimulai dari seminar sampai dengan gladi posko, dimana kegiatan latihan (Gladi Posko dan Gladi Lapangan), diselenggarakan untuk menguji peran dan fungsi personil maupun institusi yang terkait dalam sebuah Sistem Kesiapsiagaan.

- 4) Pelaksanaan Coffee Morning dengan Pentahelix kebencanaan sekali setiap bulannya untuk wadah berdiskusi, berdialog, menyerap aspirasi, membangun komunikasi untuk meningkatkan kemampuan penanganan bencana di Kota Padang.
- 5) Bimbingan Teknis Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sebanyak 30 Sekolah SD sebanyak 21 (dua puluh satu) dan SMP sebanyak 9 (sembilan) sekolah.
- 6) Hibah dana Pokok-Pokok Pikiran berupa kegiatan pelatihan untuk Kelompok Siaga Bencana Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebanyak 100 Orang dan Kecamatan Padang Timur sebanyak 30 Orang.

Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana ini ada beberapa tambahan kinerja. Telah dilaksanakan Sosialisasi Kebencanaan dan Kuliah Umum ke Perangkat Daerah dan beberapa sekolah serta BUMN dan Universitas di Kota Padang. Terlampir Dokumentasi dan Laporan Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana.

Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana ini ada beberapa tambahan kinerja sebagai berikut :

- 1) Telah dikukuhkan dan diserahkannya Surat Keputusan Wali Kota Padang tentang Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) di 11 Kecamatan.
- 2) Telah dikukuhkan dan diserahkannya Surat Keputusan Wali Kota Padang tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Pendampingan mahasiswa Fakultas Keperawatan UNAND dan POLTEKES Kemenkes Padang dalam peningkatan kapasitas Masyarakat sehingga terbentuk kader siaga bencana RW di Kelurahan Parupuak Tabing Kecamatan Koto Tangah dan kelurahan Lambuang Bukit kecamatan Pauh.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase bencana yang ditangani. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 6 menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana serta mencapai tujuan meningkatnya kapasitas Kota Padang dalam penanggulangan bencana.

SASARAN STRATEGIS 17			
BERKURANGNYA DAMPAK KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KEDARURATAN LAINNYA			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
PERSENTASE BENCANA YANG DITANGANI	100	100	100

Capaian kinerja Tahun 2024 dapat ditangani 100% dengan artian semua laporan masuk dalam terlayani dengan baik, baik bencana kebakaran maupun penyelamatan non kebakaran. Adapun total kebakaran selama tahun 2025 sebanyak 243 untuk penyelamatan non kebakaran sebanyak 1.148 kasus.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk mencapai realisasi dari sasaran berkurangnya dampak kebakaran dan penyelamatan kedaruratan lainnya dengan memaksimalkan kegiatan yakni Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran. Kegiatan ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya alat proteksi kebakaran untuk meminimalisir bencana kebakaran. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada masyarakat saat terjadinya kebakaran untuk melakukan mitigasi bahaya kebakaran dengan menggunakan alat proteksi kebakaran sehingga dapat meminimalisir bahaya kebakaran. Pelatihan dan sosialisasi edukasi terkait bahaya kebakaran dilakukan sebagai berikut.

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	6-2-2024	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat di Kecamatan Kuranji
2.	7-2-2024	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat di Kecamatan Kuranji
3.	6-3-2024	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat di Kecamatan Lubuk Begalung
4.	24-4-2024	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat di Tanah Kongs
5.	25-4-2024	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat di Kecamatan Padang Selatan
6.	6-5-2024	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat di Kecamatan Nanggalo

7.	15-5 2024	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat di Kecamatan Padang Utara
8.	22-5-2024	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat di Kecamatan Kota Tanggah
9.	29-7-2024	Pelatihan dan Simulasi Sistem Proteksi Kebakaran PT. Adipura Persada Alam
10.	02-9-2024	Pelatihan dan simulasi Kebakaran pada Kelurahan Kampung Jawa di Siskamling RE
11.	20-9-2024	Pelatihan Pemadam Kebakaran di SPN Padang Besi
12.	21-9-2024	Pelatihan Pemadam Kebakaran di Politeknik Negeri Padang
13.	26-9-2024	Testing Commissioning Ciamese pada proyek pembangunan Pa sar Raya Fase VII
14.	03-10-2024	Pelatihan simulasi penyelamatan di LP Perempuan Kelas II.B
15.	08-10-2024	Pelatihan simulasi penyelamatan di LP Lapas Kelas II.A
16.	07-10-2024	Pelatihan simulasi penyelamatan di TK Sempoa
17.	13-11-2024	Pelatihan simulasi penyelamatan di Mapolda Sumbar
18.	03-11-2024	Pelatihan simulasi penyelamatan di Pasar Raya Fase VII

Langkah-langkah agar mengurangi dampak kebakaran juga dilakukan dengan pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan pelayanan publik dan sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa alat tersebut berfungsi dengan baik dan siap digunakan dalam keadaan darurat dan pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala sesuai dengan standard prosedur yang ditentukan.

Dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan non kebakaran terus melakukan peningkatan kompetensi sumber daya terutama para tenaga pemadam dengan melakukan latihan bina kesamaptan secara rutin dan melalui Pos WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) juga melakukan patroli secara berkala ke tempat pemukiman atau kompleks perumahan warga di sekitar Pos WMK serta berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat (Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Pemuda, Penjaga Keamanan Komplek) dalam halantisipasi terjadinya kebakaran pada kawasan pemukiman masing-masing dan akan terus mensosialisasikan Nomor Call Center Damkar Kota Padang (0751) 28558 dan/atau 08116606113, yang dapat dihubungi oleh masyarakat ketika membutuhkan pemadaman kebakaran atau penyelamatan lainnya, melalui media sosial seperti facebook, instagram, wagroup milik Dinas Pemadam

Kebakaran. Hal tersebut dilakukan untuk memberi respon cepat dan tepat dalam penanganan bahaya kebakaran dan penyelamatan lainnya. Pasca kebakaran Dinas Pemadam kebakaran juga melakukan kegiatan investigasi kebakaran, dalam kegiatan tersebut Dinas Pemadam Kebakaran juga mengedukasi masyarakat terkait pentingnya alat proteksi kebakaran guna meminimalisir bencana kebakaran.

Gambar 3.A.5.63
Kegiatan Pelatihan Simulasi dan Edukasi Bahaya Kebakaran



Sumber. Dokumentasi Bidang Proteksi

Gambar 3.A.5.64
Kegiatan Pengecekan Alat Proteksi Kebakaran Pada Pelayanan Publik dan Sekolah





Sumber . Dokumentasi Bidang Proteksi dan Pengujian

Gambar 3.A.5.65

Kejadian Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran



Sumber. Instagram @padangfirefighter

Gambar 3.A.5.66

Kegiatan Investigasi Pasca Kebakaran





**SASARAN STRATEGIS 18
MENINGKATNYA KUALITAS TATAKELOLA BIROKRASI YANG BERSIH
DAN AKUNTABEL**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN (PREDIKAT)	WTP	WTP	100

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas tatakelola birokrasi yang bersih dan akuntabel ditandai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu opini BPK atas laporan keuangan. Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 7 (meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima serta mencapai tujuan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan).

Berdasarkan pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah, maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan Prinsip Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, BPK akan memberikan opini/pendapat atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan. Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria umum sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Pemerintah Kota Padang telah berhasil memndapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 (sepuluh) tahun berturut turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu sejak tahun 2014. Analisis penyebab keberhasilan mempertahankan kinerja Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan antara lain:

- a. Adanya penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dengan upaya:
 - 1. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - 2. Peningkatan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan;
 - 3. Meningkatkan peran PPK-SKPD
- b. Adanya peningkatan kualitas laporan keungan dengan upaya:
 - 1. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan, sosialisasi, bimbingan secara berkala dan berkelanjutan tentang tata kelola keuangan dan pelaporan keuangan secara berkala dan berkelanjutan;
 - 2. Mengoptimalkan pendampingan penyusunan, pengelolaan dan pelaporan Aset SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang
 - 3. Akselerasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. Adanya penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan upaya:
 - 1. Meningkatkan peran dan kedudukan strategis bidang akuntansi sebagai perumus kebijakan teknis urusan pemerintahan yang meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi dan neraca daerah;
 - 2. Meningkatkan ketersediaan peraturan, kebijakan, sistem operasional prosedur, mekanisme, petunjuk pelaksana/teknis
- d. Adanya peningkatan penguatan Monitoring dan Evaluasi dengan upaya ;
 - 1. Meningkatkan koordinasi internal (BPKAD Kota Padang dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang) dan koordinasi eksternal (BPKAD Kota Padang dan BPKP serta BPK)

2. Membentuk grup konsultasi perencanaan penganggaran dan penyusunan laporan keuangan SKPD
- e. Adanya optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dengan upaya penerapan aplikasi keuangan sebagai berikut:

1. Aplikasi SIPKD

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam mempermudah pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Aplikasi SIPKD terdiri dari Modul Penganggaran, Modul Pelaksanaan & Penatausahaan dan Modul Pertanggungjawaban.

2. Aplikasi SIMDA-BMD

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

Output aplikasi ini antara lain:

a) Perencanaan

Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

b) Pengadaan

Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharaan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.

c) Penatausahaan

Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.

d) Penghapusan

SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang yang dihapuskan

e) Akuntansi

Daftar Barang yang masuk Neraca (*Intracomptable*), Daftar Barang *Extra Comptable*, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

3. Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi Pemerintah Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

- a) Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta analisis profil pembangunan Daerah.
- b) Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- c) Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.
- d) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.

SASARAN STRATEGIS 19 MENINGKATNYA KINERJA BIROKRASI			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
NILAI AKIP (PREDIKAT)	A	BB	98,33
NILAI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) KOTA (NILAI)	3,2	3,26	101,87

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja birokrasi ditandai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu nilai AKIP dan indikator kinerja nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 7 (meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima).

Pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP ini merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja khususnya kinerja publik di instansinya secara berkelanjutan.

Sekaitan dengan nilai SAKIP, setiap tahun, Kementerian PAN RB melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. Evaluasi yang dilaksanakan Kementerian PAN RB dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori. Pengkategorian yang dilakukan bukan sekedar untuk menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP. Hasil evaluasi SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kementerian PAN RB juga memberikan rekomendasi dalam rapor tersebut, agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi

kesejahteraan masyarakat. Untuk penilaian tahun 2024, Kemenpan RB telah mengeluarkan hasil evaluasi SAKIP, dimana Kota Padang mendapatkan predikat BB dengan nilai 78,68.

Penguatan AKIP Kota Padang yang dilaksanakan selama tahun 2024 yaitu:

- a. Melaksanakan desk dalam rangka perbaikan pohon kinerja dan cascading kota serta pohon kinerja dan cascading perangkat daerah serta melakukan Bimtek Implementasi SAKIP dengan Evaluator dari Kemenpan RB.

Gambar 3.A.5.67
Desk Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Perangkat Daerah



- b. Melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi SAKIP dengan Evaluator SAKIP dari Kempan RB

Gambar 3.A.5.68
Bimtek Implementasi SAKIP dengan Evaluatur Kemenpan RB



- c. Penggunaan aplikasi berbasis web dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Gambar 3.A.5.69
Aplikasi Simetris



Belum tercapainya target SAKIP A, antara lain:

- Pohon Kinerja Pemko belum memadai
- Penjelasan pencapaian atau kegagalan IKU Kota dari Perangkat Daerah Pengampu masih ada yang kurang memadai
- Budaya pengukuran kinerja di seluruh Perangkat Daerah belum terwujud dengan optimal

- d. Internalisasi nilai dasar budaya kerja terkait manajemen perubahan belum terlaksana secara optimal
- e. Belum selarasnya program kegiatan dengan sasaran strategis
- f. Sistem reward yang transparansi dan akuntabel belum terwujud
- g. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belum terlaksana secara optimal

Alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan yaitu:

- a. Pembentukan tim adhoc
- b. Penandatanganan komitmen oleh Kepala OPD untuk bersungguh-sungguh memberikan upaya terbaik sesuai tugas dan fungsi melalui beberapa tindak aksi

Indikator kinerja nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam penyusunan LKPJ melibatkan seluruh OPD, sedangkan untuk Penyusunan LPPD hanya melibatkan OPD urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan ditambah dengan OPD Pendukung (Bappeda, Bapenda, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum). Data target Nilai LPPD Tingkat Nasional yang disajikan merupakan target yang ditetapkan untuk hasil penilaian yang akan keluar pada tahun 2024 yaitu hasil penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2024. Data realisasi yang tertera merupakan capaian kinerja dari hasil penilaian LPPD tahun 2022 yang nilainya dikeluarkan atau diumumkan pada tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah ditetapkan bahwa status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.A.5.12
Klasifikasi Status Kinerja LPPD

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2	1.81 – 2.60	Rendah
3	2.61 – 3.40	Sedang
4	3.41 – 4.20	Tinggi
5	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

Penilaian LPPD pada tingkat provinsi dan nasional antara Kabupaten dan Kota se-Indonesia dilakukan secara terpisah. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan item penilaian antara pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kota Padang mendapatkan nilai 3.2587 untuk LPPD tahun 2022 yang disusun pada tahun 2023 dan dinilai tahun 2024

Upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas LPPD Kota Padang tahun 2024:

- 1) Evaluasi terhadap produk LPPD, mengadakan asistensi dan desk verifikasi data dan isian LPPD OPD dengan tim penyusun dari setiap OPD. Berikut merupakan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan tim/panitia penyusunan LPPD tahun 2024.

Gambar 3.A.5.70
Evaluasi terhadap produk LPPD



Tim penyusun LPPD tahun 2024 Bagian Tata Pemerintahan melakukan evaluasi dan verifikasi data bersama OPD terkait, OPD yang terdapat pada foto tersebut adalah

Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Padang serta Satpol PP Kota Padang. LPPD yang disusun tahun 2024 ini merupakan hasil kinerja OPD selama tahun 2023.

- 2) Koordinasi dan konsultasi secara intens dengan Perangkat Daerah, Biro Pemerintahan Provinsi dan Kemendagri baik tatap muka secara langsung ataupun via telekomunikasi. Berikut adalah kegiatan evaluasi LPPD Kota Padang tahun 2024 oleh tim EPPD Provinsi Sumatera Barat yang juga terdiri dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang mana hasil evaluasi ini nantinya dikeluarkan tahun 2025.

Gambar 3.A.5.71
Kegiatan evaluasi LPPD Kota Padang tahun 2024



Foto diatas merupakan tim evaluasi LPPD atau EPPD dari provinsi Sumatera Barat, kegiatan diatas merupakan penyerahan penilaian atau evaluasi LPPD Kota Padang.

- 3) Membuat surat edaran ke seluruh Perangkat Daerah terkait permintaan data dukung dari masing-masing OPD penyusun LPPD.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024, LPPD tahun 2024 disusun dan dilaporkan pada tahun 2025, dimana saat ini (Januari 2025) proses penyusunan LPPD 2024 sedang dalam proses. Target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan target untuk hasil penilaian LPPD 2023 yang disusun, dilaporkan dan dievaluasi pada tahun 2024 dan nilai capaian LPPD Kota Padang tersebut seharusnya dikeluarkan atau diumumkan ditahun 2025.

Proses pelaksanaan pada setiap kegiatan memiliki kendala-kendala tertentu dan langkah-langkah pemecahan masalah diperlukan untuk tercapainya target yang telah ditetapkan. Berikut merupakan faktor-faktor yang menunjang atau pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan proses kegiatan sebagai berikut:

Faktor Pendukung Pelaksanaan Penyusunan LPPD

- a) Dilakukan koordinasi langsung antara tim penyusun LPPD pada saat desk LPPD dengan OPD terkait mengenai sistematika penyusunan LPPD sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b) Tim penyusun LPPD pada Bagian Tata Pemerintahan terlibat aktif dalam berkomunikasi dengan OPD terkait mengenai kelengkapan bahan LPPD secara terperinci.
- c) Tim penyusun LPPD pada Bagian Tata Pemerintahan aktif dalam berkoordinasi dengan Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya meminimalisir kesalahan data dalam penyajian LPPD Kota Padang.

SASARAN STRATEGIS 20 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (NILAI)	85	88,79	104,45
INDEKS KEMUDAHAN PERIZINAN DAERAH (NILAI)	83,50	84,67	101,4
INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	3,60	3,96	110

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas kinerja birokrasi ditandai dengan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik, indeks kemudahan perizinan daerah, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sasaran dan indikator kinerja ini sangat diperlukan karena mendukung keterwujudan pencapaian misi 7 (meningkatkan kualitas tata kelola

pemerintahan yang bersih dan pelayanan public yang prima serta mencapai tujuan (meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan).

Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dan sekaligus untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat tentang kebutuhan dan harapan terkait layanan yang diberikan, maka perlu diadakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pelayanan umum di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu cara mengetahui pencapaian sasaran strategis tersebut. Mengingat bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat dan selaras dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan, maka hasil survey tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Padang, serta menjadi indikator apakah penyelenggaraan pelayanan publik telah sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik** dilakukan survey oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk 30 Perangkat Daerah dan unit layanan penyelenggara pelayanan publik yang mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat dan unit penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dilaksanakan survey ini untuk mengetahui respon masyarakat terkait kepuasan yang diterima atas penyelenggara pelayanan publik di Kota Padang, dan untuk mengetahui pencapaian kinerja pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat dan menetapkan kebijakan, penataan sistem, mekanisme dan prosedur dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pada pelaksanaan kegiatan pengukuran IKM pada tahun 2024 didapatkan nilai akhir 88,79 dari 30 OPD/UKPP yang dinilai. Hasil ini, mengalami peningkatan sebesar 3,99 dibandingkan dengan pengukuran tahun 2023 dengan nilai 84,80 dan hasil ini tetap melebihi target yang telah ditetapkan pada PK Kota Padang sebesar 85. IKM Kota Padang pada tahun 2024 sebesar 88,79 atau masuk dalam kategori A. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Kota Padang, diketahui pengetahuan masyarakat terhadap unsur pelayanan masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

OPD	Sampel Total	Mengetahui tentang persyaratan pelayanan	Mengetahui tentang prosedur pelayanan	Pernah melakukan pengaduan/ memberikan keluhan
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	70	95,71%	95,71%	15,71%
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100	100,00%	100,00%	9,00%
Dinas Sosial	71	100,00%	100,00%	11,27%
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	70	98,57%	100,00%	15,71%
Dinas Kesehatan	80	100,00%	100,00%	-
Badan Pendapatan Daerah	74	98,65%	97,30%	14,86%
Dinas Pariwisata	76	97,37%	97,37%	2,63%
Dinas Perdagangan	70	100,00%	100,00%	95,71%
Dinas Perhubungan	74	98,65%	100,00%	5,41%
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	70	100,00%	100,00%	1,43%
RSUD Rasidin	101	100,00%	100,00%	14,85%
Kecamatan Padang Utara	71	100,00%	100,00%	54,93%
Kecamatan Padang Selatan	72	100,00%	100,00%	18,06%
Kecamatan Padang Barat	71	100,00%	100,00%	-
Kecamatan Padang Timur	70	100,00%	100,00%	58,57%
Kecamatan Nanggalo	72	100,00%	100,00%	2,78%
Kecamatan Kuranji	70	100,00%	100,00%	-
Kecamatan Koto Tengah	71	100,00%	100,00%	46,48%
Kecamatan Pauh	73	100,00%	100,00%	4,11%
Kecamatan Lubuk Begalung	70	100,00%	100,00%	30,00%
Kecamatan Lubuk Kilangan	70	100,00%	100,00%	5,71%
Kecamatan Bungus Teluk Kabung	71	100,00%	100,00%	32,39%
Puskesmas Lubuk Begalung, Kec. Lubuk Begalung	71	100,00%	100,00%	4,23%
Puskesmas Andalas, Kec. Padang Timur	70	100,00%	100,00%	-
Puskesmas Ulak Karang, Kec. Padang Utara	71	100,00%	100,00%	8,45%
Puskesmas Seberang Padang, Kec. Padang Selatan	70	100,00%	100,00%	8,57%
Puskesmas Padang Pasir, Kec. Padang Barat	72	100,00%	100,00%	4,17%
Puskesmas Nanggalo, Kec. Nanggalo	71	100,00%	100,00%	50,70%
Puskesmas Ikur Koto, Kec. Koto Tengah	70	100,00%	100,00%	-
Puskesmas Pauh, Kec. Pauh	71	100,00%	100,00%	9,86%

Sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per OPD yang diurutkan dari nilai IKM tertinggi sampai dengan terendah adalah sebagai berikut :

Peringkat IKM	OPD	Persyaran	Sistem, mekanisme,	Waktu pelayana	Biaya pelayanan	Kompetensi pelaksana	Perilaku pelaksana	Sarana dan Prasarana	Penanganan pengaduan, saran, dan	Produk/spesifikasi kasi	IKM Total	Kategori Nilai
1	Puskesmas Lubuk Begalung	97,01	97,01	97,54	98,59	97,89	98,24	98,59	100,00	100,00	98,32	A
2	Kecamatan Lubuk Kilangan	98,04	98,21	99,29	100,00	91,07	91,79	89,29	100,00	97,14	96,13	A
3	Puskesmas Seberang Padang	95,36	94,29	94,29	97,32	93,57	93,57	94,29	100,00	97,14	95,44	A
4	Kecamatan Nanggalo	94,79	94,62	100,00	100,00	92,01	90,28	90,97	100,00	90,63	94,85	A
5	Kecamatan Padang Timur	93,21	93,57	100,00	100,00	88,21	88,57	89,46	99,70	87,50	93,35	A
6	Dinas Sosial	93,49	93,84	99,65	100,00	88,38	88,38	87,68	100,00	87,68	93,18	A
7	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	94,64	93,75	99,29	100,00	88,60	92,11	92,89	86,61	91,07	93,11	A
8	DPMPTSP	93,93	93,39	99,29	100,00	86,63	90,70	93,61	90,58	86,43	92,75	A
9	Kecamatan Lubuk Begalung	94,11	92,50	99,64	100,00	86,23	86,59	91,78	87,68	86,07	91,62	A
10	Puskesmas Ikur Koto	93,21	93,04	89,64	91,43	87,14	88,57	86,07	100,00	93,39	91,41	A
11	Dinas Kesehatan	87,50	87,50	100,00	100,00	0,00	0,00	75,00	100,00	75,00	89,27	A
12	Kecamatan Padang Selatan	90,10	89,93	98,96	100,00	78,13	78,57	78,60	98,96	88,54	89,09	A
13	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	89,44	88,20	99,65	99,65	81,47	85,78	75,27	96,48	78,87	88,25	B
14	RSUD Rasidin	90,22	91,21	85,89	90,72	80,94	82,67	81,93	99,38	91,09	88,16	B
15	Kecamatan Padang Utara	90,14	89,44	100,00	100,00	77,42	75,00	75,58	100,00	85,56	88,12	B
16	Badan Pendapatan Daerah	89,86	89,53	94,93	99,32	82,73	86,36	81,68	85,37	80,07	87,61	B
17	Kecamatan Koto Tengah	87,50	86,97	100,00	100,00	76,84	77,94	76,22	100,00	76,76	86,87	B
18	Dinas Perhubungan	90,37	89,70	97,97	86,49	81,78	83,47	81,47	86,40	80,07	86,36	B
19	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	89,82	86,79	96,07	100,00	80,08	80,86	76,69	88,85	78,57	86,33	B
20	Kecamatan Padang Barat	87,50	88,03	100,00	100,00	75,00	76,06	75,18	100,00	75,00	86,31	B
21	Kecamatan Pauh	87,50	87,33	100,00	100,00	75,00	75,34	75,00	100,00	75,00	86,12	B
22	Puskesmas Ulak Karang	90,85	88,20	79,23	89,96	79,58	82,39	85,21	91,58	89,44	86,09	B
23	Kecamatan Kuranji	87,50	87,32	100,00	100,00	75,00	74,63	75,00	100,00	75,00	86,03	B
24	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	88,50	85,25	96,25	100,00	78,02	76,29	83,17	98,25	78,25	86,02	B
25	Dinas Perdagangan	85,89	86,25	98,57	100,00	76,45	75,36	75,18	96,69	75,36	85,50	B

Peringkat IKM	OPD	Persyaratan	Sistem, mekanisme,	Waktu pelayanan	Biaya pelayanan	Kompetensi pelaksana	Perilaku pelaksana	Sarana dan Prasarana	Penanganan pengaduan, saran, dan	Produk/spesifikasi	IKM Total	Kategori Nilai
26	Puskesmas Nanggalo	90,32	89,61	77,11	86,97	76,06	76,76	77,82	100,00	88,56	84,87	B
27	Puskesmas Padang Pasir	88,54	88,19	77,43	88,19	75,69	76,04	75,35	100,00	88,02	84,20	B
28	Puskesmas Andalas	87,68	87,68	75,71	87,68	75,00	74,64	75,00	100,00	87,50	83,42	B
29	Puskesmas Pauh	87,32	87,68	75,35	87,68	75,00	74,65	74,65	100,00	87,68	83,41	B
30	Dinas Pariwisata	81,09	83,55	97,37	88,49	71,43	80,61	74,84	81,25	76,32	81,65	B
Kota Padang		90,51	90,09	94,30	96,42	79,05	80,07	82,12	96,26	84,92	88,79	A

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil Survei pada tahun 2024 Skor IKM Kota Padang, yaitu 88,79 atau masuk dalam kategori A. Dari 30 OPD yang disurvei, 13 OPD mendapatkan nilai A dan 18 OPD mendapatkan nilai B. Adapun skor masing-masing untuk 30 OPD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Puskesmas Lubuk Begalung dengan skor IKM sebesar 98,32 dengan nilai A
2. Kecamatan Lubuk Kilangan dengan skor IKM sebesar 96,13 dengan nilai A
3. Puskesmas Seberang Padang dengan skor IKM sebesar 95,44 dengan nilai A
4. Kecamatan Nanggalo dengan skor IKM sebesar 94,85 dengan nilai A
5. Kecamatan Padang Timur dengan skor IKM sebesar 93,35 dengan nilai A
6. Dinas Sosial dengan skor IKM sebesar 93,18 dengan nilai A
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan skor IKM sebesar 93,11 dengan nilai A
8. DPMPTSP dengan skor IKM sebesar 92,75 dengan nilai A
9. Kecamatan Lubuk Begalung dengan skor IKM sebesar 91,62 dengan nilai A
10. Puskesmas Ikur Koto dengan skor IKM sebesar 91,41 dengan nilai A
11. Dinas Kesehatan dengan skor IKM sebesar 89,27 dengan nilai A
12. Kecamatan Padang Selatan dengan skor IKM sebesar 89,09 dengan nilai A
13. Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan skor IKM sebesar 88,25 dengan nilai B

14. RSUD Rasidin dengan skor IKM sebesar 88,16 dengan nilai B
15. Kecamatan Padang Utara dengan skor IKM sebesar 88,12 dengan nilai B
16. Badan Pendapatan Daerah dengan skor IKM sebesar 87,61 dengan nilai B
17. Kecamatan Koto Tengah dengan skor IKM sebesar 86,87 dengan nilai B
18. Dinas Perhubungan dengan skor IKM sebesar 86,36 dengan nilai B
19. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dengan skor IKM sebesar 86,33 dengan nilai B
20. Kecamatan Padang Barat dengan skor IKM sebesar 86,31 dengan nilai B
21. Kecamatan Pauh dengan skor IKM sebesar 86,12 dengan nilai B
22. Puskesmas Ulak Karang dengan skor IKM sebesar 86,09 dengan nilai B
23. Kecamatan Kuranji dengan skor IKM sebesar 86,03 dengan nilai B
24. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan skor IKM sebesar 86,02 dengan nilai B
25. Dinas Perdagangan dengan skor IKM sebesar 85,50 dengan nilai B
26. Puskesmas Nanggalo dengan skor IKM sebesar 84,87 dengan nilai B
27. Puskesmas Padang Pasir dengan skor IKM sebesar 84,20 dengan nilai B
28. Puskesmas Andalas dengan skor IKM sebesar 83,42 dengan nilai B
29. Puskesmas Pauh dengan skor IKM sebesar 83,41 dengan nilai B
30. Dinas Pariwisata dengan skor IKM sebesar 81,65 dengan nilai B

Dari hasil survei kepuasan masyarakat Kota Padang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. IKM Kota Padang pada tahun 2024 yaitu 88,79 atau masuk dalam kategori A. Secara umum, IKM Kota Padang pada tahun 2024 meningkat sebesar 3,99 poin dibandingkan tahun 2023.
2. Secara umum > 95.00% Masyarakat Kota Padang mengetahui tentang persyaratan pelayanan.
3. Persentase responden yang pernah menyampaikan keluhan < 20,00%. Persentase keluhan tertinggi ada Dinas Perdagangan yaitu sebesar 95,71%
4. IKM tertinggi yaitu pada Kecamatan Lubuk Begalungan yaitu sebesar 98,32 atau masuk dalam kategori A; Sedangkan IKM terendah yaitu pada Dinas Pariwisata atau masuk dalam kategori B.
5. Dari 30 Perangkat Daerah yang disurvei, 12 Perangkat Daerah termasuk dalam kategori

A dan 18 lainnya masuk dalam kategori B.

6. Indeks kepuasan untuk masing-masing jenis layanan di setiap Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per Perangkat Daerah per Jenis Pelayanan

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan
1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan pendampingan proses perizinan usaha mendapatkan skor nilai IKM sebesar 92,59 2. Layanan pengambilan hasil PBG/SLF mendapatkan skor nilai IKM sebesar IKM sebesar 92,33 3. Layanan konsultasi pengaduan mendapatkan skor nilai IKM sebesar IKM sebesar 92,64 4. Layanan surat izin praktek/ SIP (online) mendapatkan skor nilai IKM sebesar IKM sebesar 92,17
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan pelayanan penerbitan KIA khusus pemula / yang belum pernah memiliki mendapatkan skor nilai IKM sebesar 89,50 2. Layanan pelayanan KTP-EL hilang mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,55 3. Layanan pelayanan Penerbitan KTP baru karena rusak perubahan data atau hilang (Bagi WNI) mendapatkan skor nilai IKM sebesar 84,51 4. Layanan pelayanan SKPWNI - Perpindahan penduduk antar kota kabupaten atau provinsi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 85,49 5. Layanan pelayanan SKPWNI - Perpindahan penduduk dalam satu kota atau kabupaten mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,09 6. Layanan pelayanan Akta Kematian - Pencatatan kematian dalam wilayah mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,12 7. Layanan pelayanan Akta Kelahiran - Pencatatan kelahiran dalam wilayah NKRI mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,46 8. Layanan pelayanan Penerbitan KK - Pindah datang penduduk dari luar kota atau kabupaten atau provinsi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,64 9. Layanan pelayanan Penerbitan KK Baru karena hilang

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan
		<p>atau rusak mendapatkan skor nilai IKM sebesar 87,62</p> <p>10. Layanan pelayanan Penerbitan KK Baru karena perubahan data mendapatkan skor nilai IKM sebesar 84,85</p> <p>11. Layanan pelayanan Penerbitan KK baru karena pisah KK dalam satu alamat mendapatkan skor nilai IKM sebesar 87,00</p> <p>12. Layanan pelayanan Penerbitan KK baru karena penggantian keluarga mendapatkan skor nilai IKM sebesar 87,12</p>
3	Dinas Sosial	<p>1. Layanan DTKS mendapatkan skor nilai IKM sebesar 98,73</p> <p>2. Layanan JKSS mendapatkan skor nilai IKM sebesar 99,85</p> <p>3. Layanan PBI BPJS mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,17</p> <p>4. Layanan SLRT mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,27</p> <p>5. Layanan LK3 mendapatkan skor nilai IKM sebesar 91,57</p> <p>6. Layanan Pengusulan Calon Penerima Bansos mendapatkan skor nilai IKM sebesar 99,19</p> <p>7. Layanan UGB mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,81</p> <p>8. Layanan PUB mendapatkan skor nilai IKM sebesar 92,93</p> <p>9. Layanan SIOP mendapatkan skor nilai IKM sebesar 93,06</p> <p>10. Layanan Rekomendasi Untuk Panti Sosial mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,11</p> <p>11. Layanan Penanganan Gelandang, Pengemis, Anak Jalanan, Wanita Tuna Susila mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,11</p> <p>12. Layanan Pemulangan Anak Terlantar, Gelandang, Pengemis mendapatkan skor nilai IKM sebesar 100,00</p> <p>13. Layanan Penyelenggaraan Mayat Terlantar mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,11</p>

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan
		<p>14. Layanan Penjangkauan Penderita Psikotik/ Sakit Jiwa Kronis Miskin Terlantar mendapatkan skor nilai IKM sebesar 92,90</p> <p>15. Layanan Jamsos Bagi Eks Penderita Psikotik/ Sakit Jiwa Kronis mendapatkan skor nilai IKM sebesar 92,43</p>
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<p>1. Layanan Pendidikan Dasar mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,57</p> <p>2. Layanan P2PM mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,48</p> <p>3. Layanan PAUD mendapatkan skor nilai IKM sebesar 85,74</p> <p>4. Layanan Sarana dan Prasarana mendapatkan skor nilai IKM sebesar 85,89</p>
5	Dinas Kesehatan	<p>1. Layanan Instalasi Farmasi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 89,29</p> <p>2. Layanan Pencegahan dan Pengendalian mendapatkan skor nilai IKM sebesar 89,27</p> <p>3. Layanan Rekomendasi Ispam Rekomendasi LS Hotel, dan Rekomendasi LS Jasa mendapatkan skor nilai IKM sebesar 89,20</p> <p>4. Layanan Perizinan Klinik /RS mendapatkan skor nilai IKM sebesar 89,29</p>
6	Badan Pendapatan Daerah	<p>1. Layanan PBB mendapatkan skor nilai IKM sebesar 87,04</p> <p>2. Layanan BPHTB mendapatkan skor nilai IKM sebesar 89,83</p> <p>3. Layanan PBJT mendapatkan skor nilai IKM sebesar 85,62</p> <p>4. Layanan Pajak Reklame/ Air Tanah mendapat skor nilai IKM sebesar 90,23</p> <p>5. Layanan MBLB mendapatkan skor nilai IKM sebesar 90,58</p> <p>6. UPTD Wilayah I, II, III, IV mendapatkan skor nilai IKM sebesar 87,37</p>
7	Dinas Pariwisata	<p>1. Layanan Pengunjung Youth Center mendapatkan skor nilai IKM sebesar 85,55</p> <p>2. Layanan Pemakaian Ruang Youth Center mendapatkan skor nilai IKM sebesar 77,60</p> <p>3. Layanan DWT Gunung Padang mendapatkan skor nilai IKM sebesar 73,81</p> <p>4. Layanan Pembinaan Pokdarwis mendapatkan skor</p>

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan
		nilai IKM sebesar 83,10
8	Dinas Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan untuk UMKM yang mengikuti pelatihan tentang pemasaran yang dilakukan Dinas Perdagangan mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,96 2. Layanan untuk penyewa toko di pasar mendapatkan skor nilai IKM sebesar 85,70 3. Layanan tera / meteorologi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,72
9	Dinas Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Pengguna Trans Padang mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,46 2. Layanan KIR mendapatkan skor nilai IKM sebesar 89,50
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Keterangan Rencana Kota mendapatkan skor nilai IKM sebesar 87,31 2. Layanan Persetujuan Bangunan Gedung/ 3. Layanan Rekomendasi Teknis/Surat Rekomendasi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 98,95 4. Layanan Infrastruktur mendapatkan skor nilai IKM sebesar 97,19
11	RSUD Rasidin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Rawat jalan poli penyakit dalam mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,11 2. Layanan Rawat jalan poli ortopedi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 85,56 3. Layanan Rawat jalan poli jantung mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,94 4. Layanan Rawat inap penyakit dalam mendapatkan skor nilai IKM sebesar 89,84 5. Layanan Rawat inap bedah mendapatkan skor nilai IKM sebesar 85,28 6. Layanan IGD mendapatkan skor nilai IKM sebesar 91,35
12	Kecamatan Padang Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan surat keterangan / Rekomendasi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 88,86 2. Layanan dispensasi Nikah mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,92 3. Layanan izin menggunakan fasilitas umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 87,89 4. Layanan permintaan data mendapatkan skor nilai

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan
		IKM sebesar 92,71
13	Kecamatan Padang Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan surat keterangan / Rekomendasi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 88,76 2. Layanan dispensasi Nikah mendapatkan skor nilai IKM sebesar 89,84 3. Layanan izin menggunakan fasilitas umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 88,01 4. Layanan permintaan data mendapatkan skor nilai IKM sebesar 92,69
14	Kecamatan Padang Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan surat keterangan / Rekomendasi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,38 2. Layanan dispensasi Nikah mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,11 3. Layanan izin menggunakan fasilitas umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,31 4. Layanan permintaan data mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,34
15	Kecamatan Padang Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan surat keterangan / rekomendasi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 98,33 2. Layanan dispensasi nikah mendapatkan skor nilai IKM sebesar 97,68 3. Layanan izin menggunakan fasilitas umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 87,04 4. Layanan permintaan data mendapatkan skor nilai IKM sebesar 89,61
16	Kecamatan Nanggalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan surat keterangan/ rekomendasi mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 96,52 2. Layanan dispensasi nikah mendapatkan skor nilai IKM sebesar 95,38 3. Layanan izin menggunakan fasilitas umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 94,23 4. Layanan permintaan data mendapat skor nilai IKM sebesar 92,20
17	Kecamatan Kuranji	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan surat keterangan/ rekomendasi mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 86,13 2. Layanan dispensasi nikah mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,07 3. Layanan izin menggunakan fasilitas umum

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan
		mendapatkan skor nilai IKM sebesar 85,84 4. Layanan permintaan data mendapat skor nilai IKM sebesar 86,09
18	Kecamatan Koto Tengah	1. Layanan surat keterangan/ rekomendasi mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 87,08 2. Layanan dispensasi nikah mendapatkan skor nilai IKM sebesar 87,34 3. Layanan izin menggunakan fasilitas umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,95 4. Layanan permintaan data mendapat skor nilai IKM sebesar 85,82
19	Kecamatan Pauh	1. Layanan surat keterangan/ rekomendasi mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 86,09 2. Layanan izin menggunakan fasilitas umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,11 3. Layanan permintaan data mendapat skor nilai IKM sebesar 86,11 Layanan lainnya mendapat skor nilai IKM sebesar 86,14
20	Kecamatan Lubuk Begalung	1. Layanan surat keterangan/ rekomendasi mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 91,43 2. Layanan dispensasi nikah mendapatkan skor nilai IKM sebesar 91,79 3. Layanan izin menggunakan fasilitas umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 93,32 4. Layanan permintaan data mendapat skor nilai IKM sebesar 87,50
21	Kecamatan Lubuk Kilangan	1. Layanan surat keterangan/ rekomendasi mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 96,41 2. Layanan dispensasi nikah mendapatkan skor nilai IKM sebesar 94,22 3. Layanan izin menggunakan fasilitas umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 96,39 4. Layanan permintaan data mendapat skor nilai IKM sebesar 97,03
22	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	1. Layanan surat keterangan/ rekomendasi mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 89,07 2. Layanan dispensasi nikah mendapatkan skor nilai IKM 86,40 3. Layanan izin menggunakan fasilitas umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,57

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan
		4. Layanan permintaan data mendapatkan skor nilai IKM sebesar 88,64
23	Puskesmas Lubuk Begalung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan poli umum mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 96,52 2. Layanan poli lansia mendapatkan skor nilai IKM sebesar 95,38 3. Layanan laboratorium mendapatkan skor nilai IKM sebesar 94,23 4. Layanan poli gigi mendapat skor nilai IKM sebesar 92,20 5. Layanan poli anak mendapat skor nilai IKM sebesar 92,20
24	Puskesmas Andalas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan umum mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,47 2. Layanan DM/HT mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,33 3. Layanan IGD/Gawat Darurat mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,33 4. Layanan KIA-Ibu mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,33 5. Layanan KIA-Anak mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,31 6. Layanan Gigi mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,33 7. Layanan Imunisasi mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,33 8. Layanan Laboratorium mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,33 9. Layanan KB/Kesprolaten mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 84,72 10. Layanan Lansia mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,33 11. Layanan KIE Gizi/Kesling mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,33 12. Layanan Infeksi/TB mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,33 13. Layanan Farmasi/Apotek mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 83,42 14. Layanan Disabilitas mendapatkan skor indeks nilai IKM

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan
		sebesar 83,33
25	Puskesmas Ulak Karang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan poli umum mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 86,43 2. Layanan poli lansia mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 87,40 3. Layanan poli PTM mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 86,50 4. Layanan poli anak mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 86,18 5. Layanan poli gigi mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 79,93
26	Puskesmas Seberang Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan poli umum mendapatkan skor indeks nilai IKM sebesar 95,57 2. Layanan poli KIA mendapatkan skor nilai IKM sebesar 100,00 3. Layanan poli lansia mendapatkan skor nilai IKM sebesar 92,52 4. Layanan poli gigi mendapat skor nilai IKM sebesar 100,00 5. Layanan poli LKB mendapat skor nilai IKM sebesar 100,00
27	Puskesmas Padang Pasir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan poli umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,62 2. Layanan poli KIA-Ibu mendapatkan skor nilai IKM sebesar 90,83 3. Layanan poli Apotek mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,33 4. Layanan laboratorium mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,89 5. Layanan poli gigi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 84,10
28	Puskesmas Nanggalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan poli umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 84,95 2. Layanan poli lansia mendapatkan skor nilai IKM sebesar 84,65 3. Layanan poli KB mendapatkan skor nilai IKM sebesar 84,68 4. Layanan poli imunisasi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 84,72 5. Layanan poli gigi mendapatkan skor nilai IKM

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan
		<p>sebesar 85,27</p> <p>6. Layanan poli ibu mendapatkan skor nilai IKM sebesar 86,19</p> <p>7. Layanan poli anak mendapatkan skor nilai IKM sebesar 84,17</p> <p>8. Layanan UGD mendapatkan skor nilai IKM sebesar 85,91</p>
29	Puskesmas Ikur Koto	<p>1. Layanan poli gigi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 92,31</p> <p>2. Layanan poli KB mendapatkan skor nilai IKM sebesar 82,64</p> <p>3. Layanan poli Ibu mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,33</p> <p>4. Layanan poli anak mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,33</p> <p>5. Layanan poli umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 91,67</p> <p>6. Layanan poli PTM mendapatkan skor nilai IKM sebesar 99,38</p> <p>7. Layanan poli PKPR mendapatkan skor nilai IKM sebesar 89,09</p> <p>8. Layanan poli lansia mendapatkan skor nilai IKM sebesar 84,72</p> <p>9. Layanan poli imunisasi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 82,64</p> <p>10. Layanan IGD mendapatkan skor nilai IKM sebesar 91,73</p>
30	Puskesmas Pauh	<p>1. Layanan poli umum mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,27</p> <p>2. Layanan poli lansia mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,30</p> <p>3. Layanan poli DM HT mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,19</p> <p>4. Layanan poli KIA Ibu mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,33</p> <p>5. Layanan poli KIA Anak mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,33</p> <p>6. Layanan poli DOTS TB mendapatkan skor nilai IKM sebesar 84,38</p> <p>7. Layanan poli gigi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,92</p>

No	Perangkat Daerah	Jenis Layanan
		8. Layanan poli KB mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,33
		9. Layanan poli Imunisasi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,33
		10. Layanan poli gizi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 82,95
		11. Layanan IMS mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,33
		12. Layanan Catin mendapatkan skor nilai IKM sebesar 85,42
		13. Layanan poli remaja mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,30
		14. Layanan poli mata mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,33
		15. Layanan poli sanitasi mendapatkan skor nilai IKM sebesar 83,33

Dari hasil survei di atas maka didapat beberapa rekomendasi agar pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Padang semakin baik. Rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

Rekomendasi perbaikan secara umum untuk Pemerintah Kota Padang yaitu:

- a. Terkait dengan unsur persyaratan pelayanan dan system, mekanisme, prosedur pelayanan:
 - Menyediakan informasi persyaratan, sistem, mekanisme prosedur pelayanan yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat baik secara offline (brosur/poster/customer service) maupun online (melalui web atau media sosial).
 - Melakukan sosialisasi layanan yang dilakukan secara online
 - Meletakkan petunjuk arah pelayanan dilokasi yang mudah dilihat dan mudah terbaca
- b. Terkait dengan unsur pelayanan:
 - Jam buka layanan tepat waktu
 - Penyelesaian layanan sesuai dengan SOP yang berlaku
 - Menerapkan sistem pendaftaran online untuk mengurangi antrian di pendaftaran
- c. Terkait dengan unsur pelayanan:
 - Informasi biaya layanan tersedia di loket dan dapat diakses dengan mudah oleh

Masyarakat

- Menginformasikan kepada masyarakat bahwa biaya pelayanan yang berlaku adalah sesuai dengan peraturan yang ada
- d. Terkait dengan unsur perilaku pelaksana:
- Keluhan yang banyak muncul terkait perilaku pelaksana adalah petugas yang tidak ramah, sehingga diharapkan petugas lebih ramah lagi saat melayani dan menerapkan etika pelayanan (senyum, salam, sapa).
- e. Terkait dengan unsur kompetensi pelaksana:
- Memastikan petugas memahami persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi perbedaan informasi yang diberikan kepada masyarakat.
- f. Terkait dengan unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan:
- Menyediakan informasi terkait prosedur penyampaian pengaduan, saran, dan masukan
 - Lokasi kotak saran di tempat yang strategis dan mudah dilihat
 - Melakukan evaluasi secara terhadap pengaduan, saran, dan masukan yang masuk
- g. Terkait dengan unsur sarana dan prasarana:
- Melakukan pemeliharaan secara berkala sarana prasarana penunjang
 - Melakukan perbaikan untuk fasilitas-fasilitas yang sudah rusak
 - Memastikan layanan online berjalan dengan lancar
 - Memanfaatkan web dan media sosial untuk sosialisasi terkait persyaratan, sistem, mekanisme prosedur pelayanan dan pengaduan, saran dan masukan
- h. Terkait produk/spesifikasi pelayanan:
- Memastikan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan SOP yang berlaku
 - Tidak terjadi kesalahan dalam memasukan dan mencetak data Masyarakat yang menggunakan layanan
- i. Terkait system komunikasi dan informasi:
- Karena berdasarkan data nampak bahwa sebagian besar masyarakat menyatakan telah mengetahui tentang persyaratan pelayanan serta prosedur dan sistem,

mekanisme, prosedur pelayanan namun masih terdapat keluhan terkait waktu pelayanan, biaya pelayanan maka perlu dilakukan komunikasi berulang, kepada masyarakat yang menjalani pelayanan publik tentang waktu penyelesaian layanan dan biaya pelayanan yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

j. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait:

Capaian Target Kinerja Tahun 2024 untuk Jumlah Nilai PMA tercapai 76,59 % dari target yang telah ditetapkan, adapun target sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala Dinas adalah US\$ 17.123.288. Kontribusi investasi Penanaman Modal Asing paling besar berasal dari sektor Transportasi Gudang dan Telekomunikasi sebesar US\$ 1.104.200 dalam rupiah Rp.16.563.000.000 atau 63,72%, sektor Jasa Lainnya sebesar US\$ 272.300 dalam rupiah Rp.4.084.500.000 atau 15,71%. kemudian dari Perdagangan dan Reparasi sebesar US\$ 160.700 dalam Rupiah Rp.2.410.500.000 atau 9,27%, sektor Industri Makanan sebesar US\$ 55.700 dalam rupiah sebesar Rp.835.500.000 atau 3,21%.

Untuk capaian PMDN tercapai sebesar 118,7 % kurang darilebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian target ini merupakan realisasi capaian kinerja pada triwulan III, Kontribusi paling besar pada Penanaman Modal Dalam Negeri pada triwulan III tahun 2024 berasal dari Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar Rp.253.457.100.000 atau 55,13%. Kemudian dari sektor Jasa Lainnya sebesar Rp.162.605.200.000 atau sebesar 35,37%, sektor Perdagangan dan Reparasi yakni sebesar Rp.17.855.400.000 atau sebesar 3,88%, sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dengan nilai investasi Rp.12.024.300.000 atau 2,62%, dan kontribusi dari sektor lainnya sebesar 3,01%. Hal ini bersifat sementara karena belum adanya press release daeri BKPM RI.

Untuk target Kinerja dengan sasaran Pelayanan Publik yang berkualitas melalui indikator Indeks Kemudahan Perizinan Daerah sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas adalah 83,50. Capaian pada Tahun 2024 melebihi target sebesar 84,67%.

Tahun 2024 untuk non perizinan DPMPSTSP Kota Padang guna meningkatkan layanan non perizinan sudah menggunakan Sistem Informasi Non Perizinan (SINOPEN). Pada tahun 2023 DPMPSTSP melalui penilaian layanan publik oleh Kemenpan RB DPMPSTSP semula nilai B naik menjadi A- sedangkan untuk penilaian pelayanan publik dari OMBUDSMAN Tahun 2023

dengan predikat hijau.

Beberapa permasalahan penyebab kegagalan atau penurunan kinerja adalah :

1. Pemahaman OPD Teknis mengenai penggunaan akun pengawasan pada aplikasi OSS

Dinas Teknis belum memahami ketentuan/ regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko per sektor perizinannya setelah menerima hak akses, mengingat ketika hak akses dari pengelola hak akses sudah diturunkan ke Dinas Teknis, maka Dinas Teknis wajib melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha yang telah diterbitkan sesuai dengan kewenangannya setelah pelaku usaha memperoleh NIB, sertifikat standar atau izin. Harapannya, DPMPTSP dan Dinas teknis selalu bersinergi dalam melakukan pengawasan perizinan berusaha karena ini merupakan komitmen bersama.

2. Tingkat Kepatuhan/Kesadaran Pelaku Usaha untuk menyampaikan LKPM masih rendah.

Kesadaran pelaku usaha dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal. Berdasarkan Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang telah dijabarkan secara teknis melalui Pasal 7 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) salah satu kewajiban pelaku usaha adalah penyampaian Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah, pemerintah daerah mesti melakukan pemantauan kepada pelaku usaha, pembinaan kepada pelaku usaha, dan pengawasan kepada pelaku usaha. Pengawasan terintegrasi oleh tim yang terpadu tentu menjadi sebuah keniscayaan. Strategi pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang efektif perlu dilakukan sehingga pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah dapat terwujud.

Masih rendahnya pengetahuan investor (PMA/PMDN) mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di Kota Padang termasuk di dalamnya mengetahui secara jelas akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penanam modal. Sebahagian besar perusahaan PMA/PMDN di Kota Padang masih belum menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM kepada DPM & PTSP.

Perusahaan PMA/PMDN sebahagian besar belum dapat mengisi LKPM dengan baik dan benar. Hal ini akan mempengaruhi informasi nilai realisasi investasi yang disampaikan sehingga diperlukan waktu dalam proses validasi melalui konfirmasi ulang kepada perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan masih belum tertib dalam waktu menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan sebagaimana yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2024, ini berdasarkan data hasil pengawasan kepatuhan pelaporan LKPM, dari 115 perusahaan yang dilakukan pengawasan hanya 24 perusahaan yang sudah melaporkan LKPM atau 20,87% dari total perusahaan yang diawasi.

3. Belum Maksimalnya Pelaksanaan Promosi Peluang Investasi

Strategi promosi investasi atau penanaman modal daerah. Bahwa penentuan fokus strategi sektor unggulan saja tidaklah cukup. Penyusunan perencanaan penanaman modal yang berorientasi pada *market* belum tersedia, promosi investasi yang dilakukan masih sangat terbatas, *Feasibility Study* yang ada untuk Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang, Ex Dinas Kesehatan Kota, Gedung Bagindo Azizchan (saat ini sudah digunakan untuk YouthCenter Kota Padang) dan Kawasan pantai Pasir Jambak, itupun tidak dilengkapi dengan data atau informasi utama yang utuh sekaitan ketersediaan atau kepemilikan lahan, kendala lahan masih menjadi persoalan klasik yang mengururkan Upaya promosi investasi daerah dan sebagainya.

Promosi Peluang Investasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan minat investor masuk ke kota Padang. Untuk itu DPMPSTSP Kota Padang perlu melakukan promosi peluang investasi bukan hanya di Kota Padang akan tetapi juga di luar Kota Padang baik nasional maupun internasional. Promosi yang dilakukan masih sangat terbatas hal ini disebabkan terbatasnya anggaran untuk melakukan promosi juga terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten terkait promosi daerah.

4. Perubahan/penyesuaian produk hukum daerah pasca pelaksanaan UU cipta kerja dan peraturan teknis pelaksanaannya belum terlaksana secara menyeluruh

Ketersediaan regulasi daerah yang mendukung atmosfer investasi yang kondusif dan pelayanan perizinan terpadu. Perubahan besar regulasi melalui Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan Menteri menuntut penyesuaian dan perubahan yang signifikan juga pada tataran produk hukum daerah. Hal tersebut tentunya dalam menunjang pelaksanaan kemudahan iklim investasi dan perizinan yang ramah kepada publik. Sejak undang-undang cipta kerja diberlakukan, Pemerintah Kota Padang baru melakukan penyesuaian aturan dalam bentuk tiga peraturan wali kota. Peraturan dalam rangka penguatan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penyelenggaraan urusan penanaman modal pastinya juga dibutuhkan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Memaksimalkan tim kerja melakukan pengawasan ke pelaku usaha dengan mengabaikan target awal dari BKPM.
2. a. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman mengenai LKPM.
b. Pemberitahuan melalui media massa terkait sanksi kepada pelaku usaha yang tidak melaporkan LKPM sesuai dengan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (“LKPM”) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pelaporan LKPM dapat dipenuhi oleh pelaku usaha secara daring melalui OSS Berbasis Risiko.
2. a. Memberdayakan tenaga IT dan merekrut tenaga ahli untuk menyiapkan konsep promosi investasi secara digital
b. Memaksimalkan kanal-kanal digital seperti media sosial, media pemberitaan online untuk kebutuhan promosi.
4. Menyiapkan anggaran dan sub kegiatan untuk penyusunan peta potensi pada tahun 2024.
5. Memaksimalkan rapat koordinasi teknis dengan perangkat daerah untuk penyelesaian persoalan layanan perizinan berusaha.

Selain melakukan monitoring, dan evaluasi kepada pelaku usaha, DPMPSTSP juga

melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai OSS dan pengisian LKPM bagi pelaku usaha. Sosialisasi dan bimbingan teknis ini bertujuan untuk mencapai target peningkatan realisasi investasi daerah. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha, lembaga pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan difasilitasi dalam suatu forum untuk saling berbagi (sharing) informasi berkaitan dengan iklim investasi di Kota Padang. Para pelaku usaha dalam kesempatan tersebut diberi penjelasan tentang regulasi penanaman modal, kemudahan berusaha (insentif) dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Dimana masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan iklim investasi di Kota Padang.

Pelaku usaha dapat berkonsultasi mengenai pembuatan NIB melalui OSS dan akan dibantu untuk proses registrasinya. DPMPSTP juga menyediakan klinik LKPM dengan di pandu oleh help desk bagi pelaku usaha yang belum mengetahui cara dalam pengisian LKPM.

Gambar 3.A.5.72
Konsultasi LKPM



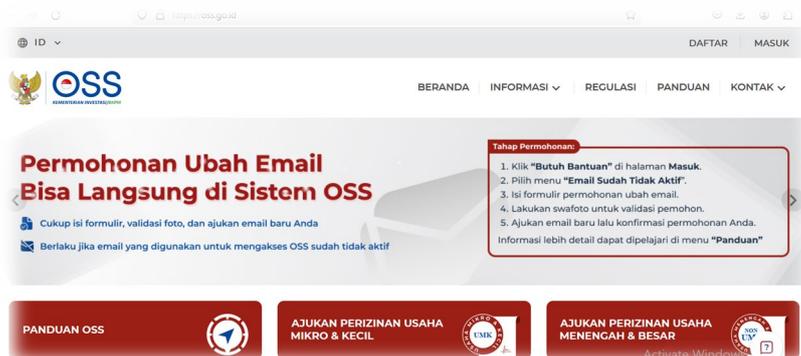
Gambar 3.A.5.73
Bimbingan Teknis dengan Pelaku Usaha





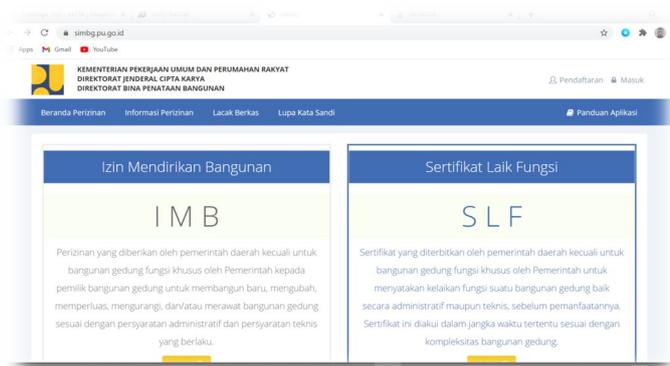
Untuk mendukung tercapainya target perizinan penanaman modal maka aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) DPMPSTSP adalah secara online, terdiri dari Online Single Submission (OSS), Sapo Rancak, SIMBG dan Sicantik Cloud, tahun 2024 untuk layanan non perizinan sudah dilakukan melalui aplikasi SINOPEN. Sehingga pelayanan perizinan di DPMPSTSP menjadi lebih mudah dan cepat diakses oleh pemohon (pelaku usaha) melalui aplikasi bagi yang mampu menguasai teknologi informasi.

Gambar 3.A.5.74
Aplikasi Perizinan OSS



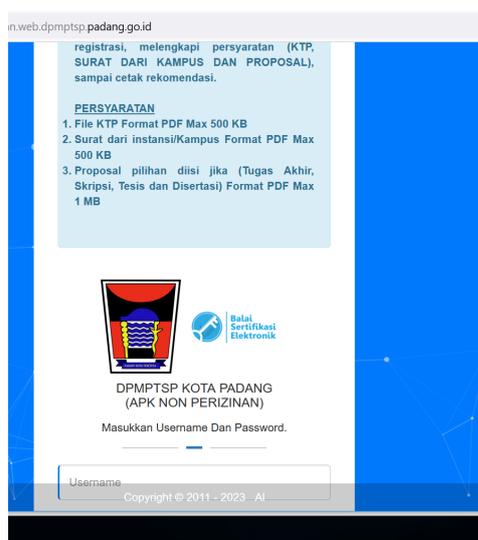
a.

Gambar 8 : Aplikasi Perizinan SIMBG



b.

Gambar 3.A.5.75
Aplikasi SINOPEN



Dalam upaya mempersiapkan SDM yang berkompetensi dan berkualitas dalam pelayanan perizinan, DPMPSTP Kota Padang melaksanakan program dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan tersebut bersifat rutin setiap tahun dalam upaya meningkatkan keahlian aparatur dalam penguasaan teknologi informasi yang sekiranya dapat membantu pelayanan perizinan seperti OSS. Dasar pertimbangan pelaksanaan kegiatan karena masih banyak tenaga pelayan DPMPSTP yang belum menguasai penggunaan OSS, begitu juga dengan aplikasi lainnya seperti Sapo Rancak.

Gambar 3.A.5.76
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



Indikator kinerja **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** dengan persentase capaian sebesar 3,96. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip

terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Penyebab keberhasilan peningkatan nilai index SPBE tahun 2024 :

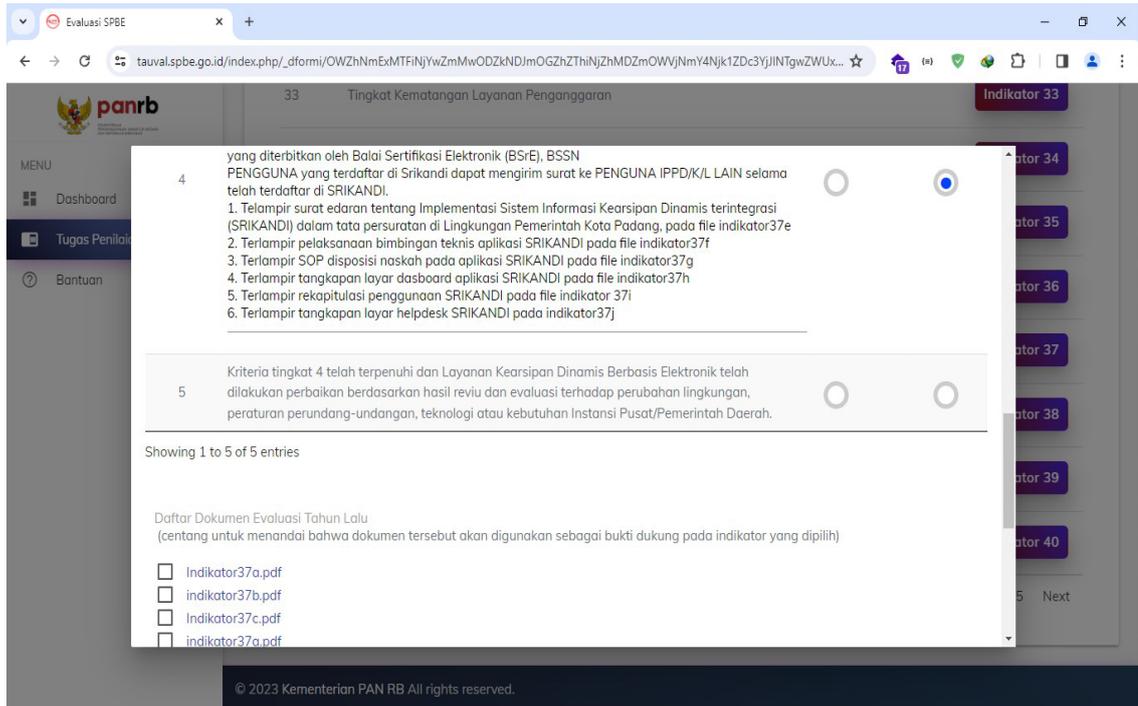
- a. Dinas Kominfo melakukan Rapat Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) penilaian SPBE tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2024 di Ruang Lounge Balai Kota Padang, yang dihadiri perangkat daerah antara lain Asisten Administrasi Umum, BPKAD, Bapenda, Bappeda, Diskominfo, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Disdukcapil, DPMPSTP Bag. Hukum, Bag. Organisasi, Bag. Pengadaan Barang Jasa, dan lain-lain.

Gambar 3.A.5.77
Rapat Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) penilaian SPBE tahun 2024



- b. Dinas Kominfo menyusun Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai indikator penilaian SPBE tahun 2023 berkoordinasi dengan Bag. Hukum pada bulan Juli 2023.
- c. Dinas Kominfo menyusun Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2023 yang mencakup manajemen keamanan informasi, manajemen resiko SPBE, Aset TIK, serta SK Tim Audit TIK, SK tim koordinasi SPBE, SK Arsitektur SPBE Tahun 2024 dan SK Peta Rencana Tahun 2024.
- d. Perangkat daerah terkait memberikan dukungan data sesuai indikator penilaian SPBE tahun 2024 pada Agustus 2024 untuk dimasukkan ke dalam aplikasi tauval.spbe.go.id.

Gambar 3.A.5.78
Aplikasi tauval.spbe.go.id.



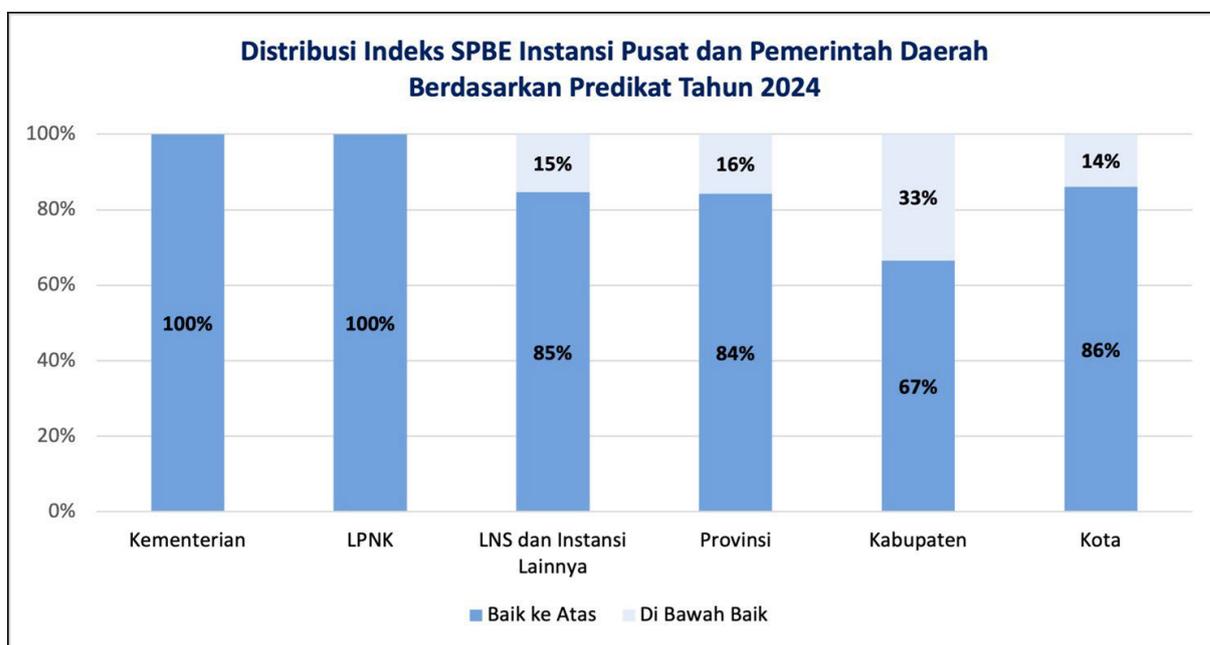
- e. Beberapa perangkat daerah yang menggunakan aplikasi seperti bagian hukum (aplikasi JDIH), Bapenda (Aplikasi Sismiop), Bappeda (aplikasi simetris), BPKAD (aplikasi SIPKD) telah melakukan proses integrasi data dengan aplikasi lain sehingga meningkatkan nilai indikator tingkat kematangan layanan aplikasi yang semula nilai 3 menjadi 4 atau bahkan menjadi nilai 5.

Gambar 3.A.5.79
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Grafik 3.A.5.5
Klasifikasi Status Kinerja LPPD



Kekuatan dan Kelemahan dalam Penilaian Indeks SPBE

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal

Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang.

- Kelemahan

Pemerintah Kota Padang tidak ditemukan kelemahan dalam Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang.

- Kelemahan

Pemerintah Kota Padang tidak ditemukan kelemahan dalam Aspek Perencanaan Strategis SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang adalah dengan adanya Pembangunan

Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan

- Kekuatan

Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat terlihat adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang.

- Kelemahan

Pemerintah Kota Padang tidak ditemukan kelemahan dalam Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang adalah dengan adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE, Kolaborasi Penerapan SPBE

- Kekuatan

Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat adanya Kolaborasi Penerapan SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang.

- Kelemahan

Pemerintah Kota Padang tidak ditemukan kelemahan dalam Aspek Penyelenggara SPBE

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat adanya Penerapan Manajemen Layanan SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Padang masih belum memiliki Aspek Penerapan Manajemen SPBE dalam penerapan manajemen resiko, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung berupa pelaksanaan manajemen resiko yang sesuai dengan pedoman

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

- Kekuatan

Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK di Pemerintah Kota Padang belum ditemukan adanya kekuatan.

- Kelemahan

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Padang masih belum memiliki Aspek Pelaksanaan Audit TIK dalam Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung berupa pelaksanaan manajemen resiko yang sesuai dengan pedoman.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang.

- Kelemahan

Pemerintah Kota Padang tidak ditemukan kelemahan dalam Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH, Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, Layanan Publik Sektor 3 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang.

- Kelemahan

Pemerintah Kota Padang tidak ditemukan kelemahan dalam Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Rekomendasi Penilaian SPBE Kedepannya

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Padang, sudah dapat menggambarkan predikat SANGAT BAIK dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Padang adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aspek Penyelenggara SPBE, Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Aspek Pelaksanaan Audit TIK, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE dengan dibentuk kebijakan internal Peta Rencana SPBE dan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 430 tahun 2024 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024- 2027 sehingga menjadi pedoman pelaksanaan SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data yang memastikan kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional pada pasal 13 ayat 5, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE yang memuat unsurnya secara lengkap, serta adanya keunggulan kebijakan tata kelola juga diiringi dengan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terdokumentasi dengan baik, begitu pula pada penerapan Aspek Layanan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

KEUNGGULAN

Namun disisi lain, Pemerintah Kota Padang masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE?terlihat pada Penerapan Manajemen Risiko SPBE yang belum ada pedoman manajemen resiko yang mengacu pada permenpan 59 tahun 2020 tentang manajemen resiko dilaksanakan secara optimal dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK khususnya pada Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. Hal ini menyebabkan Layanan Publik yang diberikan tidak efektif dan optimal pemanfaatannya.

Semua Aspek sudah optimal kecuali untuk Aspek Penerapan Manajemen SPBE khususnya Penerapan Manajemen Risiko SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK khususnya Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE perlu dilakukan inisiatif penerapan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

3.A.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

1. Untuk indikator kinerja **rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah**, efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari :

- a. Memaksimalkan Peranan Satuan Pendidikan Non Formal didalam mencapai realisasi target kinerja.

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya sosialisasi kepada masyarakat yang berada di sekitar SKB/PKBM, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya melanjutkan pendidikan anak melalui program pendidikan kesetaraan, melakukan program pengabdian masyarakat melalui SPNF SKB Kota Padang.

Gambar 3.A.6.1
Pengabdian Masyarakat untuk kebersihan sungai dan pantai



Gambar 3.A.6.2
Pelaksanaan Kegiatan Belajar Program Pendidikan Kesetaraan



Gambar 3.A.6.3
Sosialisasi Pemanfaatan Pendidikan Kesetaraan



- b. Memaksimalkan penambahan kuota layanan pendidikan inklusi yang tidak terakomodir didalam anggaran dinas.

Kegiatan ini memiliki dukungan anggaran yang terbatas, namun mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat luas tidak hanya warga kota padang, hal ini yang menjadi dasar untuk menambah kuota peserta dan jam layanan kepada masyarakat. Salah satu program kegiatan yang dimaksimalkan adalah asesmen peserta didik usia pra-sekolah dan anak-anak usia sekolah di Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi. Hasil dari pelaksanaan asesmen ini berupa rekomendasi apakah anak tersebut membutuhkan layanan intervensi atau tidak.

Disamping asesmen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memaksimalkan penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan memberikan Pendampingan Psikologis kepada siswa bermasalah ke sekolah reguler.

Gambar 3.A.6.4
Asesmen Peserta Didik



Gambar 3.A.6.5
Layanan Intervensi Terpadu



2. Untuk indikator kinerja **angka harapan hidup**, efisiensi penggunaan sumber daya dapat diketahui dari :

a. Sumber Daya Manusia

Tahun 2024 jumlah tenaga fungsional kesehatan yang ada di Puskesmas, RSUD dr. Rasidin dan Dinas Kesehatan adalah 1.574 orang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Kondisi 2024	Kebutuhan	Selisih
1	Bidan	459	621	-162
2	Perawat	427	622	-195
3	Perekam Medis	77	139	-62
4	Pranata Laboratorium Kesehatan	63	102	-39
5	Dokter	122	181	-59

No	Nama Jabatan	Kondisi 2024	Kebutuhan	Selisih
6	Dokter Gigi	61	75	-14
7	Dokter Spesialis	41	74	-33
8	Terapis Gigi dan Mulut	27	50	-23
9	Apoteker	26	51	-25
10	Asisten Apoteker	58	100	-42
11	Tenaga Sanitasi Lingkungan	44	88	-44
12	Nutrisionis	61	96	-35
13	Refraksionis Optisien/Optometeris	5	17	-12
14	Administrator Kesehatan	53	111	-58
15	Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	13	68	-55
16	Epidemiolog Kesehatan	8	31	-23
17	Entomolog Kesehatan	1	1	0
18	Pembimbing Kesehatan Kerja	3	21	-18
19	Fisioterapis	4	15	-11
20	Teknisi Elektromedis	6	29	-23
21	Asisten Penata Anestesi	1	4	-3
22	Terapis Wicara	1	7	-6
23	Radiografer	13	25	-12
	Jumlah	1.574	2.528	-954

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang kurang maka tenaga kesehatan yang ada dimaksimalkan dalam pekerjaannya, misalnya dokter/nutrisionis/administrator kesehatan membantu tugas promosi kesehatan dan ilmu perilaku, perawat/bidan membantu tugas pembimbing kesehatan kerja/pranata laboratorium kesehatan.

b. Sarana prasarana

Pada tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota Padang memiliki 34 Puskesmas Keliling (Puskel) untuk operasional pelayanan kesehatan di lapangan seperti posyandu, penyuluhan keliling dan pemantauan wilayah di 24 Puskesmas. Hal ini berarti ada Puskesmas yang memiliki 2 Puskesmas Keliling. Selain untuk operasional pelayanan kesehatan di lapangan, Puskel juga sebagai ambulance dalam merujuk pasien ke rumah sakit.

Selain itu semenjak tahun 2019 semua Puskesmas di Kota Padang telah terakreditasi dan alat kesehatan yang ada telah mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan tingkat dasar bagi masyarakat Kota Padang.

3. Untuk indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Efisiensi penggunaan sumber daya indikator Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat dari:

1. Kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan sekolah ramah anak, masjid ramah anak.
 2. Kerjasama dengan aktivis PATBM di setiap kelurahan akan sangat membantu dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
 3. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti LSM Nurani Perempuan dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 4. Peran serta Duta GenRe dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap keluarga sejahtera.
 5. Peran serta Forum Anak Kota Padang sangat membantu dalam mewujudkan Padang Kota Layak Anak dalam bentuk kampanye di setiap kecamatan dan giat lainnya.
4. Untuk indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan**, efisiensi penggunaan sumber daya diketahui dari :

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Perhubungan sebanyak 91 orang pegawai ASN dan 94 orang pegawai Non ASN. Upaya penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan keluarnya Peraturan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 yang menetapkan Penugasan Pengelolaan Trans Padang kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri, dan Dinas Perhubungan ditugaskan sebagai pengawas Trans Padang.

5. Untuk indikator kinerja **persentase perumahan dan permukiman yang layak dan persentase perumahan dan permukiman layak** efisiensi penggunaan sumber daya dapat diketahui dari : upaya yang mendukung pemerintah kota Padang untuk pencapaian kinerja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memaksimalkan SDM dan anggaran yang ada dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja masing-masing indikator, meskipun telah dilakukan pemangkasan anggaran pada kegiatan penunjang indikator kinerja tersebut.

Berdasarkan kebutuhan SDM untuk melaksanakan indikator yang diberikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang membutuhkan pegawai sebanyak 130 orang. Sedangkan ketersediaan SDM untuk pelaksanaan kegiatan tersebut hanya sebanyak 49 orang. Dapat kita ketahui bahwa terdapat kekurangan pegawai sebanyak 81 orang. Namun dengan efisiensi sumber daya dan anggaran tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang masih dapat melaksanakan indikator tersebut. Hal ini disiasati dengan memaksimalkan penggunaan anggaran untuk merekrut pegawai kontrak dan tenaga fasilitator lapangan serta memberdayakan pegawai di sekretariat dalam hal monitoring kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator dapat dilakukan secara maksimal.

6. Untuk indikator kinerja **angka kriminalitas**, efisiensi penggunaan sumber daya dapat diketahui dari :

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan program kegiatan Satpol PP Kota Padang, Satpol PP Kota Padang didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 455 orang, terdiri dari 58 PNS, 1 orang P3K dan 396 non PNS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.A.6.1
Daftar Penempatan Anggota Satpol PP Kota Padang

No	Golongan/ Ruang	Jumlah Golongan/ Ruang	Jenis Kelamin		Sub Total
			Laki-laki	Perempuan	
A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)					
1	IV/c	-	-	-	-

2	IV/b	1	1	-	1
3	IV/a	3	3	-	3
4	III/d	12	11	1	12
5	III/c	2	2	-	2
6	III/b	1	1	-	1
7	III/a	15	13	2	15
8	II/d	10	8	2	10
9	II/c	5	4	1	5
10	II/b	1	1	-	1
11	II/a	7	3	4	7
12	I/d	1	1	-	1
Jumlah		58	48	10	58
B. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)					
1	VII	1	-	1	1
Jumlah		1	-	1	1
C. Tenaga Non ASN					
1	Non ASN	396	342	54	396
Jumlah		396	342	54	396
Total		455	390	65	455

Sumber: PTI Satpol PP Kota Padang

Sarana dan Prasarana

Dari segi sarana dan prasarana, Satuan Polisi Pamong Praja telah menempati ruangan kantor yang kurang memadai namun masih diperlukan ruangan tambahan khusus untuk tempat istirahat anggota (barak) dan ruangan arsip. Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki sejumlah peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer dan sebagainya namun seiring dengan bertambahnya volume pekerjaan maka dibutuhkan lebih banyak sarana-prasarana kantor. Selain itu diperlukan juga tambahan armada operasional seperti mobil Dalmas, Banteng dan Patroli. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada beberapa tabel-tabel berikut ini:

No	Aset/Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
Alat-alat Angkutan			
1	Mini bus	5 unit	baik
2	Truck	3 unit	baik
3	Pick Up	9 unit	baik
4	Sepeda Motor	16 unit	baik
Jumlah		33 unit	baik

7. Untuk indikator kinerja **indeks kualitas lingkungan hidup**, efisiensi penggunaan sumber daya dapat diketahui dari :

a. Sumber Daya Manusia.

Dalam meningkatkan kinerja tahunan, diperlukan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana pendukung kegiatan. Untuk sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup masih kekurangan SDM yang sesuai dengan formasi Jabatan fungsional tertentu dan kompetensi serta latar belakang pendidikan untuk setiap SDM. Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari PNS dan pegawai honor/kontrak. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.A.6.2
Jumlah Personil Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Terisi
1	Eselon II	1	1
2	Eselon III	5	5
3	Eselon IV	8	8
4	Jabatan fungsional	103	19
Total		117	33

Tabel 3.A.6.3
Jumlah Personil Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	ASN	
	A. PNS	
	Golongan IV	8
	Golongan III	53
	Golongan II	113

	Golongan I	24
	B. PK3	
	IX	3
	VII	5
2.	Non PNS	
	A. Honor & Kontrak	370
	B. Petugas Kebersihan Keindahan Kota (PK3)	276
	C. Outsourcing	42
	D. Honor & Kontrak Kegiatan Labor	2
Total		896 Orang

Tabel 3.A.6.4
Jumlah Personil ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktor (S3)		1	1
2	Master (S2)	5	4	9
3	Sarjana (S1)	8	20	28
4	Diploma (D3/D4)	4	8	12
5	SLTA	114	4	118
6	SMP	21		21
7	SD	17		17
	Jumlah	169	37	206

Tabel 3.A.6.5
Jumlah Personil Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktor (S3)			
2	Master (S2)		1	1
3	Sarjana (S1)	38	29	67
4	Diploma (D3/D4)	8	11	19
5	SLTA	333	46	379
6	SMP	91	3	94
7	SD	80	8	88
	Jumlah	550	98	648

No	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Pengendali Dampak Lingkungan	0	2	0	0
2	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	1	1	0	0
3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Penyuluh Lingkungan	1	3	0	0
4	Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	PPNS	0	0	0	0

b. Sarana prasarana

Dari data jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup kota Padang, dibandingkan dengan kebutuhan masih banyak yang kurang mulai dari armroll truck, dumptruck, pick up kontainer sampai becak motor pengangkut sampah. Untuk penanganan sampah terutama pengangkutan sampah dari TPS/Kontainer ke TPA dilakukan dengan menambah ritasi dumptruck dan armroll truck menjadi 2 (dua) dan 3 (tiga) ritasi. Adapun upaya yang dilakukan dalam penanganan sampah (pembersihan dan pengangkatan sampah) di kota Padang agar tercapai maka dilakukan penanganan sampah secara bertingkat dan terintegrasi :

- Mobil Dumptruck berlari mulai jam 03.00 s/d jam 07.00
- Mobil Pick up, Penyisiran/pengangkatan sampah mulai jam 06.00 s/d 12.00
- Mobil Pick up Patroli, melaksanakan sosialisasi, patroli dan penyisiran jam 06.00 s/d 17.00
- Mobil Arm roll, melaksanakan pengangkatan sampah kontainer jam 17.00 s/d 05.00
- Mobil Truck Goro, melaksanakan pengangkutan sampah dan ransang pada landasan/titik penempatan kontainer, sampah pohon tumbang dan sampah TPS Liar mulai Jam 08.00 s/d selesai.

- Memanfaatkan perahu sampah yang merupakan salah satu CSR dari BUMD yang berfungsi untuk membersihkan sampah di perairan Sungai. Perahu ini sengaja dirancang untuk pengelolaan sampah di perairan sungai.
 - Perangkat/Jebakan sampah ini dipasang dan dibangun untuk meminimalisir sampah-sampah yang berasal dari saluran- saluran terbuka terbawa menuju badan Sungai Batang Arau sehingga dampak pada Sungai ini dapat dikurangi.
 - Penerapan Sistem 2 (Dua) Shift untuk Pengangkutan Sampah Menggunakan Becak Motor Roda Tiga. Sistem ini diterapkan untuk mengatasi permasalahan penanganan sampah dari ruang publik karena waktu timbulnya sampah yang sangat acak.
 - Pemantauan dan Pengujian Kualitas Air dan Udara di lakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada Semester I bulan Januari s.d Juni dan Semester II bulan Juli s.d Desember yang telah ditentukan lokasinya.
 - Pemantauan Kualitas Udara juga dilakukan melalui alat AQMS untuk mengetahui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang alatnya berada di Balai Kota Aie Pacah yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas udara, memberikan informasi tentang potensi dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia, sebagai peringatan dini bagi masyarakat di daerah rawan kebakaran dan hutan dan lahan.
 - Pemantauan Kualitas Lahan/Degradasi Lahan untuk produksi Biomassa dilakukan 1 kali setahun dengan melakukan sampel uji tanah pada lokasi yang diprediksi sudah mengalami kerusakan lahan.
8. Untuk indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka, efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari pencapaian penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT efektifitas program kegiatan lebih diutamakan mengingat ketercapaian tujuan lebih memberi dampak besar dibandingkan dengan efisiensi sumber daya. Namun kondisi saat ini, masih kurangnya tenaga fungsional tertentu seperti fungsional pengantar kerja turut signifikan dalam mempengaruhi efektifitas penempatan tenaga kerja dalam rangka menekan angka Tingkat Pengangguran Terbuka, fungsional pengantar kerja yang ada berupaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini.
9. Untuk indikator kinerja tingkat kemiskinan, efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dalam melaksanakan pelayanan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Padang, Dinas Sosial dihadapkan pada masalah kekurangan sumberdaya manusia. Kekurangan ini

sangat dirasakan dalam hal penjangkauan anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan PSK. Untuk itu Dinas Sosial selalu menjalin Kerjasama dengan Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD Dr Rasidin, RS HB Saanin, PSKW Andam Dewi, IPWL Pelita Jiwa Insani, PSTW Sabai Nan Aluih, PSTW Kasih Sayang Ibu.

Selain itu, Dinas Sosial didukung dengan sarana 1 unit gedung kantor, 1 unit gedung layanan Pusskesos SLRT Bundo Kandung, 1 unit LPKS dan 40 unit rumah binaan desaku menanti. Rumah desaku menanti merupakan rumah tinggal sementara bagi keluarga gelandangan dan pengemis. Disini mereka akan dibina dan dilatih keterampilan agar bisa mandiri sehingga terlepas dari statusnya sebagai gelandangan dan pengemis.

Gambar 3.A.6.6
Rumah Desaku Menanti



Untuk menangani anak yang berhadapan hukum (ABH), Dinas Sosial menyediakan satu Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu. Disini anak yang berhadapan dengan hukum akan dibina, diberikan perlindungan dan pendampingan. Sehingga hak anak atas perlindungan tetap terpenuhi.

Gambar 3.A.6.7
Gedung LPKS Kasih Ibu



Dalam pemberian pelayanan terhadap masyarakat, Pemko Padang khususnya Dinas Sosial masih mengalami kendala berupa kekurangan tenaga ASN yang bisa melayani masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, Dinas Sosial selalu terbuka menerima mahasiswa yang akan melakukan program magang. Untuk itu mahasiswa akan diberdayakan membantu semua Bidang yang ada. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh pengalaman kerja di bidang administrasi dan pelayanan masyarakat.

Dalam upaya penurunan kemiskinan di Kota Padang, pemerintah tidak hanya tergantung kepada APBD Kota Padang, tetapi juga berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat, dan juga APBN, CSR dan Lembaga Sosial lainnya.

10. Untuk indikator kinerja **Peningkatan nilai PMA Peningkatan nilai PMDN** efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari :
 - a. Sumber Daya Anggaran, rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran DPMPSTSP Kota Padang Tahun 2024 sebesar 238,65% dapat dicapai dengan menggunakan anggaran sebesar 56,61 % dari pagu sub kegiatan Rp 638.227.000,-. Sehingga, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 182,04%. Artinya, DPMPSTSP Kota Padang telah melaksanakan perencanaan kinerja dan anggaran dengan baik, karena anggaran yang dimiliki mampu dimaksimalkan untuk

pencapaian kinerja dengan kategori Sangat Baik. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan.

Penggunaan anggaran pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal belum menambah secara signifikan jumlah pelaku usaha yang melaporkan LKPM. Kemudian upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal seperti sosialisasi dan penyediaan media informasi layanan perizinan belum maksimal dalam meningkatkan jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan pada DPMPTSP Kota Padang. Dari Analisa Jabatan yang sudah dibuat di DPMPTSP dan sudah dikirim ke BKPSDM Kota Padang terdapat kebutuhan.

b. Sarana dan Prasarana

Penggunaan salah satu kendaraan operasional yang dimanfaatkan menjadi salah satu sarana untuk pelaksanaan MPP Mobile. Diantaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat pada CFD setiap hari minggu.

11. Untuk indikator kinerja **pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (e-kraf), Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara, Jumlah Kunjungan Wisata Domestik, Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara Serta Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Domestik**, efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari :

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dinas Pariwisata selaku OPD yang termasuk kedalam visi, misi dan program unggulan kepala daerah, dengan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia telah mampu melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pariwisata didukung oleh tenaga PNS sebanyak 26 orang, P3K sebanyak 5 orang, tenaga Non PNS sebanyak 21 orang, 66 orang petugas kebersihan pantai dan ditahun 2022 dengan berdirinya Gedung Youth Center (YC) terdapat penambahan personil sebanyak 15 orang. Jam operasional YC Senin - Minggu pukul 8.00 - 20.00 WIB, dengan padatnya dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap pemakaian gedung YC, mengharuskan petugas YC bekerja melebihi jam kerja

biasanya guna memberikan pelayanan yang maksimal, dengan kondisi ini diberdayakanlah petugas yang ada dengan piket secara bergiliran membantu pembuatan konten-konten kreatif promosi pariwisata, serta memberdayakan mahasiswa yang sedang melakukan praktek kerja lapangan pada Dinas Pariwisata Kota Padang.

b. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi di Kota Padang, tentu saja dibutuhkan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana pada Dinas Pariwisata Kota Padang. Dalam meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana pada objek wisata di Kota Padang Dinas Pariwisata Kota Padang dibantu oleh beberapa pihak yaitu :

1. PT Semen Padang melalui program CSR berupa pembangunan dan pembenahan terhadap DTW Goa Kelelawar.

12. Untuk indikator kinerja **persentase peningkatan kelurahan tangguh bencana**, efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari Efisiensi terhadap sumber daya anggaran pada tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sasaran Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana dengan indikator Persentase Kelurahan Tangguh Bencana, Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi dan Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang didukung oleh Program Penanggulangan Bencana dan terdapat realisasi kinerja sebesar 100 % dengan realisasi keuangan Rp. 4.903.143.373,97 dengan persentase 91,97% serta Rata-rata capaian dari tiga indikator mempunyai tingkat efisiensi sebesar 5.98 % dan efektivitas sebesar 100 %. Hal ini membuktikan segala upaya terkait penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD bisa dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan/target yang sudah dijadwalkan dan sudah berhasil melakukan efisiensi atau penghematan penggunaan anggaran daerah sebesar 5.98 %.

13. Untuk indikator opini BPK atas laporan keuangan (predikat), efisiensi sumber daya dapat dilihat dari :

- a) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya

umumnya dilaksanakan di hotel, pada tahun 2023 kegiatan pendampingan lebih banyak dilaksanakan di Ruang BPKAD Kota Padang sehingga terdapat efisiensi dalam anggaran sewa hotel.

- b) Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Aset (Barang Milik Daerah) juga lebih banyak dilakukan dengan metode daring maupun pemanfaatan ruang rapat di BPKAD Kota Padang dan ruang rapat SKPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Padang dibandingkan pelaksanaan kegiatan di hotel.

Gambar 3.A.6.8
Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Aset (Barang Milik Daerah)



14. Untuk indikator kinerja nilai laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota (Nilai), efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari jumlah SDM yang ada pada Bagian Tata Pemerintahan saat ini masih sangat jauh dari keadaan idealnya, dimana jumlah formasi yang ada sebanyak 23 formasi sehingga saat ini masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 13 orang. Dengan kondisi yang ada, beban tugas yang berlebih tertumpu pada beberapa orang, hal ini nantinya akan

menyebabkan kurang kondusifnya kondisi lingkungan kerja Bagian Tata Pemerintahan. Secara keseluruhan ASN pada Bagian Tata Pemerintahan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD Kota Padang tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023, namun kegiatan ini didukung oleh tim inti penyusun sebanyak 3 orang ASN, 3 orang tim inti ini melakukan verifikasi dan evaluasi data dari setiap OPD yang terlibat dalam penyusunan LPPD.

3.A.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

1. Untuk indikator kinerja rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah ditunjang oleh program:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
(1)	(2)	(3)	(4)
(A)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Realisasi anggaran sebesar 72,80 % di karenakan, adanya kesalahan dalam penarikan NPD, keterlambatan penyelesaian katalog makan minum rapat di sebabkan terkendala pada sistem dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sehingga pelaksanaan kurang efektif	untuk tahun anggaran berikutnya akan mengefektifkan pelaksanaan dan lebih hati-hati dalam penarikan NPD
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Realisasi anggaran sebesar 75,34 % di karenakan, adanya kesalahan dalam penarikan NPD, keterlambatan penyelesaian katalog makan minum rapat di sebabkan terkendala pada sistem dan pekerjaan telah selesai dilaksanakan sehingga waktu pelaksanaan kurang efektif.	untuk tahun anggaran berikutnya akan mengefektifkan pelaksanaannya dan lebih hati hati dalam penarikan NPD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Realisasi anggaran sebesar 72,80 % di karenakan, Adanya keterlambatan penyelesaian e katalog makan minum rapat dan waktu pelaksanaan yang kurang efektif.....	untuk tahun anggaran berikutnya akan mengefektifkan pelaksanaannya

	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi anggaran sebesar 70,48 % di karenakan adanya efisiensi dana lembur yang hanya bisa dibayarkan untuk pegawai non PNS	Untuk Tahun anggaran berikutnya lebih cermat lagi dalam penghitungan kebutuhan dana Lembur untuk pegawai non PNS Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
II Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Realisasi anggaran sebesar 47,93 % di karenakan Tidak adanya Tim Penilai Angka Kredit karena PAK diganti dengan E-Kinerja Tidak dilakukan pembayaran Honor Tim Penilai Angka Kredit	Untuk tahun anggaran berikutnya akan mengefektifkan perhitungannya Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
III Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Realisasi anggaran sebesar 74,38 % di karenakan, harga pembelian kendaraan di bawah Pagu Anggaran yang ada	Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
	2	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Realisasi anggaran sebesar 68,44 % di karenakan, harga nilai sewa tanah dan bangunan di bawah Pagu Anggaran	Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
IV Kegiatan Penataan Organisasi				
	1	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Realisasi anggaran sebesar 39,85 % di karenakan, tidak bisa dibayarkan SPPD untuk Tim Monev	Untuk tahun anggaran berikutnya akan mengefektifkan perhitungan anggarannya
(B) Program Pengelolaan Pendidikan				
I Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Realisasi anggaran sebesar 37,80 % di karenakan, 1. Banyaknya penerima yang tidak mengantarkan bahan 2. Banyaknya siswa penerima yang berada di jenjang berbeda	1. Menginformasikan kepada penerima agar mengirimkan bahan agar dapat diverifikasi 2. Menginformasikan kepada pengusul agar mengusulkan calon penerima di jenjang yang sama

	2	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Realisasi anggaran sebesar 79,92 % di karenakan, adanya perubahan sistem pelaksanaan kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang diawal dilaksanakan dengan sistem OSN berbasis Android berubah menjadi OSN berbasis ANBK sehingga adanya perubahan kegiatan.	Akan mengatur ulang teknis pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) sesuai dengan regulasi dan juknis yang di berikan oleh kemendikbudristek
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Realisasi anggaran sebesar 79,64 % di karenakan, adanya pengangkatan dari pegawai honor BOSDA menjadi PPPK	Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
	4	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Realisasi anggaran sebesar 62,97% di karenakan, 1. Honor Narasumber pada kegiatan bimtek hanya terealisasi 50 % karena narasumbernya berasal dari Disdikbud sehingga pembayaran honorinya sebesar 50% dari pagu anggaran. 2. Peserta bimtek berkurang dari tahun 2023 karena adanya regrouping 70 SDN menjadi 40 SDN	Berkoordinasi dengan TAPD tentang kebijakan pembayaran honorarium narasumber yang berasal dari OPD sendiri. Dan berkoordinasi dengan Bidang Anggaran bagaimana pilihan di SIPD terdapat alokasi anggaran untuk narasumber yang berasal dari dalam OPD sendiri. Sehingga di SIPD tidak lagi memilih anggaran untuk narasumber yang berasal dari luar OPD.
II Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	1	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Realisasi anggaran sebesar 28,30% di karenakan, Banyaknya penerima yang tidak mengantarkan bahan Banyaknya siswa penerima yang berada di jenjang berbeda	Menginformasikan kepada penerima agar mengirimkan bahan untuk dapat diverifikasi Menginformasikan kepada pengusul agar mengusulkan calon penerima di jenjang yang sama
	2	Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Realisasi anggaran sebesar 78,41% di karenakan, adanya pengangkatan dari pegawai honor BOSDA menjadi PPPK	Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah
	3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Realisasi anggaran sebesar 40,05% di karenakan, 1. Honor Narasumber pada kegiatan bimtek hanya terealisasi 50 % karena narasumbernya berasal dari Disdikbud sehingga pembayaran honorinya sebesar 50% dari pagu anggaran. 2. Terdapat kesalahan	Berkoordinasi dengan TAPD tentang kebijakan pembayaran honorarium narasumber yang berasal dari OPD sendiri. Dan berkoordinasi dengan Bidang Anggaran bagaimana pilihan di SIPD terdapat alokasi anggaran untuk

			menghitung jumlah peserta bimtek	narasumber yang berasal dari dalam OPD sendiri. Sehingga di SIPD tidak lagi memilih anggaran untuk narasumber yang berasal dari luar OPD.
III Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
	1	Pengadaan Mebel PAUD	Realisasi anggaran sebesar 71,16% di karenakan, adanya sisa tender	Sisa pagu dana merupakan silpa pada kas daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
IV Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
	1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Realisasi anggaran sebesar 75,43% di karenakan, data peserta didik yang memenuhi persyaratan tidak mendukung (DTKS)	Mengoptimalkan pendataan peserta didik penerima manfaat
	2	Pengadaan Mebel Sekolah	Realisasi anggaran sebesar 0,00% di karenakan, tidak bisa dilaksanakan sebab terdapat kesalahan input kode rekening pada DPA yang seharusnya terletak pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Memastikan bahwa penginputan data di SIPD sesuai peruntukannya dengan Kegiatan dan sub Kegiatan
(C) Program Pengembangan Kebudayaan				
I Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Realisasi anggaran sebesar 22,11% di karenakan, tidak terlaksananya kegiatan penyusunan Pokir Kebudayaan Daerah (PPKD) Kota Padang disebabkan Honorarium Nartasumber tidak bisa dibayarkan karena Narasumber tidak mempunyai Sertifikat berstandar nasional sebagai ahli budaya	Di upayakan kembali untuk merevisi Narasumber yang punya sertifikat untuk tahun 2025

	2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	<p>Realisasi anggaran sebesar 47,75% di karenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Majalah Kebudayaan tidak terlaksana di perubahan karena tulisan tidak mencukupi. 2. Kegiatan Serak Gulo terjadi efisiensi karena dalam pembelian harga di SIPD lebih tinggi dari harga real nya. 3. Kegiatan Pokir Rp. 50.000.000 tidak cair karena terdapat double nama penerima. 	Untuk tahun anggaran 2025 diupayakan agar proposal pengajuan fikiran tidak terdapat double penerima
II Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	<p>Realisasi anggaran sebesar 58,33% di karenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 1 lembaga Bundo Kandung Koto tengah dimana anggaran di DPA Rp. 50.000.000,- tetapi yang bisa dicairkan hanya Rp. 25.000.000,- sesuai dengan Perwako Hibah. 2. Terdapat 1 paket yang tidak bisa dicairkan sebesar Rp. 10.000.000,- disebabkan Lembaga tersebut sudah mendapat di tahun 2023 karena sesuai Perwako tidak dibenarkan mendapat bantuan 2 tahun berturut turut 	Untuk tahun berikutnya dalam penganggaran diupayakan lembaga yang mengajukan proposal mengacu kepada aturan sesuai Perwako.
(D) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				
I Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan (Solusi)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sub Kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya	<p>Realisasi anggaran sebesar 32,09% di karenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya belanja franchise dan lisensi film yang tidak bisa direalisasikan karena sistem pembelian di ANRI ternyata harus per paket, sedangkan dalam penganggaran di buat per item dengan SHB yang jauh berbeda. 2. Adanya belanja ATK berupa frame foto dan kertas yang belum bisa direalisasikan kerana Gedung BPPI Pasa Gadang masih dalam proses renovasi dan perbaikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu diajukan usulan harga baru terkait paket belanja lisensi dan franchise film sesuai dengan sistem pembelian di ANRI. 2. Perlu dilakukan penganggaran ulang setelah semua renovasi dan perbaikan selesai dilakukan

2. Untuk indikator kinerja **angka harapan hidup** ditunjang oleh 1 (satu) program yang meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan capaian program 99,48% .
3. Untuk indikator kinerja **indeks pembangunan gender** ditunjang oleh 6 (enam) program yang meliputi Program Pengarusutamaan Genderr dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak, Program Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
4. Untuk indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perhubungan** ditunjang dengan 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
5. Untuk indikator kinerja **angka kriminalitas** ditunjang oleh 1 (satu) program yang meliputi program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan rincian:
 - i. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi sebanyak 5 Dokumen.
 - Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah Operasi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan SK4 sebanyak 40 Dokumen.
 - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah personil yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 406 Orang.
 - Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan output sub kegiatan ini adalah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan sebanyak 12 Dokumen.
 - Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah Operasi Penanggulangan Keamanan Kota sebanyak 403 Laporan.
 - Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa dengan output sub kegiatan ini adalah jumlah Operasi Keamanan dan Ketertiban sebanyak 39 Laporan.
- ii. Kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

6. Untuk indikator kinerja **indek kualitas lingkungan hidup**, Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja Dinas Lingkungan Hidup berada pada Bidang P2HL (Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan) dan bidang P2LH (Pertamanan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup). Indikator IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) terdiri dari IKA, IKU dan IKL dengan kegiatan pendukung seperti di bawah ini :

1. Indikator : Indeks Kualitas Air (IKA)

(Target Kinerja : 69.77) (Realisasi Kinerja : 69.07)

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
 - i. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dengan sub kegiatan :
 - *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut* , adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian diantaranya :
 - Melakukan monitoring penilaian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - Merancang kondisi lahan dan/atau tanah
 - Melakukan Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan tata ruang dan pemanfaatan ruang
 - *Pengelolaan Laboratorium*, adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian diantaranya :
 - Melakukan pemantauan dan pengujian kualitas air sungai 2 kali dalam setahun, sampel diambil pada 5 (lima) sungai kecil yaitu Sungai Batang Guo, Sungai Batang Ampalu, Sungai Banjir Kanal, Sungai Batang Taruang dan Sungai Lareh serta 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Batang Arau dan Sungai Aie Dingin.
 - Melakukan pemantauan dan pengujian kualitas udara ambien yang dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu Tahap I pada bulan Januari- Juni 2024 dan tahap II pada bulan Juli-Desember 2024. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di area perumahan, kantor, pusat perniagaan, pusat pendidikan, kawasan TPA di kota Padang.

- Melakukan sertifikasi laboratorium untuk menjadi labor yang terakreditasi sehingga hasil uji kualitas air ataupun udara terjamin legalitasnya dan menjadi sumber PAD yang bersumber dari Laboratorium.
- b) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- i. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan sub kegiatan :
- *Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*, adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian diantaranya :
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebanyak 25 usaha/kegiatan
 - Melakukan pengawasan pembuangan air limbah ke badan air atau sumber air yang dilakukan oleh masyarakat, usaha/atau kegiatan
 - Melakukan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun (LB3) pada usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3.
 - Melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi izin lingkungan sebanyak 20 izin lingkungan
- c) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan sub kegiatan :
- *Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan*, adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian diantaranya
 - Melaksanakan pemrosesan dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Pada tahun 2024 ini ada 53 (lima puluh tiga) pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup.
 - Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengaduan perusakan di bidang lingkungan hidup.

2. Indikator : Indeks Kualitas Udara (IKU)

(Target Kinerja : 74.11) (Realisasi Kinerja : 87.80).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan :

a) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

i. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dengan sub kegiatan :

- *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut* , adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian diantaranya :
 - Melakukan monitoring penilaian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - Merancang kondisi lahan dan/atau tanah
 - Melakukan Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan tata ruang dan pemanfaatan ruang
- *Pengelolaan Laboratorium*, adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian diantaranya :
 - Melakukan pemantauan dan pengujian kualitas air sungai 2 kali dalam setahun, sampel diambil pada 5 (lima) sungai kecil yaitu Sungai Batang Guo, Sungai Batang Ampalu, Sungai Banjir Kanal, Sungai Batang Taruang dan Sungai Lareh serta 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Batang Arau dan Sungai Aie Dingin.
 - Melakukan pemantauan dan pengujian kualitas udara ambien yang dilakukan sebanyak 2 tahap yaitu Tahap I pada bulan Januari- Juni 2024 dan tahap II pada bulan Juli-Desember 2024. Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di area perumahan, kantor, pusat perniagaan, pusat pendidikan, kawasan TPA di kota Padang.
 - Melakukan sertifikasi laboratorium untuk menjadi labor yang terakreditasi sehingga hasil uji kualitas air ataupun udara terjamin legalitasnya dan menjadi sumber PAD yang bersumber dari Laboratorium.

b) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

i. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan sub kegiatan :

- *Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian diantaranya :*
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebanyak 25 usaha/kegiatan
 - Melakukan pengawasan pembuangan air limbah ke badan air atau sumber air yang dilakukan oleh masyarakat, usaha/atau kegiatan
 - Melakukan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun (LB3) pada usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah B3.
 - Melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi izin lingkungan
- c) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan sub kegiatan :
- *Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan, adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian diantaranya*
 - Melaksanakan pemrosesan dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Pada tahun 2023 ini ada 56 (lima puluh enam) pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup.
 - Melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pengaduan perusakan di bidang lingkungan hidup.

3. Indikator : Indeks Kualitas Lahan (IKL)

(Target Kinerja : 72.34) (Realisasi Kinerja : 71.78).

Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut diatas, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan :
- i. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
- *Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendukung pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL), adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian diantaranya :*

- Melakukan pengawasan, perawatan, dekorasi kota, pembibitan taman-taman, pemeliharaan ornamen, pembangunan taman, ruang terbuka hijau, dan penghijauan kota
- Melakukan penyediaan, perawatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan dan pembibitan
- Melakukan pemeliharaan taman, ruang terbuka hijau, serta pohon pelindung
- Memberi rekomendasi izin reklame yang berada pada taman kota dan ruang terbuka hijau.

b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

ii. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dengan sub kegiatan :

- *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut* , adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian diantaranya :
 - Melakukan monitoring penilaian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - Melakukan monitoring degradasi tanah/lahan untuk produk biomassa
 - Melakukan Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - Melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan tata ruang dan pemanfaatan ruang

7. Untuk indikator kinerja **persentase perumahan dan permukiman yang alayak dan luas kawasan kumuh yang ditangani**, ditunjang oleh program berikut:

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
Program Kawasan Permukiman	1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Menyusun dokumen inventarisasi dan verifikasi terhadap data pendukung SPM Bidang sanitasi dan air minum, Mendukung pelaksanaan kegiatan P2KP/Kotaku

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan		
	2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Menyusun dokumen RP2KPKPK Kota Padang Tahun 2025-2029
			2	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Melaksanakan survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
	3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 sepuluh Ha	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni
			2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Menyusun dokumen Pendampingan BSPS yang dilaksanakan
			3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Menyusun site plan dan DED peremajaan/pemugaran lokasi permukiman kumuh, serta Pendampingan HALS Sanitasi
			4	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Membangun Infrastruktur sanitasi layak dilingkungan kawasan permukiman kumuh, Perbaikan jalan dan drainase lingkungan di Kawasan permukiman kumuh,

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
			Optimalisasi jaringan air minum di Kawasan Permukiman Kumuh.

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
Program Pengembangan Perumahan	1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Melakukan perbaikan dan rehab terhadap sarana dan prasarana serta utilitas Rusunawa
		2 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Melaksanakan operasional dan pemeliharaan terhadap rusunawa dan rusus
		3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Menyusun dokumen data spatial sektor perumahan di Kota Padang, jumlah peraturan terkait Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan
		4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dokumen rumah tidak layak huni yang divalidasi, Koordinasi antar anggota POKJA dan pihak pelaksana di bidang Perumahan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
			dan Kawasan Permukiman, Koordinasi penyediaan perumahan umum dan MBR yang dilaksanakan
Program Kawasan Permukiman	1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Menyusun dokumen inventarisasi dan verifikasi terhadap data pendukung SPM Bidang sanitasi dan air minum, jumlah dukungan pelaksanaan kegiatan P2KP/Kotaku
	2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 sepuluh Ha	1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni, Perbaikan rumah tidak layak huni dan sarpras yang ditingkatkan DAK
		2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Menyusun dokumen Pendampingan BSPS yang dilaksanakan
		3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Menyusun site plan dan DED peremajaan/ pemugaran lokasi permukiman kumuh, serta Pendampingan HALS Sanitasi
		4 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Membangun Infrastruktur sanitasi layak dilingkungan kawasan permukiman DAK, Infrastruktur sanitasi layak dilingkungan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
			kawasan permukiman, Infrastruktur sanitasi layak dilingkungan kawasan permukiman Dana Hibah APBN
		5 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Menyusun dokumen Kebijakan dan strategi daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah, Menyusun dokumen Kebijakan dan strategi daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, Menyusun dokumen Pemutakhiran / Review Dokumen RISPAM Kota Padang, Menyusun dokumen validasi data kawasan permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 sepuluh Ha	Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni diluar kawasan permukiman kumuh
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Menyusun dokumen perencanaan prasarana, sarana dan utilitas yang ditingkatkan dan direhabilitasi

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keterangan
		2 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jembatan lingkungan, drainase lingkungan, jalan lingkungan dan prasarana publik yang representatif
		3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Melakukan verifikasi PSU PKP yang diserahkan dan dikelola dari pengembang ke Pemko Padang
		4 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Melakukan Laporan Kerjasama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan
		5 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Melakukan Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang

8. Untuk Indikator kinerja **tingkat pengangguran terbuka** ditunjang oleh program yang meliputi program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. di antaranya kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Program penempatan tenaga kerja, diantara kegiatannya adalah perluasan kesempatan kerja, pelayanan antar kerja, informasi pasar kerja online dan lain sebagainya.
9. Untuk Indikator kinerja **tingkat kemiskinan** ditunjang oleh :
Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang tersebar di beberapa OPD terkait baik dari pusat maupun daerah dan dari badan usaha serta

Lembaga social bertujuan untuk:

- a. Menurunkan Beban Pengeluaran,
Melalui Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Layanan Pengobatan Masyarakat Miskin, Program Rehabilitasi Sosial, Bantuan Santunan Kematian, Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
- b. Meningkatkan Pendapatan,
Melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja , Pemberian Bantuan Bibit Dan Juga Benih Ternak, Bantuan Benih Ikan, Program Pengembangan UMKM
- c. Pengurangan Kantong-Kantong Kemiskinan
Meningkatkan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni , Meningkatkan Infrastruktur Sanitasi Layak di Lingkungan Kawasan Permukiman

Program Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yang diatur masing-masing. Secara garis besar, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) kewenangan Kabupaten/Kota terbagi menjadi 2, yaitu pemberdayaan terhadap PSKS perseorangan dan PSKS Kelembagaan.

Tahun 2024 Jumlah Anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebanyak Rp. 8.273.409.200,- terealisasi sebanyak Rp. 4.471.348.970,- Anggaran ini dimanfaatkan untuk pembinaan 312 orang PSM dan 11 orang TKSK, penyaluran bantuan sosial uang untuk 1.164 orang. Penyaluran bantuan social uang untuk fakir miskin hanya terealisasi sebesar 40%, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adanya Perwako nomor 34 tahun 2021. Perwako ini mensyaratkan bahwa calon penerima Bansos hanya dibolehkan menerima bantuan satu kali dalam satu tahun dan tidak membolehkan penerima bansos

menerima bantuan 2 kali berturut-turut. Selanjutnya penerima bansos juga harus terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Gambar 3.A.7.9
Proses Penyaluran Bantuan Sosial Uang



Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang terhadap Pekerja Sosial Masyarakat adalah dengan memberikan tali asih untuk 312 orang PSM. Hal ini merupakan penyemangat bagi PSM sabagai salah satu pilar social. Selanjutnya PSM juga diberikan bimbingan tekhnis untuk meningkatkan kemampuan dalam memeberikan pelayanan kesejahteraan social

Gambar 3.A.7.10
Bimbingan Tekhnis PSM



Pembinaan PSKS kelembagaan dilakukan terhadap panti asuhan, karang taruna dan kelompok usaha bersama (KUBE), Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS). Pembinaan dilakukan agar PSKS lebih mandiri sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan.

Gambar 3.A.7.11
Pembinaan Panti Sosial



Gambar 3.A.7.12
Penyaluran Bantuan Berusaha Untuk Lanjut Usia dan Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas



Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu layanan social yang bertujuan membantu seseorang yang memiliki keterbatasan social dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. Untuk itu beberapa kegiatan diberikan seperti, pemberian bantuan permakanan, bantuan sandang, bantuan alat bantu, bantuan usaha ekonomi produktif serta memberikan pelatihan terhadap penyandang disabilitas agar bisa hidup lebih mandiri.

Bantuan permakanan diberikan terhadap 110 orang penyandang disabilitas, 110 orang lanjut usia, 700 anak terlantar diluar panti, 13 orang janda perintis kemerdekaan.

Gambar 3.A.7.13
Pemberian Bantuan Permakanan Anak Terlantar Diluar Panti



Untuk menunjang kemandirian penyandang disabilitas dalam beraktifitas, diberikan bantuan berupa alat bantu. Tahun 2024 telah diserahkan bantuan kursi roda untuk 27 orang dan kaki palsu 4 orang. Untuk meningkatkan pendapatan PPKS khususnya gelandangan dan pengemis, diberikan pelatihan membuat kue. Disamping melatih keterampilan membuat kue, juga diberikan alat untuk membuat kue seperti mixer, kualii dan lain-lain.

Gambar 3.A.7.14
Pelatihan Keterampilan Membuat Kue



Permasalahan social lain yang juga mendapatkan perhatian pemerintah adalah keberadaan lanjut usia terlantar, anak terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan pengemis serta pekerja seks komersil. Selama tahun 2024 telah dilakukan penjangkauan terhadap 13 orang lanjut usia terlantar, 40 orang gelandangan dan pengemis, 31 orang anak jalanan, 13 orang pengamen dan 4 orang pedangan asongan. Hasil penjangkauan dilakukan assessment. Setelah diassessment akan dilakukan pencarian keluarga, kalau keluarga ditemukan maka akan dilakukan reunifikasi dengan keluarga, kalau keluarga tidak ditemukan akan dirujuk ke panti social. Untuk PSK akan dikirim ke panti social untuk dibina, sebagian lagi akan dipulangkan kepada keluarga dengan membuat surat perjanjian.

Gambar 3.A.7.15
Pemulangan Lanjut Usia terlantar



Gambar 3.A.7.16

Pembinaan PSK di Panti Rehabilitasi Sosial Andam Dewi



Anak jalanan yang telah dijangkau akan diberikan pembinaan dan dipulangkan kepada orang tua dengan membuat surat perjanjian. Sebagai anak diberikan pembinaan mental dan spiritual dengan bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama serta Batalyon 133 Yudha Sakti yang bertugas dalam pembinaan mental.

Gambar 3.A.7.17
Pembinaan Anak Jalanan



Pembinaan tidak hanya diberikan terhadap penyandang disabilitas, tapi juga diberikan terhadap keluarga yang merawat penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan karena merawat dan menjaga disabilitas dibutuhkan keahlian dan kesabaran tersendiri.

Gambar 3.A.7.18
Pembinaan Terhadap Keluarga Penyandang Disabilitas



Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan jaminan social adalah Upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan kesejahteraan social serta memberikan perlindungan bagi orang miskin dan rentan. Upaya ini dilakukan pertama sekali dengan melakukan pendataan fakir miskin dan mendaftarkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari jumlah tersebut sebanyak 212.847 jiwa sudah terlindungi Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dan 54.506 jiwa telah terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS).

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, penyaluran bantuan social terhadap masyarakat kurang mampu, baik secara tunai maupun non tunai, penerima manfaat harus memenuhi beberapa criteria, diantaranya harus terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sampai akhir Desember 2024 tercatat sebanyak 354.873 orang warga Kota Padang terdaftar pada DTKS.

Melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, pendataan dan pengelolaan data terpadu kesejahteraan social dikelola secara berjenjang. Pendaftaran DTKS dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui aplikasi cek bansos atau bisa juga mendaftar melalui operator di Kelurahan masing-masing. Hasil pendaftaran tersebut akan direkap di tingkat kelurahan untuk dibahas

pada musyawarah kelurahan (Muskel). Hasil keputusan musyawarah kelurahan akan menghasilkan daftar usulan DTKS. Berita Acara muskel akan diverifikasi pada Dinas Sosial untuk selanjutnya akan diteruskan pada Pusdatin Kemensos. Selanjutnya Kemensos melalui Pusdatin akan mengeluarkan SK DTKS.

Masyarakat yang telah terdaftar pada DTKS sudah berhak mendapatkan salah satu bantuan social, sesuai dengan ketersediaan kuota yang ada di tingkat pusat ataupun daerah.

Gambar 3.A.7.19
Proses Verifikasi dan Validasi DTKS dan Pemutakhiran Data Jaminan Kesehatan



Salah satu bantuan social yang disalurkan berbasis DTKS adalah bantuan social Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program PKH terdiri dari berbagai komponen, seperti :

- Komponen Kesehatan untuk ibu hamil/nifas/menyusui dan anak usia dini/Balita
- Komponen Pendidikan untuk anak usia 6 sampai 21 tahun
- Komponen Kesejahteraan Sosial untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas berat.

Penyaluran bantuan social PKH diberikan selama KPM masih memenuhi criteria yang telah ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah KPM tidak memenuhi syarat atau sudah mampu (kaya).

Gambar 3.A.7.20
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
dan Peningkatan SDM Pendamping PKH



Selain penyaluran bantuan social, juga dilaksanakan pengembangan ekonomi keluarga yang tergabung dalam Keompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsa dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

KUBE dibentuk dengan susunan kepengurusan yang lengkap (ketua, sekretaris, bendahara), dengan anggota yang wajib terdaftar pada DTKS.

Gambar 3.A.7.21
Penyaluran Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin



10. Untuk Indikator kinerja **Peningkatan Nilai PMA, Peningkatan Nilai PMDN dan Indeks Kemudahan Perizinan Daerah**, ditunjang oleh 5 (lima) program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Modal, Program Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal. Ini dilakukan dengan adanya Sosialisasi dan temu usaha bagi pelaku usaha yang juga bertujuan untuk mencapai target peningkatan realisasi investasi daerah. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha, lembaga pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan difasilitasi dalam suatu forum untuk saling berbagi (sharing) informasi berkaitan dengan iklim investasi di Kota Padang. Para pelaku usaha dalam kesempatan tersebut diberi penjelasan tentang regulasi penanaman modal, kemudahan berusaha (insentif) dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Dimana masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan iklim investasi di Kota Padang.

Program penunjang keberhasilan dari pencapaian kinerja adalah pada Program Promosi Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp.72.177.000,- terealisasi anggaran sebesar Rp. 64.878.000,- atau 89,89%, Program Pelayanan Penanaman Modal pagu anggaran sebesar Rp. 432.095.150,- terealisasi sebanyak Rp. 424.716.624 atau 98,29, Program Pengendalian Modal

merupakan dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 638.227.000,- terealisasi sebanyak Rp. 442.467.080,- atau 69,33 dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 85.340.000,- terealisasi sebanyak Rp. 84.936.000,- atau 99,53%. Untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, ada kegiatan Sosialisasi dan temu usaha bagi pelaku usaha yang juga bertujuan untuk mencapai target peningkatan realisasi investasi daerah. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha, lembaga pemerintah dan lembaga sosial kemasyarakatan difasilitasi dalam suatu forum untuk saling berbagi (sharing) informasi berkaitan dengan iklim investasi di Kota Padang. Para pelaku usaha dalam kesempatan tersebut diberi penjelasan tentang regulasi penanaman modal, kemudahan berusaha (insentif) dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Dimana masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan iklim investasi di Kota Padang.

11. Untuk Indikator kinerja **pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (e-kraf)** didukung dengan 1 (satu) program yaitu program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
12. Untuk Indikator kinerja **Kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Sumatera Barat** didukung oleh 1 (satu) program yaitu program pemasaran pariwisata. Melalui program ini dilaksanakan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri, fasilitasi pemasaran pariwisata, penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata serta peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.
13. Untuk Indikator kinerja **jumlah kunjungan wisata mancanegara, jumlah kunjungan wisata domestik, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara**

serta rata-rata lama tinggal wisatawan domestik didukung dengan 1 program yaitu peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.

14. Untuk Indikator kinerja **persentase peningkatan kelurahan tangguh bencana** ditunjang dengan Program Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dinilai merupakan faktor pendukung tercapainya kinerja BPBD Kota Padang dalam melakukan meningkatkan kemandirian mitigasi bencana bagi masyarakat.

No	Uraian Program/ Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			100%	100%	100%	5,330,977,424,-	4,903,143,373.97,-	91.97
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
	1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	20000 orang	20000 orang	100	868,088,224,-	732,171,200,-	84.34
2	Pelayanan Pencegahan dan								

No	Uraian Program/ Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
1	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 kawasan	1 kawasan	100	731,997,400,-	699,717,261.97,-	95.59
2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	40 Orang	40 Orang	100	128,405,100,-	96.471.300,00	75,13
3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	100 Orang	100	181,770,000,-	170,626,800,-	93.87
4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	97 Unit	97 Unit	100	1,069,940,900,-	1,060,129,730,-	99.08
5	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatus yang mengikuti pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	100	462,046,000,-	404,415,800,-	87.53
6	Pengendalian Operasi dan		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian	1 dokumen	1 dokumen	100	991,609,800,-	964,692,642,-	97.29

No	Uraian Program/ Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota		operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya						
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	100	15,000,000,-	0,-	0,-
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 dokumen	1 dokumen	100	15,000,000.00,-	6,369,200.00,-	42.46
3	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	750 Orang	750 Orang	100	561,000,000,-	544,760,000,-	97.11
4	Aktivasi Sistem Komando		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem	1 laporan	1 laporan	100	15,000,000,-	0,-	-

No	Uraian Program/ Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penanganan Darurat Bencana		Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota						
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
1	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (spm) Sub Urusan Bencana kota		Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	1 dokumen	100	10,376,000,-	8,180,500,-	78.84
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten kota		Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan,	20 Lembaga	20 Lembaga	100	42,000,000,-	10.200.000,00	24,29

No	Uraian Program/ Kegiatan	Kebijakan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaar dan legal						
3	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (jitupasna) Dan Rencana Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana (r3p) Kab kota		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 dokumen	2 dokumen		238,744,000,-	205,408,940,-	86.04

15. Untuk Indikator kinerja **Opini BPK Atas Laporan Keuangan** ditunjang dengan 3 program yaitu : Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam pencapaian target kinerja “Wajar Tanpa Pengecualian” ditunjang oleh adanya Program/Kegiatan sebagai berikut:

- a. Adanya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang dengan cakupan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

- SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sehingga sumber daya yang diperlukan untuk pencapaian kinerja dapat terpenuhi dengan adanya kegiatan dimaksud.
- b. Adanya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang mencakup antara lain koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, DPA- SKPD dan koordinasi dan penyusunan regulasi dan kebijakan Bidang Anggaran, sehingga APBD yang disusun oleh SKPD sudah sesuai dengan aturan keuangan.
 - c. Adanya kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan sub kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban, Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran, Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga menunjang OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan akuntansi pemerintahan;
 - d. Adanya kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sehingga BPKAD Kota Padang dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang dapat melaksanakan rekonsiliasi aset secara optimal untuk kelancaran Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
16. Untuk Indikator kinerja **Nilai AKIP ditunjang dengan** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan dukungan terhadap capaian kinerja tersebut dilakukan pembentukan tim, asistensi dan verifikasi data SAKIP Kota dan SAKIP Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah, perumusan pohon kinerja,

cascading dan penyusunan focus integrated program/crosscutting serta melakukan revisi terhadap perjanjian kinerja.

Belum tercapainya target SAKIP A, antara lain:

- a. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan level Kota, dan memastikan hasil penyempurnaan tersebut tertuang dengan baik dalam penetapan RPJMD tahun berikutnya agar tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya berorientasi pada hasil;
- b. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN
- c. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja baik level Pemkot maupun PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dalam dokumen perencanaan tahun berikutnya;
- d. Melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja Pemda dan PD;
- e. Mendorong pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal yang sudah dilakukan sebagai bagian dari penilaian reward and punishment kepada PD, sehingga PD dapat lebih semangat dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP kedepannya.

Alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan yaitu:

- a. Pembentukan tim adhoc Sakip;
 - b. Penandatanganan komitmen oleh Kepala OPD untuk bersungguh-sungguh memberikan upaya terbaik sesuai tugas dan fungsi melalui beberapa tindak aksi.
17. Untuk Indikator kinerja **nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota** ditunjang program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebanyak 41.881.900. Program ini memiliki satu kegiatan yaitu kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dan tiga sub kegiatan. Sub kegiatan yang mendukung kegiatan LPPD Kota padang berada pada sub kegiatan Fasilitasi

Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan adanya sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah tersebut, setiap kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan LPPD Kota Padang dapat terpenuhi walaupun dalam kurun waktu berjalan terjadi beberapa kali penyusutan anggaran sehingga anggaran awal yang direncanakan telah jauh berkurang. pelaksanaan kegiatan ini merupakan kegiatan rutin seperti pembentukan tim penyusun, rapat tim inti kemudian rapat anggota tim bersama OPD terkait, verifikasi dan evaluasi hasil penyusunan LPPD tahun 2022 setiap OPD, kemudian penyusunan LPPD Tahun 2022 oleh tim penyusun, evaluasi rancangan LPPD Kota Padang Tahun 2022 oleh Inspektorat Kota Padang, pencetakan Buku LPPD Kota Padang Tahun 2022, evaluasi oleh Tim Provinsi Sumatera Barat kemudian evaluasi oleh Dirjen Otda Kementrian Dalam Negeri.

18. Untuk Indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik** ditunjang dengan program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan dukungan terhadap capaian kinerja tersebut dilakukan survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik untuk 20 Perangkat Daerah, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan perangkat daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
19. Untuk Indikator kinerja **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini adalah sebanyak 2 Program dan 3 Kegiatan. Adapun pencapaian dari program/ kegiatan tersebut dapat diuraikan dibawah ini :
 - a. Program Aplikasi dan Informatika
Program Aplikasi dan Informatika terdiri dari beberapa Kegiatan, antara lain :
 1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
Untuk kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/ kota terdiri dari 2 sub kegiatan, antara lain :

a) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.713.635.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.706.051.190,-.

Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ini merupakan salah satu kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian indeks SPBE. Kegiatan ini menunjang pencapaian dalam pembuatan sub domain dan infrastruktur pendukung. Kegiatan ini sangat dibutuhkan dalam pencapaian indeks SPBE terutama dalam sarana dan prasarana infrastruktur jaringan internet.

2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 181.459.050,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.186.950,-.

b) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 356.252.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 355.613.850,-.

c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 205.343.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.998.900,-.

Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan kegiatan pendukung dalam pencapaian indeks SPBE, terutama dalam pengelolaan e-government. Kegiatan ini sangat berperan besar dalam pencaiana target indeks SPBE di Pemerintah Kota Padang baik dari Perencanaan, Penatalaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi serta Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- b. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - a) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 63.201.164,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.992.500,-.

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ini merupakan kegiatan pendukung dalam pencapaian indeks SPBE, terutama dalam pengelolaan keamanan informasi dan Analisis SDM pelaksanaan keamanan informasi.

3.B REALISASI ANGGARAN

No.	Indikator Kinerja / Program	Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah				
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	248.200.541.865	230.283.316.689	92,78

No.	Indikator Kinerja / Program	Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
Angka Harapan Hidup				
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67.065.617.000	58.569.540.245	87,33
Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	319.175.900	228.216.400	71,50
2.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	896.988.300	853.290.350	95,13
3.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	370.445.000	316.014.650	85,30
4.	Program Perlindungan Perempuan	181.562.000	147.792.500	81,40
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	397.012.000	351.238.700	99,47
6.	Program Pengelolaan Sisten Data gender dan Anak	27.450.000	19.801.500	72,13
Pengeluaran Per Kapita				
1.	Program perencanaan dan pengendalian evaluasi daerah	1.351.218.500	1.263.528.755	93,51
2.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	872.077.500	804.664.400	92,27
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan				
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	57.455.359.050	48.500.975.863	84,41
Persentase perumahan dan permukiman yang layak				
1	Program Kawasan Permukiman	15.685.235.597	15.030.496.033	95,82
2	Program Pengembangan Perumahan	2.069.665.760	1.762.402.335	85,15
3.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh	3.729.916.000	3.339.313.525	89,52
4.	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	43.520.461.250	37.412.847.742	85,96
Angka Kriminalitas				

No.	Indikator Kinerja / Program	Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	19.407.500.300	19.085.443.126	98,34
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	589.784.720,-	549.016.250,-	93.09
2.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	3.243.970.300,-	3.134.113.069,-	96.61
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	91.211.000,-	91.116.500,-	99.90
4.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	88.412.700,-	87.329.500,-	98.77
Luas Kawasan Kumuh yang Ditangani				
1.	Program Kawasan Permukiman	8.189.605.262	8.049.501.315	98,29
Tingkat Pengangguran Terbuka				
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	778.621.000	576.187.004	99,58
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	290.068.000	284.671.750	98,13
Tingkat Kemiskinan				
1.	Program Pemberdayaan Sosial	5.917.819.800	2.242.461.500	37,89
2.	Program Rehabilitasi Sosial	984.223.375	859.556.452	87,33
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	608.968.900	539.876.050	88,65
PDRB Per Kapita (ADHB)				
1.	Program perencanaan dan pengendalian evaluasi daerah	1.351.218.500	1.263.528.755	93,51
2.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	872.077.500	804.664.400	92,27
Peningkatan nilai PMA dan peningkatan nilai PMDN				
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	432.095.150	424.716.624	98,29

No.	Indikator Kinerja / Program	Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
2.	Program Pengendalian Penanaman Modal	638.227.000	442.467.080	69,33
3.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	85.340.000	84.936.000	99,53
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB				
1.	Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan	3.841.978.696	3.697.835.784	96,24
2.	Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	221.637.933	220.687.750	99,57
3.	Program Pengembangan Ekspor	58.417.000	55.203.000	94,49
4.	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	198.951.040	195.799.450	98,41
5.	Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri	4.940.840.176	4.656.240.635	94,24
Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (e-kraf)				
1.	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	3.309.107.200	2.889.400.516	87,32
Kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap pariwisata Sumatera Barat				
1.	Program pemasaran pariwisata	5.776.288.900	5.144.235.660	89,06
Jumlah kunjungan wisata mancanegara, jumlah kunjungan wisata domestik, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara serta rata-rata lama tinggal wisatawan domestik				
1.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.259.282.422	8.521.106.225,88	92,03
Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana				
1.	Program Penanggulangan Bencana	3.771.470.550	3.558.250.432	94,35
Persentase Bencana yang ditangani				
1.	Program Penanggulangan Bencana	5.330.977.442	4.903.143.373,97	97,97
Opini BPK atas laporan keuangan				
1.	Program pengelolaan keuangan daerah	5.699.237.289	4.627.297.257	81,19

No.	Indikator Kinerja / Program	Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	%
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.552.224.271	7.164.182.819	94,86
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83.124.000	81.199.850	97,69
4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	426.912.650	417.101.050	97,70
Nilai SAKIP				
1.	Program perencanaan dan pengendalian evaluasi daerah	1.351.218.500	1.263.528.755	93,51
2.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	872.077.500	804.664.400	92,27
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	255.477.000	237.108.125	92,81
4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	194.482.100	193.694.400	99,59
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota				
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	83.827.000	77.364.700	92,29
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	181.651.000	179.563.563	98,85
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				
1.	Program Aplikasi Informatika	3.713.635.200	3.706.051.190	99,80
2.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	63.201.164	62.992.500	99,67



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang ini disusun untuk memberi gambaran tentang capaian kinerja program maupun sasaran sebagai realisasi pencapaian target-target yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2019-2024. Capaian kinerja ini telah dituangkan dalam kontrak kerja berupa Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Padang setelah melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya pada tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa bupati/wali kota menyusun Laporan Kinerja Tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Padang menetapkan sebanyak 20 (duapuluh) sasaran dengan 31 (tigapuluh satu) indikator kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan dan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran strategis, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar, dengan 2 indikator kinerja: a. Rata-rata lama sekolah (tahun) dengan persentase capaian 99,91%, dan b. Harapan lama sekolah (tahun) dengan persentase capaian 100,06%.
- Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan 2 indikator kinerja: a. Angka harapan hidup dengan persentase capaian 100,33% dan b. Prevalensi stunting pada balita dengan persentase capaian 100,78%.
- Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kesenjangan Gender, dengan 1 indikator kinerja: Indeks Pembangunan Gender, persentase capaian belum dapat diukur karena datanya belum tersedia.
- Sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja, Pengeluaran per kapita, persentase capaian 101,02%..

- Sasaran 5 dengan 1 indikator kinerja, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan, dengan persentase capaian 101,96%..
- Sasaran 6 dengan 1 indikator kinerja, Persentase perumahan dan pemukiman yang layak, dengan persentase capaian 96,14%.
- Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan di dalam Masyarakat, dengan 1 indikator kinerja: Angka kriminalitas, dengan persentase capaian 105,01%.
- Sasaran Strategis 8. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sanitasi, dengan 2 indikator kinerja: a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan persentase capaian 106,56%, dan b. Luas Kawasan kumuh yang ditangani (ha) dengan persentase capaian 100%.
- Sasaran Strategis 9. Meningkatnya Kesempatan Kerja, dengan 1 indikator kinerja: Tingkat pengangguran terbuka dengan persentase capaian 97,24%.
- Sasaran Strategis 10. Meningkatnya Tingkat Perekonomian Penduduk, dengan 2 indikator kinerja: a. Tingkat kemiskinan dengan persentase capaian 100,1%, dan b. PDRB per kapita dengan persentase capaian 107,53%.
- Sasaran 11 dengan 2 indikator kinerja, a. Peningkatan nilai PMDN dengan persentase capaian 87,65%, dan b. Peningkatan nilai PMA dengan persentase capaian 527%.
- Sasaran 12 dengan 1 indikator kinerja, Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, persentase capaian 98,15%.
- Sasaran Strategis 13. Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Ekonomi Kreatif dengan 1 indikator kinerja: Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif, dengan persentase capaian 112,47%.
- Sasaran 14 dengan 1 indikator kinerja, Kontribusi sektor pariwisata Kota Padang terhadap capaian belum dapat diukur karena datanya belum tersedia 90,41%.
- Sasaran 15 dengan 4 indikator kinerja, a. Jumlah wisata mancanegara dengan persentase capaian 639,83%, b. Jumlah kunjungan wisata domestik dengan persentase capaian 149,96%, c. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dengan persentase capaian 99,48%, dan d. Rata-rata lama tinggal wisatawan domestik dengan persentase capaian 112%.

- Sasaran Strategis 16. Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana, dengan 1 indikator kinerja: Peningkatan kelurahan tangguh bencana, dengan persentase capaian 100%.
- Sasaran Strategis 17. Berkurangnya Dampak Kebakaran dan Penyelamatan Kedaruratan Lainnya, dengan 1 indikator kinerja, Persentase bencana yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100%.
- Sasaran Strategis 18. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, dengan 1 indikator kinerja: Opini BPK atas laporan keuangan dengan persentase capaian 100%.
- Sasaran Strategis 19. Meningkatnya Kinerja Birokrasi, dengan 2 indikator kinerja: . a. Nilai AKIP dengan persentase capaian 98,33%, dan b. Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) kota dengan persentase capaian 101,8%.
- Sasaran Strategis 20. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, dengan 3 indikator kinerja: a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik dengan persentase capaian 104,45%, b. Indeks Kemudahan Perizinan Daerah dengan persentase capaian 101,4%, dan c. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan persentase capaian 110% (SPBE).

Dari hasil pengukuran atas 20 sasaran strategis dengan 31 indikator kinerja, secara umum telah memenuhi target dengan capaian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 21 indikator kinerja mencapai target (67,74%).
2. Sebanyak 9 indikator kinerja belum mencapai target (29,03%).
3. Sebanyak 1 indikator kinerja belum dapat dihitung karena datanya belum tersedia (3,22%).

**PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH
PEMERINTAH KOTA PADANG SEPANJANG TAHUN 2024**

No	Tanggal Penghargaan	Nama Penghargaan	Lokasi Penghargaan/ Instansi Penerima	Pemberi Penghargaan	Foto Penghargaan
1	8 Januari 2024	Penilaian Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dengan Nilai Kualitas Tinggi (82,64)	Padang/Pemerintah Kota Padang	Ombudsman RI	
2	12 Januari 2024	Atas Keberhasilan Pemerintah Kota Padang Menurunkan Angka Keluarga Beresiko Stunting	Padang/DP3AP2K B	BKKBN Provinsi Sumatera Barat	
3	22 Januari 2024	Sertifikat Akreditasi Paripurna Dalam Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	Padang/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang – Dinas Kesehatan	Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP) - Kemenkes RI	
4	5 Februari 2024	Peringkat Satu Nasional Pengelolaan DAK Non-Fisik BOK POM 2023	Jakarta/Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	
5	1 Maret 2024	Juara III Kategori Survival National Fire Fighter Skill Competition (NFCS)	Kota Surabaya/Dinas Pemadam Kebakaran	Kementrian Dalam Negeri RI	
6	1 Maret 2024	Harapan III Kategori Leader Pitching National Fire Fighter Skill Competition (NFCS)	Kota Surabaya/Dinas Pemadam Kebakaran	Kementerian Dalam Negeri RI	

7	1 Maret 2023	Penghargaan Atas Keberhasilan Menerapkan Sistem Merit Dalam Pengisian Jabatan Tinggi Tahun 2023	Padang/BKPSDM	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	
8	5 Maret 2024	Anugerah Media Center (AMC) 2024 - Peringkat Pertama Kontribusi Konten Berita	Bandung/Diskominfo	Kementerian Kominfo	
9	5 Maret 2024	Anugerah Media Center (AMC) 2024 - Peringkat Ketiga Konten Berita Terpopuler	Bandung/Diskominfo	Kementerian Kominfo	
10	6 Maret 2024	Penghargaan Kota Padang Atas Penginapan 100 persen Evaluasi Perkembangan Kelurahan (Tepat Waktu)	Bukittinggi/Bagian Tata Pemerintahan	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	-
11	20 Maret 2024	Tingka Tahun Berturut (2021-2024) Menerima Penghargaan TOP CEO BUMD 2024	Jakarta/Wali Kota Padang	Majalah Top Business	

12	24 April	Peringkat 5 Terbaik Nasional Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jakarta/Bagian Tata Pemerintahan	Kementerian Dalam Negeri RI	
		PENJABAT	WALI	KOTA	
13	16 Juli	Kota Wakaf 2024	Jakarta/Pemerintah Kota Padang	Kementerian Agama RI	
14	17 Juli	Atas Kepedulian Dalam Memfasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Koperasi dan UMKM	Padang/Dinas Koperasi dan UKM	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
15	27 Agustus	Anugerah Ayah Genre Tahun 2024 kategori Pengayom	Padang/Pj Wali Kota Padang	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
16	27 Agustus	Penghargaan Sebagai Kepala Daerah yang telah berpartisipasi mendukung program penguatan fungsi penyuluh agama dan pembentukan kampung moderasi beragama	Jakarta/Pj Wali Kota Padang	Menteri Agama Republik Indonesia	
17	29 Agustus	Penghargaan Wali Kota Penggerak Pengelolaan Sampah Laut	Makassar/Pj Wali Kota Padang	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia	

18	5 September	Penghargaan Anugerah Pandu Negeri Juara Kategori Silver – Pemerintah Daerah dengan Kinerja dan Governansi Kategori Memuaskan	Jakarta/Kota Padang	IIPG (Indonesia Institute for Public Governance)	
19	6 September	Penghargaan Atas Dukungan Dan Kerjasama Yang Diberikan Dalam Pelaksanaan Puncak Festival Adat Budaya Nusantara (FABN) III Sumatera Barat	Padang/Pj Wali Kota Padang	dari Ketua Umum DPP Matra Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Andi Bau Malik Barammamase Karaenta Tukkejannangang Satrio Sasmito	
20	9 September	Peringkat Kedua Untuk Kategori Video Kuliner dalam lomba Video Kreatif Bangga Berwisata di Indonesia	Jakarta/Dinas Pariwisata	Kemenparekraf RI	
21	9 September	Peringkat Keempat Untuk Kategori Video Event Daerah dalam lomba Video Kreatif Bangga Berwisata di Indonesia	Jakarta/Dinas Pariwisata	Kemenparekraf RI	
22	9 September	Peringkat Ketiga Untuk Kategori Video Seni Dan Budaya dalam lomba Video Kreatif Bangga Berwisata di Indonesia	Jakarta/Dinas Pariwisata	Kemenparekraf RI	
23	10 September	Penghargaan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2024 kategori sangat tinggi,	Jakarta	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	
24	10 September	Penghargaan Sebagai Tokoh Pelestarian Lingkungan dan Mitigasi Bencana	Jakarta/Pj Wali Kota Padang	Tempo Media Group	

25	14 September	Penghargaan ‘Lencana Jasa Pratama’ atas kontribusi dan dukungan dalam memajukan PMI	Padang/Pj Wali Kota Padang	Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang	
26	18 September	Penghargaan Nirwasita Tantra	Jakarta/Dinas Lungkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup	
27	8 Oktober	Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan Tahun 2024 Ayo Cetting	Jakarta/Dinas Kesehatan/Puskesmas Andalas	KemenPAN-RB RI	
28	5 November	Penghargaan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) – Tradisi Serak Gulo	Pariaman/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kemendikbud Ristek RI	
29	8 November	Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran se-Indonesia	Jakarta/Kominfo/Pr okopim	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	
30	18 November	Penghargaan Daerah Tertib Ukur (DTU) untuk Kota Padang	Banjarmasin/Dinas Perdagangan	Kementerian Perdagangan RI	

31	18 November	Pasar Tertib Ukur (PTU) bagi Pasar Alai	Banjarmasin/Dinas Perdagangan	Kementerian Perdagangan RI	
32	18 November	Pasar Standar Nasional Indonesia (SNI) Untuk Pasar Rakyat	Banjarmasin/Dinas Perdagangan	Kementerian Perdagangan RI	
33	5 Desember	Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024 Kategori Sangat Inovatif	Jakarta/Bappeda	Kementerian Dalam Negeri (Kmendagri) RI	
34	11 Desember	Penghargaan Sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jakarta/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI	
35	11 Desember	Penghargaan Sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jakarta/ Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI	
36	11 Desember	Penghargaan Sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Jakarta/RSUD dr. Rasidin Padang	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI	

37	11 Desember	Penghargaan Sebagai Pemerintah Kota Peduli Penyiaran Dengan Kategori Terbaik Di Sumbar	Padang/Diskominf o	KPID Sumbar	
38	11 Desember	Meraih predikat A dalam kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 93,68 dengan zona hijau	Padang/Pemko Padang	Ombudsman RI	

Update; Jumat, 25 Desember 2024



PEMERINTAH KOTA PADANG INSPEKTORAT

Alamat: Jl. Sawahan No. 50 Padang
Telp. 0751- 891044

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang untuk tahun anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja merupakan tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Padang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara *akurat, andal dan valid*.

Selama proses reviu diketahui terdapat kondisi yang perlu dilakukan penyempurnaan terkait format, mekanisme dan substansi laporan kinerja.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang, 19 Maret 2025
INSPEKTUR

Drs. ARFIAN
Pembina Utama Muda
NIP. 196507071986021005